



**Sekilas Informasi**  
**(Januari - Maret 2006)**

**OLEH**

**SEKRETARIAT Keadilan & Perdamaian  
KEUSKUPAN JAYAPURA**

[www.hampapua.org](http://www.hampapua.org)

**Jayapura**  
Juni 2006

## **Sepatah Kata**

**S**ekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura senantiasa menyajikan catatan-catatan hak asasi manusia di Papua setiap triwulan yang diramu dengan analisis singkat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan gambaran kepada khalayak umum tentang dinamika situasi sosial politik di Papua seperti halnya edisi Januari – Maret 2006 ini.

Seri Papua Aktual no. 5 ini mengalami keterlambatan penerbitan karena dinamika masyarakat selama tiga bulan pertama tahun ini amat menyita tenaga staf SKP untuk turun ke lapangan.

Dengan uraian ini diharapkan pembaca dapat memperoleh gambaran situasi tiga bulan terakhir sehingga memiliki informasi yang cukup lengkap untuk memahami keadaan di Papua dewasa ini.

Selamat membaca,

Jayapura, 9 Juni 2006

A.F. Sari Rosa Moiwend  
Penulis

# **BAGIAN I**

## **LINTASAN PERISTIWA HAK ASASI MANUSIA JANUARI – MARET 2006**

### **A. SITUASI HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK**

#### **A.1. Irian Jaya Barat (IJB) VS OTSUS**

3 Januari

Pokja Papua di Jakarta Frans Maniagasi mengatakan, Hukum IJB haruslah permanen berupa Undang-Undang (UU) tentang Pemekaran Provinsi dalam konteks Otsus Papua bukan bersifat temporer seperti apa yang diusulkan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Peraturan Pengganti UU (Perpu). Selain itu, Perpu sangat tidak logis sebab situasi dan kondisi politik di Tanah Papua tidak berada dalam situasi darurat perang.

5 Januari

Kepala Badan Kesatuan Bangsa J. Wimpie Wola mengatakan landasan hukum bagi Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) yang sampai saat ini masih belum tuntas dibahas. Salah satu penyebabnya adalah DPRP Papua sendiri dalam posisi dilematis, karena saat ini wilayah kerja DPRP hanya mencakup Provinsi Papua.

11 Januari

Setelah MRP berencana menggelar konsultasi publik untuk menjaring pendapat masyarakat tentang pemekaran IJB, Pemda dan DPRD Irian Jaya Barat menggelar pertemuan dengan Mendagri guna menolak rencana MRP tersebut. Ketua DPRD IJB menyatakan kekecewaannya terhadap sikap MRP yang masih mempermasalahkan ekstensi IJB.

23 Januari

Bupati Manokwari Drs. Dominggus Mandacan mempertegas dukungan pemerintah dan masyarakat di daerah ini terhadap keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat. Di hadapan Ketua MRP Agus Alue Alua, Wakil Ketua MRP Ir. FA Wospakrik M Sc, dan Ketua Pansus Pemekaran, NA Maidepa, Bupati Mandacan mengatakan “Jangan memunculkan masalah baru. Apa yang sudah berjalan biarlah berjalan, jangan dipermasalahkan lagi. Namun yang sekarang dilakukan adalah bagaimana memperkuat status keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat ini “, tegas Bupati di depan 14 anggota MRP di Manokwari.

Ketua MRP Agus Alue Alua mengatakan wilayah Papua yang mencapai 4 kali pulau Jawa, namun penduduknya hanya 2,6 juta jiwa dimana di dalamnya hanya terdapat 1,6 juta jiwa orang asli Papua. “Apakah ini bagus, penduduk asli Papua hanya 1,6 dan wilayahnya di potong-potong. Maka itu substansi ini harus kita lihat dulu dan tanya kepada rakyat,” jelasnya. “Kalau memang rakyat mau pemekaran Provinsi IJB, silakan. Tapi, yang disusun nanti bukan penguatan Perpu IJB, namun merupakan suatu aturan yang dapat menjamin, bahwa UU Otsus akan memproteksi orang asli Papua.”

24 Januari

Pejabat Gubernur Irian Jaya Barat (IJB) Ir. Timbul Pujiyanto MPM mengharapkan kedatangan pimpinan dan anggota MRP ke IJB untuk bertemu dengan komponen

masyarakat dan pemerintah, akan mempercepat penyelesaian pengesahan Perpu sebagai payung hukum Provinsi IJB.

Pakar Hukum Ferry Karet mengatakan jika Provinsi IJB ikut serta dalam Pilkada yang saat ini dilaksanakan oleh Provinsi Papua akan membawa dampak luas dan kompleks karena akan mengundang pro dan kontra dikalangan masyarakat baik IJB maupun Papua dan masalah ini akan menjadi rumit.

Dari penjaringan aspirasi anggota MRP di Kabupaten Kaimana, sebagian besar masyarakat Kaimana menolak keberadaan Provinsi IJB dan siap mengikuti Pilkada Gubernur Papua. Hal ini dikatakan oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Majelis Rakyat Papua (MRP) Angganeta Wally, S.Pd.MM.

25 Januari

Tatap muka Pansus MRP tentang Pemekaran Papua dengan Tim 315 (Forum Pejuang Pemekaran Provinsi Papua) diwarnai kegaduhan. Dari Tim 315 yang hadir diantaranya Ketua DPRD IJB Jimmy Demianus Ijie, Hermus Indow, Lazarus Indow, dan tokoh lainnya. Sekitar 30-an warga yang menghadiri pertemuan ini mengeluarkan kata-kata yang memojokkan MRP. Mereka mendesak agar MRP segera menentukan sikap untuk mendukung pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat.

Pemerintah dan DPRD Provinsi Irian Jaya Barat keberatan dengan langkah-langkah yang diambil MRP dalam menjaring aspirasi masyarakat mengenai perlu tidaknya pemekaran di Tanah Papua. Ketua DPRD Jimmy Demianus Ijie bersama Gubernur Provinsi IJB Ir. Timbul Pujiyanto MPM akan melaporkan kepada Pemerintah Pusat.

Ketua DPRD IJB menilai, MRP sebagai lembaga kultural orang asli Papua, tidak konsisten dengan kesepakatan bersama. Kesepakatan MRP dengan Pemerintah Pusat itu adalah, MRP diberi ruang dan waktu untuk melakukan konsultasi publik. Lagi pula konsultasi publik ini harus dilakukan atas koordinasi dan persetujuan Pemerintah Provinsi IJB juga, pihak Provinsi IJB akan melakukan pendampingan."Kenapa mereka masuk ke mana-mana tidak ada pendampingan".

Sementara itu Wakil Ketua MRP, Ir FA Wospakrik M.Sc menyatakan pihaknya datang ke masyarakat untuk mengetahui keinginan dan harapan masyarakat. Mau dibawa ke mana masyarakat berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2001.

26 Januari

Dalam menjaring aspirasi terkait keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat (IJB), Ketua dan anggota MRP sempat mendapat ancaman dari orang-orang tidak dikenal. Hal ini diakui oleh Ketua MRP Agus Alue. "Pada Kamis dini hari, ada beberapa pemuda datang ke tempat penginapan Hotel Metro, Manokwari dan mengancam Pimpinan dan anggota MRP dengan alat tajam, namun kami telah laporkan pada pihak Polisi untuk ditindaklanjuti", ujarnya.

Anggota DPRD IJB Chaidir Jafar SE, Msi mengatakan, pihaknya juga akan menjaring aspirasi dari masyarakat di wilayah IJB terkait dengan keberadaan Provinsi IJB sebagai perbandingan dari hasil konsultasi publik yang dilakukan oleh MRP.

Ketua KPUD Provinsi IJB, Ny Regina Sauyai mengatakan Pilkada di Provinsi Irian Jaya Barat telah tertunda 2 kali sehingga dana sebesar Rp 43 Miliar mubazir.

27 Januari

Wakil Ketua MRP, Dra. Hana S. Hikoyabi mengatakan hasil sementara konsultasi publik di wilayah Provinsi Irian Jaya Barat menunjukkan bahwa pada umumnya banyak orang ingin tetap 1 Provinsi Papua.

29 Januari

Masalah pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat serta kunjungan MRP di wilayah Provinsi IJB terus memunculkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Ketua Umum Forum Perjuangan Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat (FPPP-IJB), Hermanus Indow menegaskan, Provinsi IJB lahir sebelum disahkan UU nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua. Sehingga yang harus dilakukan saat ini adalah bagaimana mensinkronkan antara realitas di IJB dengan UU Otsus. Ia juga menambahkan apa yang dilakukan MRP di Provinsi IJB dalam rangka konsultasi publik adalah mengarah pada upaya sinkronisasi, bukan mencari pendapat rakyat, mengenai persoalan apakah IJB ini perlu atau tidak.

1 Februari

Bupati Teluk Wondama, Drs. Albert H Torey, MM secara tegas menyatakan pihaknya mendukung pemekaran dan keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat (IJB).

7 Februari

Ketua MRP Agus Alua mengatakan hasil konsultasi publik yang dilakukan oleh MRP terhadap masyarakat IJB di 9 Kabupaten di daerah tersebut belum dapat disimpulkan.

8 Februari

7 Bupati dan Ketua DPRD se-provinsi IJB secara bulat menyatakan sikap politiknya. Para Bupati dan Ketua DPRD se IJB minus Bupati, Ketua DPRD Sorong, Walikota dan Ketua DPR Kota Sorong, meminta agar pemerintah pusat segera menetapkan payung hukum operasional Provinsi IJB. Mereka menolak hasil konsultasi publik yang dilakukan oleh MRP di wilayah Provinsi IJB dan menilai hal tersebut menyimpang dari kesepakatan antara pemerintah dan MRP di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2006.

15 Februari

Pemerintah Pusat melalui Mendagri M. Ma'ruf memberikan batas waktu kepada MRP hingga 20 Februari 2006 sehubungan dengan adanya penolakan dan pembatalan MRP untuk melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah pusat untuk menyampaikan rekomendasi pembentukan payung hukum provinsi IJB yang didasari atas hasil konsultasi publik. Mendagri M. Ma'ruf menegaskan jika batas waktu tidak diindahkan MRP, maka Pemerintah Pusat dengan pakar-pakarnya bersama dengan pihak IJB akan mengkaji pembentukan payung hukum tersebut tanpa harus menunggu hasil konsultasi publik yang dilakukan MRP.

Sementara itu pihak IJB di bawah pimpinan Penjabat Gubernur IJB, Ir. Timbul Pujiyanto MPM dan anggota DPRD IJB beserta bupati se IJB mendatangi Kementrian Dalam Negeri untuk bertemu dengan Menteri dalam Negeri, M. Ma'ruf.

16 Februari

Ketua MRP Agus Alua mengatakan bahwa rekomendasi dan hasil konsultasi publik tentang IJB sudah diserahkan kepada pihak DPRP untuk dibahas.

Wakil Ketua DPRP Komarudin Watubun mengatakan telah menerima hasil konsultasi publik dan rekomendasi yang dibuat oleh MRP pada tanggal 14 Februari 2006. Rekomendasi tersebut disertai dengan Surat Keputusan MRP

Nomor 03/MRP/2006 tentang pengesahan hasil konsultasi publik di 8 kabupaten dan 1 kota di wilayah IJB. Kemudian juga Keputusan MRP Nomor 04/MRP/2006 tentang Pendapat MRP mengenai Provinsi IJB dan satu berkas surat bernomor 125/61/MRP/2006 perihal jawaban mengenai Penetapan dan persetujuan pembentukan IJB atau nama lain. Lebih lanjut Komarudin menerangkan bahwa hasil konsultasi publik itu termuat dalam SK No. 04/MRP/2006.

Berikut ringkasan hasil konsultasi publik :

1. Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi baru seperti IJB atau dengan nama lainnya belum saatnya dilakukan.
2. Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi baru seperti Provinsi IJB atau dengan nama lain dilakukan berdasarkan pasal 76 UU Nomor 21 tahun 2001.
3. Apabila pemekaran Provinsi Papua tetapi dilaksanakan dengan mengabaikan hukum pertama dan kedua keputusan ini, maka masalah Papua akan semakin rumit. Oleh karena itu MRP atas nama rakyat Papua meminta pemerintah untuk melakukan suatu dialog guna menyelesaikan masalah Papua secara demokratis, komprehensif, adil dan bermartabat.
4. Pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua meliputi seluruh wilayah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a UU Nomor 21 tahun 2001 yang sebelumnya disebut Provinsi Irian Jaya.

17 Februari

Setelah melalui Paripurna Istimewa, DPRP menyetujui rekomendasi yang disampaikan oleh MRP soal IJB. Pada Intinya DPRP berpendapat bahwa Pemekaran Provinsi Papua harus dikembalikan ke UU No. 21 tahun 2001 tentang OTSUS. Pihak DPRP atas nama rakyat Papua mengancam akan mengembalikan UU Otsus yang sudah berlaku sejak 2001 di Provinsi Papua ke Pemerintah RI, jika Pemerintah RI memaksakan pembentukan payung hukum Provinsi IJB.

Dua ketetapan DPRP :

1. Pemekaran Pro. Papua menjadi IJB atau nama lain belum saatnya dilakukan dan apabila pemekaran dilakukan di Provinsi Papua harus berdasarkan pasal 76 dalam UU Republik Indonesia No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
2. Apabila Pemerintah Pusat tetap melaksanakan pemekaran Provinsi IJB atau nama lain diluar ketentuan pasal 76 UU RI No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, maka DPRP atas nama rakyat Papua akan menggelar rapat paripurna untuk mengembalikan UU. No.21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua.

Ketua KPUD Provinsi Papua M. Ferry Kareth, SH, M Hum, mengatakan bahwa terkait dengan Pilkada GUB 10 Maret 2006 maka pemerintah harus menanganinya secara serius dan baik mengingat hasil konsultasi publik yang dilakukan MRP, yang juga menyebutkan tentang Pilkada 10 Maret 2006. Dirinya mendesak pemerintah agar segera membuat keputusan politik sebelum akhirnya mengeluarkan keputusan hukum dalam rangka mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan terkait dengan Pilkada mendatang.

Foker LSM dan beberapa organisasi keagamaan menyatakan sikap secara tegas menolak pemekaran IJB dan memberikan dukungan terhadap keputusan MRP. Organisasi tersebut adalah Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Wilayah XII di Tanah Papua (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jayapura dan Persatuan Wanita Kristen

Indonesia (PWKI) Provinsi Papua. Hal ini ditegaskan oleh Ketua *Steering Committee* Foker LSM, Yuvenalis Ledang dalam Jumpa Pers di Aula Kantor Foker LSM Jayapura.

19 Februari

Ketua DPRD IJB Jimmy Demianus Ijie mengatakan bahwa provinsi IJB akan menjadi taruhan martabat pemerintah pusat di mata masyarakat. Kalau Pemerintah Pusat menuruti keinginan MRP dan DPRP sama saja dengan menyetujui negara ini terpecah-pecah, tinggal hitungan detik saja. Mengantisipasi hasil putusan Pemerintah Pusat yang akan dikeluarkan pada tanggal 20 Februari, pihak IJB sudah menyipkan fatwa ke Mahkamah Konstitusi.

20 Februari

Pertemuan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Papua gagal menentukan nasib Provinsi IJB, karena Pemerintah Pusat masih mempelajari rekomendasi dari MRP dan DPRP. Menko Polhukam, Widodo Adi Sucipto mengatakan bahwa pemerintah perlu mencermati rekomendasi MRP dan DPRP karena terdapat sejumlah item yang krusial dalam penerapan UU Pemerintahan Daerah dan UU Otsus.

21 Februari

Rombongan IJB yang dipimpin oleh Pjt. Gubernur IJB Ir. Timbul Pujiyanto MPM, ketua DPRD Jimmy Ijie serta Bupati, Walikota dan Tokoh Masyarakat IJB bertemu dengan Wapres Yusuf Kalla dan kemudian bertemu dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimmly Asshiddiqie. Menurut keterangan Jimmy Ijie, mereka hanya meminta ketegasan dari MK mengenai keberadaan Provinsi IJB. Jimmy Ijie juga mengatakan bahwa semua proses pembentukan Provinsi IJB sudah final dan sah sebagai subjek hukum tata pemerintahan karena telah ada pemerintahan sendiri dan perangkat-perangkatnya.

27 Februari

Penjabat Gubernur Provinsi IJB, Ir. Timbul Pujiyanto, MPM menegaskan bahwa pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur IJB akan tetap dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2006.

28 Februari

Ketua KPUD IJB Regina Sauyai mengatakan jumlah pemilih di Provinsi IJB berjumlah 406.413 jiwa, dengan jumlah TPS sebanyak 1.723 TPS yang tersebar di 8 Kabupaten dan 1 kota.

1 Maret

Rapat kerja pimpinan daerah Kabupaten dan Kota se-wilayah Provinsi Irian Jaya Barat di Sorong, menyimpulkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur IJB dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2006.

3 Maret

Agus Alua (Ketua MRP) menyayangkan sikap pemerintah pusat yang merestui PILKADA IJB karena masalah IJB sendiri belum selesai dan masih dalam penanganan pemerintah pusat. Yang dikhawatirkan adalah satu kesatuan kultural dipecah-pecah oleh undang-undang, dimana satu bagian diproteksi secara khusus tetapi bagian lain tidak diproteksi. Agus menilai bahwa Pilkada IJB rupanya menggunakan dasar UU. No. 32 tahun 2004 dan bukan UU no. 21/2001, meskipun MRP merekomendasikan untuk memakai UU.No. 21/2001. Ada sinyal kuat dari Wapres tentang pemberlakuan secara sementara UU No. 32 tahun 2004 di IJB.

#### 6 Maret

Sebanyak 47 kepala kampung yang terdapat di Distrik Manokwari Selatan, Minyambouw, Catubuy dan Hink menyatakan akan memilih semua pasangan secara bersama-sama mulai dari nomor satu hingga nomor tiga (alias kertas suara batal) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat, 11 Maret. Kecuali kalau ada salah satu pasangan yang datang bertemu dengan masyarakat yang berada di 47 kampung. Kemudian para kandidat memberikan uang sebesar Rp.60 juta kepada masing-masing kampung.

Keputusan Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) untuk menggelar Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 11 Maret atau sehari setelah Pilkada Provinsi Papua, rupanya belum sepenuhnya diketahui Pejabat Gubernur Papua Dr. Sodjungan Situmorang, M.Si.

#### 7 Maret

MRP minta Pilkada ditunda. Ketua I MRP, Ir Wospakrik. M.Sc mengatakan, surat kepada KPUD yang meminta agar Pilkada di Papua dan Irian Jaya Barat ditunda sudah dikirim ke KPUD. Penundaan ini erat kaitannya dengan hasil konsultasi publik yang telah dibuat dalam suatu rekomendasi MRP dan sudah disampaikan kepada Pemerintah Pusat bulan Februari. Salah satu rekomendasinya adalah pemekaran Papua harus berdasarkan UU nomor 21 tahun 2001.

#### 8 Maret

Kelompok mahasiswa yang menamakan dirinya Lintas Mahasiswa Peduli Demokrasi di Tanah Papua mendatangi DPRP, mereka menyatakan mendukung MRP dan DPRP untuk menolak keberadaan Provinsi IJB yang ingin dibentuk oleh Pemerintah Pusat.

Sementara itu Direktur ICS Budi Setyanto, SH mengatakan ancaman MRP untuk mengembalikan OTSUS jika tetap dilaksanakan Pilkada IJB, tidak realistis. Hal ini disebabkan karena Pilkada sudah jauh-jauh hari disiapkan dan saat itu MRP tidak mendiskusikannya. Menurutnya disamping ketidakkonsistenan pemerintah pusat tetapi juga sudah nampak sejak dibentuknya KPUD IJB, DPRD IJB serta terakhir pengangkatan pejabat Gubernur IJB. Dirinya mempertanyakan mengapa MRP tidak memfokuskan untuk menyelesaikan masalah itu saja, sampai akhirnya datang pada PILKADA. Dikatakan Pemda Provinsi Papua, DPRP dan MRP tidak boleh melihat makalah ini secara parsial tetapi secara menyeluruh berdasarkan UU No 21/2001 tentang Otsus. Sebaiknya Pemda Provinsi Papua, DPRP dan MRP tidak merasa bisa menyelesaikan masalah ini sendiri dengan melihat keterbatasannya dan sangat perlu melibatkan *stakeholder* di Papua serta para pakar di bidangnya.

#### 10 Maret

Rencana Pemerintah untuk mengadakan Pilkada langsung bagi Provinsi Irian Jaya Barat (IJB), mendapat kecaman kalangan LSM dan anggota DPD yang menilai bahwa penyelenggaraan Pilkada itu adalah bentuk inkonsistensi pemerintah di dalam menjalankan kebijakan Otonomi Khusus

Sementara itu anggota DPD Papua, Ferdinanda Yatipai mengatakan, Undang-Undang Otsus hadir karena masyarakat Papua meminta Merdeka."Tapi ketika orang Papua mau menjalankan Otsus sesuai UU No.21 tahun 2001, justru orang Jakarta memberikan UU No.32 tahun 2004 dan terkesan Jakarta sedang memicu konflik di Papua, bukan menyelesaikan masalah di Papua.



11 Maret

Dilaksanakan Pilkada Gubernur IJB yang diikuti oleh 3 pasangan kandidat masing-masing

1. Abraham O. Aturuti – Drs. Rahimin Katjong
2. Yoris Th Raweyai – Dr. Ir. H. Abdul M Killian
3. Drs. Dortheus Asmuruf MM – Drs. M. Ali Kastella.

15 Maret

Panwas Pilkada Gubernur Irian Jaya Barat (IJB) menemukan sejumlah pelanggaran pada saat pelaksanaan Pilkada IJB. Temuan-temuan ini sudah ditindaklanjuti dan dikaji untuk diproses lebih lanjut. Hal ini dikatakan Ketua Panwas IJB, Ir. Rudi Maturbongs.M.Si.

22 Maret

#### Hasil Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada Gubernur IJB

KPU Daerah	Bram - Katjong	Yoris - Killian	Decky – Ali
Kota Sorong	38.270	9.978	9.065
Kab. Sorong	23.437	7.432	3.337
Kab. Sorsel	16.645	3.499	8.777
Kab. Raja Ampat			
Fak-Fak	12.800	2.437	978
Kaimana	13.423	6.770	6.947
Teluk Bintuni	8.967	2.903	2.638
Teluk Wondama	10.679	3.267	5.562
Kab. Manokwari			
	5.037	2.327	1.290
	54.021	29.996	8.379

#### Total Perolehan Suara

1. Bram – Katjong : 183.279 suara ( 61,32 persen )
2. Yorrays – Killian : 68.609 suara (22,95 persen)
3. Decky – Ali : 46.970 suara ( 15,72 persen )

27 Maret

Keberatan terhadap hasil penetapan hasil Pilkada yang dilakukan KPUD IJB sesuai SK No.13/KPU IJB/2006, 23 Maret 2006. Pasangan Calon Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat, Yorrays Raweyai – Dr.Ir.H.Abdul M. Killian,M.Si mengajukan gugatannya ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Jayapura.

28 Maret

KPU Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) siap melayani kasus gugatan perdata Pilkada yang diajukan pasangan Calon Gubernur IJB Yorrays Raweyai – Dr.Ir.Abdul.M.Killian.M.Si. Ketua KPUD IJB, Ny Regina Sauyai mengatakan walaupun secara administrasi belum menerima pemberitahuan dari Pengadilan Tinggi Jayapura tetapi pihaknya telah menyiapkan data-data untuk disampaikan dalam persidangan nanti.

30 Maret

Menkopolkam Widodo AS mengatakan, walaupun IJB menyelenggarakan Pilkada Gubernur – Wakil Gubernur sesuai UU No.32/2004 tentang pemerintahan daerah, namun pemerintah pusat akan tetap mendorong IJB berjalan sesuai UU No.21 tahun 2001 tentang Otsus.

## **A.2. Hiruk Pikuk Pilkada Gubernur Papua**

6 Januari

Sekretaris KPUD Provinsi Papua Drs.H.Hasyim Sangadji mengatakan, jumlah pemilih tetap di Papua yang mempunyai hak memilih Gubernur / Wakil Gubernur Papua periode 2006-2011 pada Pilkada yang akan jatuh pada 16 Februari 2006, berjumlah 1.429.649 pemilih.

14 Januari

Ketua Panwas Pilkada Gubernur Papua Kabupaten Merauke, Antonio, MA, SH mengungkapkan sejumlah Tim Sukses pasangan calon Gubernur yang dinilai mulai mencuri star dengan membagi – bagikan baju kaos dan stiker.

17 Januari

Ketua KPUD Provinsi Papua M. Ferry Kareth, SH, meminta Ketua KPUD Kabupaten Mappi diganti. Hal ini disebabkan karena belum dilantiknya pasangan calon Bupati Kabupaten Mappi sampai saat ini.

18 Januari

Ketua KPUD Provinsi Papua, M. Ferry Kareth, SH, mengatakan Pilkada di Papua kemungkinan diundur karena 50 % KPUD di tingkat Kabupaten /Kota belum siap.

25 Januari

Keempat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yakni :

1. Costan Karma – Donatus Mote;
2. Dick Henk Wabiser – Simon Petrus Inaury;
3. Lukas Enembe – H. Arobi;
4. Barnabas Suebu – Alex Hese gem;

Menolak Pilkada yang sudah ditetapkan pada tanggal 16 Februari 2006 dan meminta harus diundur. Mereka mengancam bila Pilkada ditunda mereka akan menduduki KPUD dengan massa yang besar.

27 Januari

KPUD Provinsi Papua secara resmi melakukan penundaan Pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2006 – 2011, yang semula direncanakan pada tanggal 16 Februari 2006, diundur menjadi tanggal 10 Maret 2006. Hal ini resmi disampaikan pihak KPUD Provinsi Papua yang dipimpin Ketua KPUD, Ferry Karet SH.M.Hum didampingi anggotanya Pdt. S. Rumoirusi S.Th dan Yohanis Bonay SH.

Dengan pemunduran ini maka KPUD sudah 3 kali menunda jadwal Pilkada. Penundaan yang pertama terjadi tanggal 10 Oktober ke 23 November, yang kedua tanggal 23 November ditunda ke 16 Februari dan ketiga kalinya tanggal 16 Februari ditunda ke tanggal 10 Maret.

Daniel Gerden, Ketua Tim Koalisi Papua Baru yang mengusung pasangan Cagub dan Cawagub Barnabas Suebu dan Alex Hese gem, dengan tegas mengatakan bahwa KPUD telah melakukan kesalahan besar dan membohongi publik.

25 Februari

Ketua KPUD Provinsi Ferry Kareth, SH, M.Hum mengatakan dana tambahan untuk Pilkada sebesar Rp. 18 Milyar akan segera cair. Dikatakan dari Rp. 18 Milyar tersebut, Rp. 14.927. 650.000 dialokasikan ke kabupaten dan kota, selebihnya ada di KPUD Provinsi Papua. Dana tersebut oleh kabupaten dan kota digunakan untuk membayar honor anggota dan karyawan KPUD, PPD dan PPS di

masing-masing kabupaten dan kota selama tiga bulan yakni sejak bulan Januari, Februari dan Maret mendatang.

<b>DANA TAMBAHAN PILKADA YANG DITERIMA MASING-MASING KABUPATEN DAN KOTA</b>		
No	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Merauke	Rp. 974.733.500
2.	Jayawijaya	Rp. 2.021.700.000
3.	Jayapura	Rp. 848.817.500
4.	Nabire	Rp. 875.961.500
5.	Yapen Waropen	Rp. 654.879.500
6.	Biak Numfor	Rp. 978.135.000
7.	Paniai	Rp. 827.341.500
8.	Puncak Jaya	Rp. 788.390.000
9.	Mimika	Rp. 611.948.000
10.	Boven Digul	Rp. 705.090.000
11.	Mappi	Rp. 786.710.000
12.	Asmat	Rp. 796.897.000
13.	Yahukimo	Rp. 580.409.000
14.	Pegunungan Bintang	Rp. 593.946.000
15.	Tolikara	Rp. 802.010.000
16.	Sarmi	Rp. 608.276.000
17.	Keerom	Rp. 391.850.000
18.	Waropen	Rp. 420.354.000
19.	Supiori	Rp. 327.653.000
20.	Kota Jayapura	Rp. 350.549.000
	<b>Total</b>	<b>Rp. 14.927.650.000</b>
	** Selebihnya dari total Rp. Miliar adalah untuk KPUD Provinsi Papua *** Sumber KPUD Provinsi Papua – seperti dikutip Harian Cepas.	

Di Wamena, pasangan Calon Gubernur – Wakil Gubernur Lukas Enembe, SIP dan Haji Arobi Ahmad Aituarauw melakukan kampanye Perdana di lapangan Sinapuk Wamena. Calon Gubernur Lukas Enembe dalam orasi politiknya mengatakan selama dekade 40 tahun Papua selalu dipimpin oleh orang dari pesisir/ pantai Papua, maka sudah saatnya anak Koteka dari lembah pegunungan tampil sebagai pemimpin Papua ke depan. Dikatakan selama ini orang koteka mengalami diskriminasi kepemimpinan yang berkepanjangan, tak ada satu orang wakilpun dari pegunungan yang duduk di kursi pemerintahan Provinsi Papua, kemampuan orang Koteka diragukan. Sementara itu Ketua Paguyuban Jawa, Sukardi Djaelani mengemukakan pada dasarnya seluruh kerukunan keluarga yang ada di kota Wamena, baik dari Jawa, Sulawesi dan kerukunan lainnya siap untuk mendukung Lukas Enembe dan H. Ahmad Arobi Aituarauw menjadi Gubernur – Wakil Gubernur periode 2006 – 2011 mendatang.

27 Februari

Pasangan Drs. John Ibo, MM dan Paskalis Kossy, S.Pd. MM melakukan kampanye di lapangan Sinapuk Wamena. Dalam orasinya, John Ibo mengatakan negeri Papua saat ini sangat membutuhkan pemimpin yang mengerti dan dapat memahami kemauan rakyat kecil. Dikatakan pihaknya akan berusaha untuk memperjuangkan pembentukan kabupaten baru yang selama ini sudah diusulkan masyarakat, yaitu Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah,

Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, menjadi kabupaten definitif sehingga dengan demikian aspirasi masyarakat dapat terpenuhi secara utuh dan bulat.

Pasangan calon Gubernur Barnabas Suebu – Alex Hesegem menggelar kampanye di eks Lapangan Bola Sentani. Dalam pidato politiknya Bas Suebu berjanji akan banyak turun ke desa (Turdes) memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana jalan menuju ke daerah yang belum terjangkau selama ini. Menurutnya program ini merupakan program lama yang pernah dijalankan olehnya sewaktu menjabat sebagai gubernur dan akan melanjutkan lagi di era sekarang ini.

#### 1 Maret 2006

Wakil Ketua KPU Prof Dr. Ramlan Surbakti, MA melantik 2 orang anggota Pengganti Antar Waktu anggota KPUD Provinsi Papua yaitu Urbanus Siante, BA sebagai pengganti H. Musaad dan Selfiana Sanggenafa, SH sebagai pengganti Golda Aronggear, SH yang meninggal dunia pada bulan Desember 2005. Pelantikan hanya diikuti oleh Urbanus Siante, BA sedangkan Selfiana Sanggenafa, SH tidak hadir dengan alasan orang tuanya sakit. Keduanya dinyatakan resmi sebagai anggota KPUD Provinsi Papua setelah menjalani test dan propert test pada tanggal 28 Februari 2006 di Kantor KPUD Provinsi Papua.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Purnawirawan Laksamana Pertama (TNI AL) Dick Henk Wabiser dan Ir. Simon Petrus Inaury, M.Si dalam kampanyenya di Lapangan PTC Entrop mengangkat 2 hal penting, yaitu pembangunan dan keamanan. Dalam bidang pembangunan Wabiser mengatakan akan memperhatikan bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan juga menciptakan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan berwibawa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat Papua. Dikatakan bahwa biaya pendidikan dan pengobatan harus gratis. Membangun Papua yang lebih sejahtera membutuhkan keamanan dan ketentraman yang berarti perlu ada jaminan keamanan bagi penduduk yang mendiami Tanah Papua, baik masyarakat sipil maupun aparat pemerintahan. “Kalau memang saya terpilih, saya akan menjamin masalah keamanan. Tidak akan ada letusan senjata di provinsi ini, aparat dan masyarakat harus bergandengan tangan untuk menjaga ketertiban dan keamanan”.

#### 2 Maret

Meski Pilkada Gubernur Provinsi Papua tinggal beberapa hari lagi, namun Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Merauke mengaku masih kekurangan surat suara sekitar 546 lembar. Tentang hal ini disampaikan Ketua KPUD Merauke Eligius Gebze, SH.

#### 3 Maret

Dewan Pengurus Cabang (DPC) Golkar Kabupaten Jayapura, menggelar pertemuan kader Golkar di Wisma Rileks Tanjung Elmo, pertemuan ini untuk mempersiapkan dan mematangkan dukungan kepada kader Golkar Jhon Ibo dan Paskalis Kossy sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2006-2011. Dalam kesempatan itu Ketua Umum Partai Golkar Kabupaten Jayapura mengajak simpatisan Golkar untuk tidak ragu memilih kader Golkar yang maju dalam Pilkada kali ini.

#### 6 Maret

Di wilayah kota Jayapura, kampanye terbuka lima pasangan kandidat calon ditutup oleh Ketua KPUD Kota Jayapura Dr. La Pona di lapangan PTC Entrop setelah melalui pawai damai yang mengambil start di Lapangan Bumi

Perkemahan Waena. Dalam pertemuan itu juga dilakukan penandatanganan siap menang siap kalah dari para kandidat masing-masing.

Setelah melakukan kampanye terbuka selama 21 hari sejak tanggal 21/2/2006 – 06/3/2006. Semua kegiatan kampanye terbuka pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur ditutup Provinsi Papua periode 2006 - 2011 ditutup dengan debat kandidat di Sasana Krida kantor Gubernur.

#### 7 Maret

Ketua Panwasda Supiori Yotam Wakum, SH mengatakan pihaknya akan memanggil Tim Kampanye Pasangan John Ibo – Paskalis Kossy sehubungan dengan ditemukannya pelanggaran yang dilakukan oleh tim kampanye tersebut. Yotam menjelaskan bahwa tim kampanye pasangan ini telah melakukan kampanye di Sorendiwari Distrik Supiori Timur pada tanggal 4 Maret 2006 dan tidak sesuai dengan jadwal yang dibuat KPUD Supiori.

#### 8 Maret

Hingga H-2, daftar pemilih tetap (DPT) di masing-masing Panitia Pengumuman Suara (PPS) dan Tempat Pengumuman Suara (TPS) nampak masih bermasalah. Masih banyak masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT sehingga kemungkinan besar tidak bisa mengikuti pencoblosan. Kepala Distrik Abepura Samuel Mehue, SE mengatakan dari kunjungan yang dilakukan pihaknya ke masing-masing TPS masih banyak dikeluhkan tentang DPT yang belum jelas. Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Jayapura, Dr. La Pona mengatakan sesuai ketentuan, penduduk yang bisa mencoblos pada Pilkada Gubernur nanti, hanya bagi mereka yang namanya tercantum di Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian mempunyai kartu pemilih dan surat undangan.

#### 10 Maret

Pilkada Gubernur – Wakil Gubernur Papua secara serentak dilakukan diseluruh wilayah Papua.

Merasa kecewa tidak bisa menyoblos, sekelompok warga merusak TPS 22, di jalur 6 perumahan Vuria, Kelurahan Vim, Distrik Jayapura Selatan.

Ketua KPUD Kabupaten Jayapura Mathius Awaitouw mengatakan, ada 9 TPS di Distrik Kaureh yang daerahnya sulit dijangkau dan belum bisa melaksanakan pengumuman suara karena sulitnya medan dan cuaca yang buruk. Hal serupa juga terjadi pada beberapa TPS di wilayah Kabupaten Keerom yang tertunda akibat banjir besar.

#### 14 Maret

Meski pleno penghitungan suara Pilkada Gubernur Provinsi Papua dilakukan KPUD Maret 2006, namun sejak Senin 13 Maret, kantor KPUD Provinsi sudah dijaga ketat oleh Brimob.

Ketua KPUD Biak Barat Dicky Daniel Iwanggin mengatakan, sekitar 20 ribu pemilih di Biak tidak menyoblos dalam pelaksanaan Pilkada. 10.000 diantaranya berada di Biak kota.

#### 16 Maret

Ketua Panwas Pilkada Provinsi Papua Drs. Max Mirino SH, MM, mengatakan guna menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelanggaran pada Pilkada Gubernur Papua tanggal 15 Maret 2006, Panwas Pilkada Provinsi Papua melakukan investigasi ke sejumlah daerah.

Rapat pleno yang digelar KPUD Jayawijaya di gedung DPRD Jayawijaya, tidak dihadiri oleh saksi atau tim sukses dari pasangan Cagub/Cawagub nomor urut 1 (Karma-Mote), nomor urut 2 (Wabiser-Inaury), nomor urut 5 (John Ibo – Paskalis Kosay ). Pasalnya dari ketiga tim sukses ini menilai, bahwa KPUD selaku lembaga penyelenggara Pilkada gagal, karena tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam pelaksanaan Pilkada 10 Maret.

28 Maret

Bupati Yahukimo Ones Pahabol, SE.MM membantah keras adanya tuduhan dari berbagai pihak tentang adanya politik kotor yang terjadi di wilayah pemerintahannya selama pelaksanaan Pilkada Gubernur 10 Maret. Dikatakan bahwa Pilkada di Kabupaten Yahukimo sudah berjalan demokratis sedangkan keterlambatan hasil suara masuk ke KPUD Provinsi dari KPUD Yahukimo karena kondisi geografis di Kabupaten Yahukimo yang sangat sulit.

30 Maret

Menjelang Pleno KPUD Provinsi Papua, Pimpinan Tokoh-Tokoh Agama di Papua meminta kelima calon gubernur dan tim suksesnya tetap mempertahankan Papua sebagai Tanah Damai dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji.

### **A.3. Kasus 16 Maret 2006**

15 Maret

Terjadi aksi pemalangan jalan di depan kampus Uncen oleh kelompok massa yang menamakan diri Parlemen Jalanan dan Front Pepera PB, yang dimulai sejak pukul 12.00 sampai 18.10 WIT. Mereka menolak keberadaan PT. Freeport Indonesia dan militer di Tembagapura. Ada 3 tuntutan pendemo *Pertama*, meminta PT Freeport Indonesia ditutup. *Kedua*, Meminta pasukan TNI/Polri ditarik dari lokasi Freeport, dan *ketiga* bebaskan 7 tahanan akibat bentrok di Timika.

16 Maret

Kericuhan terjadi pada pukul 12.15 WIT, ketika ada beberapa massa pendemo yang melempar batu dan botol ke arah aparat yang sedang bernegosiasi dengan Arnoldus Oba (Ketua Front Pepera Kota Jayapura) dan Selpius Bobii (Sekjen Front Pepera PB). Setelah lama bernegosiasi, massa tidak mau pemblokiran jalan dibuka, namun aparat tetap menginginkan agar pemblokiran jalan dibuka. Aparat dengan pakaian anti huru hara jalan berbaris dan berusaha mendesak masa. Massa mundur ke halaman kampus Uncen dan melemparkan batu, botol, kayu kearah aparat yang berjumlah sekitar 20-an orang. Aparat terpaksa mundur dan masa menyerbu ke arah aparat. Melihat kejadian itu, anggota intelijen coba membantu dengan mengeluarkan tembakan. Aksi masa semakin brutal dan mereka menghujam pukulan dan batu kearah aparat yang terjatuh. Akibatnya Pratu Daud Soleman (Dalmas), Brigadir Syamsudin (ditemukan tewas pukul 16.00 WIT), Briptu Arisona Horota dan Serda Agus Supryadi, Intelijen AURI (ditemukan pukul 17.15 WIT). Dalam penyisiran itu dibantu oleh 2 Kompi TNI Yonif 751.

Korban yang meninggal dunia:

1. Briptu Pol Arizona Horota (Brimob Polda Papua). Tewas akibat tertusuk benda tajam pada rusuk kiri dan kening kanan.
2. Briptu Pol Syamsudin (Brimob Polda Papua). Tewas akibat kepala remuk terkena lemparan batu.
3. Bharatu Daud Soeleman (Dalmas Polresta Jayapura). Tewas akibat kepala remuk terkena lemparan batu.

4. Serda Agus Supriyadi (Intelijen AURI). Tewas diduga kuat dianiaya, karena disamping kiri dan kanannya ditemukan batu dan kayu

Sebelum terjadi bentrok, ketua DPRD Komarudin Watubun, SH sempat menawarkan beberapa opsi, agar pemblokiran jalan dibuka, namun massa bersikukuh tidak membuka jalan hingga ada kejelasan penutupan Freeport Indonesia.

Para anggota Brimob melakukan penyisiran sepanjang jalan dan ke gunung-gunung untuk mengejar massa yang diduga melakukan aksi demo. Penyisiran dilakukan sampai malam hari. Bahkan mereka melakukan penyisiran ke rumah-rumah penduduk dan asrama mahasiswa di sekitar Abepura dan Waena. Siapa saja warga sipil orang Papua yang ditemui di jalan langsung dipukuli dan diangkut ke ke Polresta Jayapura. Situasi menjadi amat tegang di daerah Abepura, Waena dan sekitarnya. Sampai malam hari jalan raya sepi karena warga sipil takut.

17 Maret

Sekitar pukul 08.00 WIT pagi, pasukan Brimob masih melakukan penyisiran dan penembakan membabi buta di sekitar kawasan Abepura dan Kampus Uncen. Aksi tembakan ke udara ini berlangsung sekitar 1 jam dan sempat membuat warga sekitar ketakutan, terutama anak-anak.

Kepala Satuan (Kasat) Brimobda Papua, Kombes Pol. Tatang Hermawan dicopot dari jabatannya dan digantikan sementara oleh Kombes Pol. Robby Kaligis. Tatang Hermawan dinilai telah melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Keputusan ini dibuat oleh Kapolri Jend. Pol. Sutanto dalam acara tatap muka bersama tokoh Agama, tokoh Adat dan tokoh Masyarakat di Aula Makodam Jayapura.

Dengan menggunakan kendaraan roda dua dan empat, Brimob melakukan penyisiran di wilayah Abepura dan Kotaraja dengan mengeluarkan tembakan ke udara. Akibat dari tembakan 3 warga sipil terkena peluru nyasar yaitu Solehah (39) terkena peluru di paha kanan, Ratna Sari (12) terkena pada jari kaki kanan, dan Chatrin Ohee (9) terkena di bagian bahu kanan. Selain itu tanpa komando, personel Brimob Papua melakukan *sweeping* terhadap setiap kendaraan yang melintas di jalan dekat Markas Brimobda Papua Kotaraja.

Jumlah warga yang ditahan bertambah, dari 40 orang menjadi 73 orang. Dari 73 tahanan, 10 di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, antara lain: Elkana L (21) Patiasus (30), Ellyas T (21), Othen D (22), Luis G (26), Pemius W (21), Feri P (21), Selpius Bobii (26), Alex C.W (22), dan Ferdonando P (22). Tersangka Selfius Bobii akan dijerat pasal 160 KUHP, karena diduga tersangka telah melakukan penghasutan di depan umum dan diancam hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun. Tersangka Alex CW dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat NO. 12 tahun 1951, karena diduga kuat tersangka membawa senjata tajam. Tersangka lainnya, akan dijerat pasal 170 KUHP jo Pasal 214 KUHP tentang tindak pidana pengeroiyokan dan melawan petugas.

Jenazah Briпка Syamsudin (33) dimakamkan di TPU Abepantai, Bripta Arsona dimakamkan di Sorong, Baratu Daud Soelaiman diterbangkan ke Jawa (Bekasi Timur), dan Serda Agung diterbangkan ke Bandung.

Menkopolhukam Widodo AS, Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto, Kapolri Jend. Pol. Sutanto, dan Kepala BIN Syamsir Siregar mengunjungi Jayapura terkait kasus 16 Maret 2006 untuk bertemu dengan para tokoh Agama, tokoh

Masyarakat dan tokoh Adat. Toko agama yang hadir antara lain, Mgr. Leo Laba Ladjar, ofm, Pdt. Socrates Sofyan Yoman, Ketua MUI Papua, Zubeir Husein, Pdt. Hermann Saud, perwakilan agama Budha dan Hindu di Papua. Widodo AS mengatakan ia sangat menyayangkan aksi demo yang menjurus ke tindakan anarkis yang jelas-jelas keluar dari koridor demokrasi. Ia meminta peranan toga, tomas dan todat dalam menyelesaikan kasus ini. Setiap masalah dikelola dengan baik dengan sebuah pemahaman baik pula. "Mari kita tekad dan komitmen untuk tetap mewujudkan Papua Tanah damai, Tanah yang Diberkati dan Dikasihi Tuhan". Uskup Jayapura, Mgr. Leo Laba Ladjar, ofm dalam kesempatan yang sangat terbatas, atas nama para tokoh agama menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya 4 aparat dan meminta maaf kepada masyarakat karena tidak mampu berperan menenangkan masyarakat. Mgr. Leo mengharapkan aparat tidak perlu melakukan penyisiran, karena akan menimbulkan masalah baru.

Sekitar pukul 15.30 WIT, 4 wartawan Televisi yaitu Dewa (ANTV), Aryo (26) dan Goror (TV 7), Endi (32) (RCTI), dan Metro (belum diketahui identitasnya) dianiaya oleh anggota Brimob di depan Markas Brimob Kotaraja. Beberapa anggota Brimob menghancurkan kamera dan alat-alat lainnya, memukul wajah dan tubuh keempat wartawan dengan popor senapan.

Sekretaris Eksekutif Foker LSM Papua, J Septer Manufandu dalam *press release* mengatakan; **pertama**, turut prihatin dan menyampaikan belasungkawa kepada korban yang meninggal maupun yang luka-luka dari pihak militer maupun pihak sipil. **Kedua**, secara prinsipil LSM Papua tidak menyetujui proses penyampaian aspirasi yang mengedepankan kekerasan dan merugikan kepentingan publik, karena bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai demokrasi. **Ketiga**, masyarakat sipil yang ingin menyampaikan aspirasi dihibmabu untuk melakukannya dengan cara yang demokratis dan melalui mekanisme yang ada. **Keempat**, mendukung proses hukum yang profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengusut tuntas pelaku kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban dan menghimbau kepada semua pihak untuk menghindari cara-cara kekerasan yang menimbulkan ketakutan pada masyarakat sipil yang tidak bersalah. **Kelima**, dihibmabu kepada para pejabat daerah (Gubernur, DPRD, MRP, Todat, Toga dan aparat keamanan) di Papua untuk peka dan sensitif terhadap persoalan yang muncul dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat dengan secepatnya mencari solusi. **Keenam**, menghimbau kepada Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyelesaikan persoalan di Papua secara komprehensif dan bermartabat dengan sungguh-sungguh. Foker LSM yang tergabung antara lain Ketua Steering Commite Foker LSM Papua Juvenalis Ledang, Sekretaris Markus Kayoi, anggota Paskalis Letsoin, Mince Uduas, Benny Samori, Theresia Samkakai, Ambrosius Degey, Edwin Rumatora dan Nataniel Yelemaken.

Siaran Pers PBHI Jakarta mengatakan, setelah memantau dan menerima laporan perkembangan situasi yang terjadi pada 16 Maret 2006 di Kampus Uncen, PBHI melalui ketuanya Johnson Panjaitan menyampaikan beberapa sikap: **Pertama**, sangat prihatin atas terjadinya insiden kekerasan di Abepura yang menewaskan 4 aparat, serta 19 polisi, seorang wartawan Tempo Cunding Levi, seorang balita dan empat orang warga sipil luka-luka. **Kedua**, turut berdukacita atas korban yang meninggal dunia dan mengutuk pihak manapun yang melakukan kekerasan. Siapapun pelaku langsung ataupun yang berada di balik insiden tersebut harus dikejar untuk mempertanggungjawabkannya menurut norma hukum yang berlaku. **Ketiga**, memprotes keras pernyataan yang dikeluarkan oleh Kapolda Papua yang terkesan membenarkan diterapkannya tindakan represif oleh aparat kepolisian untuk mengendalikan dan memulihkan



kondisi keamanan, karena dapat memperkeruh suasana yang sudah sangat buruk. **Keempat**, mengecam tindakan penyisiran secara serampangan yang disertai intimidasi ke asrama-asrama mahasiswa dan pemukiman masyarakat Pegunungan Tengah di wilayah Jayapura-Abepura dan Sentani. **Kelima**, mengecam panahan dan penangkapan secara sewenang-wenang yang telah dilakukan aparat kepolisian terhadap 40 warga sipil yang sekarang berada di Polresta Jayapura. **Keenam**, Mendesak Komnas HAM dan DPR RI untuk segera mungkin turun ke lapangan untuk memantau secara langsung perkembangan situasi dan memastikan kebijakan pengendalian oleh aparat keamanan.

Moses Yelipele (25) yang sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan yang menetap di Abepantai dipukul oleh Brimob sehingga mengakibatkan luka pada wajah, mata, serta kepala mengalami luka sobek dan telinganya mengeluarkan darah.

#### 18 Maret

Tim penyidik dari Polresta Jayapura dan Polda Papua telah menetapkan 14 tersangka dalam kasus 16 Maret 2006 antara lain:

1. Selpius Bobii (25) Sekjen Front Pepera PB yang berstatus mahasiswa.
2. Luis G (27) Karyawan Toko Metro Jaya Abepura
3. Fery P (22) Tukang parkir
4. Fenius W (22) mahasiswa
5. Alex CW (21) mahasiswa
6. Othen D (25) swasta
7. Thomas U (22) mahasiswa
8. Elkana L (22) pelajar SMU
9. Ellyas T (30) mahasiswa
10. Patrisius A (30) swasta
11. Markus K (47) pegawai
12. Moses L (35) buruh bangunan
13. Musa A (28) pegawai honorer
14. Jefri O.P (21) pengangguran

Tim yang tergabung dalam 12 anggota Mabes Polri, Polda Papua, dan Polresta Jayapura melakukan pra rekonstruksi tragedi berdarah 16 Maret 2006 di depan kampus Uncen. Pra rekonstruksi dipimpin langsung oleh Direktur Reskrim Polda Papua, AKBP Paulus Waterpauw dan Ketua Tim Penyidik Mabes Polri Kombes. Pol. Mathius Salempang pada 16 titik. Pra rekonstruksi dimulai saat korban dipukul dan kemudian ditikam serta dihantam dengan batu. Selain itu rekonstruksi dilakukan di lokasi mobil cary dengan nomor polisi DS 1542 AK yang berisikan bom molotov, di mobil yang menjadi tempat penyimpanan makanan yang juga menjadi tempat penyimpanan rantai, panah, busur dan sebuah sepatu PDH, lokasi meninggalnya Bripka Syamsudin.

Proses rekonstruksi juga disaksikan oleh anggota Komnas HAM perwakilan Papua, para pengacara yang terdiri dari Pieter Eil, SH, Iwan Niode SH, dan Paskalis Letsoin, SH. Para pengacara ini baru tiba di lokasi ketika rekonstruksi sudah hampir selesai. Mereka hanya sempat menyaksikan rekonstruksi dari 3 orang tersangka. Keterlambatan pengacara ini karena mereka baru saja diberi tahu setelah tim akan memulai rekonstruksi, sementara para pengacara ketika itu sedang melakukan pertemuan dengan para pimpinan agama di Kantor Keuskupan Jayapura.

Dalam penyisiran yang dilakukan anggota Brimob pasca kasus "Uncen berdarah" 16 Maret 2006 ada beberapa asrama yang dirusak antara lain asrama Nayak dan

asrama Ninmin. Kaca jendela, pintu, TV dan peralatan lainnya dirusak oleh Brimob.

Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. Tommy Jacobus meminta maaf kepada 4 wartawan TV Nasional yang mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh oknum Brimob. Oknum Brimob yang melakukan penganiayaan akan ditindak sesuai dengan aturan dan segala peralatan yang rusak akan diganti oleh pihak kepolisian.

Komnas HAM Papua membentuk tim investigasi dan pemantauan kasus Uncen berdarah yang diketuai Albert Rumbekwan, SH, wakil ketua Juhari, SH, sekretaris Frits B Ramandey dan beranggotakan Yance T Waropen, Abina Wasanggai dan Sandra Mambrasar. Albert menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya 4 aparat keamanan dan meminta Kapolda Papua agar menindak tegas pelaku yang melakukan tindakan anarkis sesuai dengan proses hukum. Komnas menyerukan agar masyarakat dan aparat agar dapat menahan diri, tidak terprovokasi oleh isu-isu dan meminta perlindungan kepada Kapolda Papua terhadap para pekerja kemanusiaan.

Rekomendasi Komnas HAM Papua terkait kasus 16 Maret 2006: *Pertama*, meminta aparat keamanan untuk memberikan perlindungan kepada anggota Komnas HAM dalam pelaksanaan tugas bersama Polri di lapangan pasca kerusuhan. Hal ini sesuai dengan nota kesepakatan Komnas HAM dan Polri Nomor: 11/Komnas HAM/VI/2005. Nomor: Pol. B/1572/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005. *Kedua*, mendesak Pemerintah Pusat segera membuka diri untuk melakukan dialog terbuka terhadap tuntutan masyarakat tentang penutupan Freeport dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Investigasi ini dilakukan dengan mengacu pada berbagai laporan dan pengaduan tentang akses penyisiran paksa pembubaran demonstran 16 Maret 2006. "Kami sangat menyesali operasi balas dendam yang dilakukan oleh Brimob, karena masyarakat yang tidak bersalah juga dipukul dan barang-barangnya dirusak".

Wakil Ketua I MRP, Ir. Frans Wospakrik, M.SC, menanggapi peristiwa berdarah 16 Maret 2006 dengan mengatakan seluruh masyarakat Papua memiliki kewajiban dan ikut serta dalam menjaga Kamtibmas. Masyarakat tidak perlu terbawa oleh pengaruh pihak-pihak yang melakukan tindakan yang berlebihan dan merugikan masyarakat. Seluruh masyarakat diminta untuk tetap tenang dan meletakkan peristiwa tersebut secara proposional, arif, bijaksana, dan dapat mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Semua pihak dimohon untuk menghentikan segala tindakan di luar ketentuan hukum dan norma yang berlaku.

20 Maret

Direktur Reskrim Polda Papua, AKBP Paulus Waterpauw mengundang para Penasihat Hukum untuk berbicara tentang pendampingan korban yang ada dalam tahanan yang bertempat di Polda Papua. Penasihat hukum terdiri dari 8 orang yang berasal dari beberapa lembaga antara lain LBH Papua, ElSHAM Papua, Kontras Papua dan ALDP.

Direskrim Polda Papua, AKBP Paulus Waterpauw mengatakan bahwa dari hasil penyidikan ada 2 tersangka yang mengaku melakukan pengeroyokan terhadap Brimob dan Dalmas yaitu Feri Pakage (22) tukang parkir dan Luis Gedi (27) karyawan toko Metro Jaya.

21 Maret

Seusai pertemuan antara Kapolda Papua, DPRP, MRP dan Tokoh Agama, Kapolda Papua, Irjen Pol. Tommy Jacobus akan memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat dan mahasiswa pasca bentrok 16 Maret 2006 di Abepura. Kapolda juga menjamin tidak akan ada lagi penyisiran yang dilakukan oleh aparat untuk mencari orang-orang yang diduga kuat terlibat dalam bentrok itu. Apabila ada aparat yang masih melakukan penyisiran dan aksi-aksi yang meresahkan dan menakuti masyarakat akan ditindak tegas.

Uskup Jayapura, Mrg. Leo Laba Ladjar, ofm mengatakan karena sudah ada jaminan dari Kapolda untuk memberikan jaminan keamanan, maka masyarakat dan mahasiswa diharapkan untuk kembali melakukan aktivitasnya secara normal.

DPRP, MRP, dan Tokoh Agama mengeluarkan pernyataan sikap kepada Presiden RI SBY untuk menyampaikan kekecewaan atas kunjungan Menkopolkam dan rombongan ke Jayapura pada 17 Maret 2006. **Isinya:** para petinggi di Papua kecewa karena kedatangan Menkopolkam dan rombongan tidak mengadakan dialog dengan masyarakat. Dengan tidak membuka dialog, maka hal itu dilihat sebagai cerminan sikap Pemerintah Pusat yang dianggap tidak serius dalam menangani persoalan Papua. Menkopolkam dan rombongan hanya mengunjungi keluarga yang berduka dan korban yang ada di rumah sakit dan langsung pulang ke Jakarta.

Dalam konferensi pers Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) dan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) Uncen yang diadakan di Ruang Rapat Rektorat Uncen Kampus Waena, Ketua Senat MPM Uncen, Decky A Ovide dan Wakil Ketua I SMPT Uncen Mukry M Hamadi mengatakan ada isu-isu yang mengatakan bahwa sejumlah orang dan mahasiswa akan lari ke PNG meminta suaka politik, karena adanya ketakutan sejak terjadi bentrok 16 Maret 2006. Menurut Decky, memang Polri mengatakan akan menjamin keamanan, namun sampai saat ini kenyataannya polisi masih melakukan pencarian. Selain itu, Decky Juga menegaskan bahwa MPM dan SMPT Uncen tidak terlibat dalam bentrok 16 Maret. Kalau ada mahasiswa Uncen yang bergabung, mereka itu termasuk dalam anggota organisasi Front Pepera PB atau Parlemen Jalanan.

Terkait kasus 16 Maret 2006, SMPT dan MPM Uncen mengeluarkan 10 pernyataan sikap yaitu **pertama**, menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya 4 aparat. **Kedua**, badan pengurus SMPT dan MPM membantah terlibat dalam aksi masa tersebut, karena aksi demonstrasi itu dipimpin langsung oleh ketua Front Pepera PB dan Parlemen Jalanan yang merupakan organisasi eksternal kampus yang tidak memiliki ikatan dengan Uncen baik secara struktural maupun akademik. **Ketiga**, Kejadian itu bukan terjadi di lingkungan kampus, tetapi di ruas jalan Abe-sentani depan kampus Uncen. **Keempat**, kampus Uncen sejak lama terkenal sebagai corong penyampaian aspirasi masyarakat Papua sehingga segala bentuk demonstrasi damai dan aksi lainnya, sering menggunakan kampus Uncen, namun bukan berarti organisasi kemahasiswaan Uncen ikut terlibat di dalamnya. **Kelima**, Ketua umum SMPT dan MPM Uncen tidak ada di tempat pada kejadian 15 – 16 Maret 2006 dan tidak memberi mandat kepada pengurus lainnya. **Keenam**, meminta kepada jajaran Muspida Provinsi Papua agar segera mengeluarkan satu seruan kepada masyarakat dan kepada pihak yang bertikai agar menahan diri dan tidak terprovokasi atas isu-isu yang beredar sehingga tidak menimbulkan rasa takut dan konflik yang berkepanjangan dan mengupayakan rekonsiliasi serta dialog untuk menyelesaikan masalah ini. **Ketujuh**, meminta kepada Polda Papua mengusut tuntas pelaku pengeroyokan

aparatus keamanan dan mengumumkan kepada publik siapa pelakunya. **Kedelapan**, meminta kepada Polda Papua dan Kodam XVII/Trikora agar memberikan jaminan kepada warga dan mahasiswa yang tidak terlibat dalam peristiwa tersebut supaya bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. **Kesembilan**, meminta Pemerintah Pusat dan Daerah agar lebih peka dan tanggap dalam menyikapi beragam persoalan dengan mengedepankan jalur musyawarah untuk mufakat serta mengedepankan prinsip demokrasi sehingga peristiwa tersebut tidak terulang lagi. **Kesepuluh**, kepada rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswa Uncen agar dapat kembali melakukan aktivitas perkuliahan seperti biasa yang terhenti mulai tanggal 27 Maret 2006.

Sekitar pukul 16.00 – 17.00 WIT beberapa anggota Brimob melakukan penyisiran di Asrama Uncen Baru Perumnas III Waena. Mereka terdiri dari 3 orang berpakaian preman. Terdengar bunyi tembakan sebanyak 2 kali. Para penghuni asrama berlarian menyelamatkan diri ke gunung, tidak ada korban luka.

## 22 Maret

Anggota Brimobda Papua bernama Briptu Suhad Eko Pranoto yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Abepura meninggal dunia pada pukul 7.30 WIT. Jenazahnya segera diterbangkan ke Surabaya untuk selanjutnya dimakamkan di Ngawi, Jawa Timur.

Jajaran Polda Papua menangkap warga sipil bernama Mathias Mihel Dimara yang berprofesi sebagai wiraswasta. Ia ditangkap di rumahnya di belakang Rumah Sakit Marthen Indey, Kloofkamp Jayapura. MMD diduga kuat terlibat dalam aksi 16 Maret 2006. Tersangka mengaku melempar batu ke arah aparat.

Menanggapi adanya sinyalemen bahwa ada masyarakat dan mahasiswa yang ingin mencari suaka politik di PNG, Pejabat Gubernur Papua, Sodjuangan Situmorang mengatakan agar niat untuk mencari suaka di luar negeri sebaiknya tidak dilakukan, karena kondisi Papua khususnya Jayapura saat ini sudah mulai kondusif atau berjalan normal. Katanya “Kalau memang tidak bersalah kenapa mesti takut. Pokoknya kita menjamin, saya dan aparat keamanan menjamin tidak akan ada apa-apa, silakan masyarakat kembali melakukan aktivitas sebagaimana biasanya”.

Terkait dengan persoalan Freeport yang merupakan biang dari bentrok 16 Maret, Pejabat Gubernur Papua, Dr. Sodjuangan Situmorang menyarankan agar Freeport lebih transparan, supaya masyarakat mengerti apa dan bagaimana Freeport. Selama ini masyarakat tidak mengerti mekanisme Freeport, misalnya neraca perusahaan seperti apa, berapa besar *dividen* yang dibagi, siapa pemilik saham. Padahal ada tawaran dari Freeport untuk Pemda kurang lebih 9,5 %. Tawaran itu sudah lama, namun tidak pernah diketahui oleh masyarakat Papua.

## 23 Maret

Pimpinan-pimpinan agama dan sejumlah LSM yang bergerak dalam bidang hukum dan HAM melakukan pertemuan di Kantor Keuskupan Jayapura. Pertemuan dihadiri oleh pimpinan-pimpinan agama yang terdiri dari Pdt. Hermann Saud, M.Th, (PGGP), Pdt. Andreas Ayomi, M.Th (PGGP), Pdt. Wim Romainum (PGGP), Bpk. Dudung AQN (MUI), Bpk. IGM Sunartha, S.Ag (PHDI Provinsi Papua) dan perwakilan dari sejumlah LSM yaitu SKP Keuskupan Jayapura, Kontras Papua, ALDP, LBH Gideon, Elsham Papua, Sinode GKI Papua, LPHDM Papua, Yahamak, Foker LSM Papua, JPIC Sinode GKI, LBH Papua, dan juga LSM Nasional PBHI Jakarta, dan Jaringan Relawan Kemanusiaan Jakarta. Mereka sepakat untuk membentuk Tim Advokasi Papua

Tanah Damai (TAPTD) dengan koordinatonya adalah Pdt. Hermann Saud, M.Th.

Dalam rangka mengklarifikasi kasus 16 Maret 2006, pihak Uncen dan aparat keamanan (TNI dan Polri) mengadakan pertemuan di Rektorat Uncen. Pertemuan itu dihadiri oleh Rektor Uncen, Prof. Dr. Bert Kambuaya, Danrem 172/PWY Kolonel Azis Wanto, Dandim 1701/JPR, Letkol Viktor Tobing, Kapolresta Jayapura, AKBP Drs. Taufik Pribadi, sejumlah aparat keamanan, perwakilan mahasiswa, jajaran pembantu rektor, dekan dan ketua-ketua jurusan. Rektor Uncen mengatakan pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi terbaik dalam penyelesaiannya agar kasus serupa tidak terulang lagi. Diharapkan ke depan agar setiap mahasiswa disegani karena kemampuan otaknya, bukan dikenal karena kemampuan fisiknya. Danrem 1702/PWY menegaskan bahwa komitmen menjadikan Papua Tanah Damai perlu dipertahankan. Oleh karena itu dalam penyampaian aspirasi tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan dan tidak mengganggu kepentingan umum. Dandim, Victor Tobing mengatakan bahwa budaya palak dan melakukan pemalangan bukan budaya mahasiswa dan masyarakat Papua sehingga kebiasaan itu harus ditinggalkan.

Ketua Badan Pengurus Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Indonesia (AMPTI) bagian Indonesia Timur, Agus Alua mengatakan bahwa jaminan keamanan yang diberikan oleh Kapolda Papua, Tommy Jacobus kepada mahasiswa dan masyarakat seperti diragukan sebagian penghuni asrama. Sampai kini banyak mahasiswa yang belum kembali keasramanya. Jumlah mereka mencapai 200 orang. Mereka masih menetap di hutan dan di tempat persembunyian. Asrama-asrama yang masih kosong, yaitu Asrama Nayak, Elisa, Ninmin, Moni, dan Baliem Yalhimo.

Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono dalam menanggapi rencana sejumlah mahasiswa yang mencari suaka politik ke PNG, mengatakan bahwa rencana itu sangat tidak beralasan, karena kasus 16 Maret bukan hanya membawa trauma bagi mahasiswa tetapi juga kepada aparat keamanan. Juwono juga meminta untuk diselidiki jumlah mahasiswa yang melarikan diri ke hutan karena ada yang mengatakan 1200 orang dan 200 orang. Ia meminta agar mahasiswa yang masih bersembunyi di hutan agar kembali ke asrama-asrama dan tidak perlu khawatir atas tindakan balas dendam yang dilakukan oleh aparat keamanan.

Kapolda Papua, Irjen Pol. Tommy Jacobus, mengatakan bahwa pihak kepolisian telah menurunkan tim untuk mengidentifikasi kerusakan yang ada dan sekaligus melakukan perbaikan asrama yang rusak. Perbaikan asrama akan dipimpin langsung oleh Kepala Biro Logistik Kombes Pol Stevanus Sudibyo. Kepolisian telah menyiapkan material, tukang dan tim dari anggota Brimob untuk memperbaiki asrama-asrama yang rusak.

#### 24 Maret

Pihak Kepolisian mulai memperbaiki asrama-asrama yang rusak akibat penyisiran yang dilakukan oleh aparat keamanan pada 16 – 17 Maret 2006. Jumlah asrama yang rusak sebanyak 18 asrama. Asrama-asrama akan diperbaiki secara bertahap dan dimulai dengan asrama Sakura Uncen. Perbaikan asrama melibatkan aparat Kepolisian dari Polda Papua, Polresta Jayapura, Brimobda Papua, Polsekta Abepura dan mahasiswa yang dipimpin langsung oleh Karo Bina Mitra Polda Papua Kombes Pol. Drs. BPH Sitompul, SH.

Kepolisian menangkap 2 tersangka yaitu Nelson R (20) (preman) dan Besiur M (22) (mahasiswa) yang terlibat dalam bentrok di depan kampus Uncen Abepura.

Nelson ditangkap pada Pukul 02.00 WIT (dini hari) di Lingkaran Abepura dan Besiur ditangkap di Tanah Hitam pukul 17.00 WIT. Dengan ditangkapnya Nelson dan Besiur, maka jumlah tersangka menjadi 17 orang. Dari hasil pemeriksaan, Nelson adalah tersangka yang mengambil dua buah gas air mata yang dibawa Briptu Daud Soleman dan melemparkan batu ke korban. Sedangkan Besiur, diduga kuat telah mengumpulkan dana untuk kegiatan demo, mengumpulkan batu yang digunakan untuk melempar aparat dan mengumpulkan makanan untuk para demonstran.

#### 25 Maret

Tim Advokasi Papua Tanah Damai yang terdiri dari Tokoh Agama dan beberapa LSM mengadakan tatap muka dan mengunjungi para tersangka. Dalam kunjungan itu, Pdt. Hermann Saud menghimbau kepada mahasiswa agar kembali melakukan aktivitasnya dan tidak perlu takut dengan adanya isu penyisiran.

#### 26 Maret

Acara silaturahmi dan konferensi pers dalam menyikapi kasus 16 Maret 2006 diadakan di rumah jabatan Rektor Uncen, Padang Bulan. Acara tersebut dihadiri Rektor Uncen Prof. Dr. Bert Kambuaya, Kapolda Papua, Tommy Jacobus, Pjt. Gubernur Papua, Sodjuangon Situmorang, Pangdam XVII/Trikora, George Toisuta, Danlantamal V Brigjen TNI Sapardi, Wakil Ketua DPRP, Komarudin Watubun, Tokoh Agama, Pdt. Hermann Saud, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan sejumlah civitas akademika. Dalam pertemuan tersebut Kapolda Papua mensinyalir ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan Papua kacau dengan menyebarkan isu-isu yang meresahkan masyarakat. Salah satu isu yang menyesatkan, yaitu adanya berita penemuan 16 mayat pasca bentrok 16 Maret 2006. Tommy Jacobus mengatakan bahwa isu-isu itu tidak benar dan mengimbau kepada mahasiswa untuk kembali ke asrama dan melakukan aktivitas seperti biasa karena pihak kepolisian menjamin keamanan. "Mari kita tetap pertahankan Papua sebagai Tanah Damai". Hal senada juga diungkapkan oleh Rektor Uncen dan Pjt. Gubernur Papua.

#### 27 Maret

Direskrim Polda Papua, AKBP Paulus Waterpauw mengatakan dari hasil pengembangan penyidikan pihak Kepolisian, DPO (daftar pencarian orang) bertambah dari 12 orang menjadi 17 orang.

Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Se-Indonesia (AMPTI) Dewan Pimpinan Wilayah Timur Indonesia, mengadakan jumpa pers di Asrama Nayak Jl. Sorong No.04 Abepura. Dalam jumpa pers tersebut, Ketua AMPTI DPW Timur Indonesia, Agus Alua mengatakan dalam bentrok antara masa dan aparat pada tanggal 16 Maret 2006 tidak hanya menewaskan aparat tetapi juga menewaskan seorang warga sipil, yaitu **Dany Hisage (22)**. Dany Hisage meninggal dunia setelah tertembak pada tanggal 17 Maret di Jl. Baru Kotaraja dalam penyisiran yang dilakukan aparat keamanan. AMPTI juga menghimbau kepada mahasiswa yang masih trauma agar kembali ke asrama atau bisa datang ke posko yang bertempat di Asrama Nayak.

Dalam jumpa pers di Asrama Nayak, AMPTI menyatakan 4 sikap, yaitu **pertama**, berdasarkan pangalaman dan penderitaan masyarakat dan mahasiswa Pegunungan Tengah dari kasus Dr. Tom Wanggai tahun 1996 sampai Abepura berdarah tahun 2000 dan terakhir kasus bentrok depan Uncen, masyarakat dan mahasiswa Pegunungan Tengah selalu dijadikan stigma (dikejar). Kami menilai Kapolda selalu mendiskriminasi masyarakat Papua khususnya masyarakat

Pegunungan Tengah. Kami berharap stigma separatis harus dihentikan dan harus memberi kebebasan di Tanah leluhur kami. **Kedua**, demi penegakan hukum di Provinsi Papua baik masyarakat sipil maupun aparat kepolisian, maka oknum-oknum Brimob yang sewenang-wenang melakukan penyisiran dan pengrusakan asrama juga penembakan terhadap warga sipil serta pembakaran ijazah milik mahasiswa Pegunungan Tengah harus ditangkap dan diproses secara hukum. **Ketiga**, demi keamanan terhadap masyarakat dan mahasiswa Pegunungan Tengah, maka AMPTI mendesak Kapolda Papua segera mengeluarkan pernyataan jaminan hidup secara tertulis kepada masyarakat dan mahasiswa Pegunungan Tengah, karena berdasarkan pengalaman kasus-kasus sebelumnya mereka selalu dibantai, diteror dan dibunuh di atas tanah leluhurnya. **Keempat**, Sebelum Kapolda menyikapi ketiga point di atas, maka pihak Polda tidak diperbolehkan melakukan perbaikan asrama-asrama yang rusak.

Kapolda Papua, Irjen Pol. Tommy Jacobus mengadakan pertemuan dengan Rektor Uncen, Bert Kambuaya dan perwakilan Mahasiswa di Aula Polda Papua. Tommy Jacobus mengatakan 17 tersangka yang ditangkap 6 diantaranya adalah mahasiswa tetapi bukan mahasiswa Uncen. Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk menjaga keamanan dan menghindari adanya demo, pihak Uncen akan membangun pos satpam dan pagar yang akan menutup kampus Uncen. Polda dan Uncen sepakat untuk meningkatkan kemitraan yang sudah terjalin dan saling membantu dalam melakukan kajian berbagai masalah yang terkait upaya menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di Papua.

Anggota Komnas HAM, Enny Soeprpto yang diutus untuk melihat dari dekat kasus 16 Maret mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menemukan kasus pelanggaran HAM, walaupun penyelidikan belum sampai final.

Koordinator Front Pepera PB, Arkilaus Baho di Jakarta mengatakan bahwa ada 3 mahasiswa yang meminta suaka politik di PNG yaitu **Cosmas Yual, Lydia dan Linda**. Hal ini juga diakui Kedutaan Besar RI di Port Moresby dan Konsulat RI di Vanimo.

28 Maret

Dubes Ad Interim untuk PNG, Pratito mengatakan bahwa berita adanya tiga mahasiswa yang meminta suaka politik ke PNG tidak benar. Hal ini juga dibenarkan oleh Polda Papua.

Rombongan Menkopolhukam, Widodo AS tiba di bandara Sentani pukul 11.30 WIT. Rombongan Widodo AS berkunjung ke Jayapura untuk bertemu dengan Ketua MRP, Wakil Ketua DPRP, Rektor Uncen dan perwakilan mahasiswa, serta Tokoh-tokoh Agama. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mengklarifikasi pernyataan kekecewaan para pemimpin agama sebelumnya.

Dalam pertemuan rombongan Menkopolhukam dengan pimpinan agama yang berlangsung secara tertutup di Gedung Negara Dok V Jayapura, pimpinan agama menyoroti permasalahan yang berhubungan dengan kasus penyisiran pasca 16 Maret 2006. Pimpinan agama juga meminta perhatian menteri dan pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah Freeport. Para pimpinan agama menegaskan bahwa mereka bersuara keras jangan dipandang atau dicap sebagai separatis, tetapi mereka hanya menjalankan tugasnya sebagai pembawa damai, sesuai dengan komitmen bersama untuk menciptakan Papua sebagai Tanah Damai.

Dalam jumpa pers yang digelar di Gedung Negara, Menkopolhukam, Widodo AS mengatakan berbagai masalah di Papua haruslah diolah melalui pendekatan damai, komunikatif dan meletakkan konsep penyelesaiannya pada pelaksanaan Otsus secara konsisten. Terkait kasus 16 Maret 2006, Widodo mengatakan Pemerintah dan aparat segera melakukan langkah-langkah hukum secara profesional dan proporsional melalui proses hukum yang akuntabel dan transparan, dalam arti yang bersalah itulah yang harus dikenakan sanksi hukuman. Pemerintah dan aparat menjamin keamanan dengan tidak ada lagi penyisiran serta sebaiknya bagi semua pelaku yang terlibat didalamnya segera menyerahkan diri agar bisa diproses secara hukum. Pemerintah Pusat tidak akan menggunakan pendekatan militer dalam menyelesaikan kasus di Papua, semua masalah akan diselesaikan melalui dialog dan pendekatan yang persuasif.

Seorang mahasiswa, Asyo Richard Iek (27) ditembak di depan rumahnya oleh orang yang tak dikenal dengan mengendarai sebuah motor bebek, saat korban sedang merayakan wisudanya bersama rekan-rekannya. Peluru bersarang di punggungnya hingga tembus di perut bagian kanan.

29 Maret

Kapolsekta Abepura, AKP Robert Suweni SH mengadakan jumpa pers di Polsekta Abepura, sehubungan dengan penembakan seorang mahasiswa di Buper Waena.

Tim Penyidik Polda Papua melakukan olah TKP terhadap kasus penembakan Asyo Richard Iek (27). Tim penyidikan dipimpin oleh Direskrim Polda Papua, AKBP Paulus Waterpauw dan ikut dalam tim tersebut Kasat Brimob Kombespol Robby Kaligis, Kabid Propam Kombespol Anang Sudiono, Kabid Humas Polda Kombespol Kartono W dan Kapolresta Jayapura, AKBP Taufik Pribadi. Kapolresta Jayapura mengatakan setelah mengadakan penyidikan, proyektil yang telah dikeluarkan dari tubuh korban akan dikirim ke Puslabfor Mabes Polri untuk dilakukan pengujian tentang spesifikasi dari jenis dan senjata apa.

31 Maret

Kapolda Papua, Irjen Pol. Tommy Jacobus, mengatakan dari hasil pengujian proyektil di Puslabfor Bareskrim Mabes Polri, diperoleh keterangan bahwa proyektil yang bersarang di tubuh Asyo Iek adalah jenis kaliber 38 mm yang berasal dari jenis pistol Revolver merek Smith atau Wilson atau Pindad. Oleh karena itu, pihak Polda Papua telah mengumpulkan beberapa senjata jenis Revolver untuk diambil sampelnya kemudian diteliti. Menurut Kapolda, apabila yang melakukan penembakan itu adalah polisi maka akan dipecat.

Keadaan Asyo Iek sudah semakin membaik, namun dokter menyarankan agar ia menjalani puasa selama 1 minggu. Hal ini dilakukan agar proses penyembuhan luka operasi pada perutnya cepat sembuh. Ibu korban, Ny. Estevina mengatakan bahwa keluarga meminta jaminan keamanan sehingga masalah ini dapat diusut tuntas. Hal ini dikatakan karena salah satu saksi kunci, yakni Erik Urior (ipar Arsyo) dikabarkan hilang. Ia dijemput oleh orang-orang yang tidak dikenal pada hari Rabu pukul 21.00 WIT saat sedang menjaga Arsyo di RSDH.

#### **A.4. Catatan mengenai kebebasan warga**

4 Januari

Danrem 172/PWY Kolonel Inf. Asis Wanto mengatakan, dalam rangka mengantisipasi munculnya gangguan-gangguan kelompok Gerakan Separatis Papua (GSP) menjelang pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur



Papua periode 2005-2010, pihak TNI akan mengintensifikan pengamanan di daerah-daerah yang masih dianggap rawan gangguan, terutama di wilayah perbatasan.

Oknum TNI Praka Rosadi yang terlibat dalam kasus penembakan warga sipil Asiki, divonis 1 tahun penjara karena turut menganiaya korban, resmi naik banding. Surat pengajuan banding Praka Rosadi resmi dilayangkan ke Pengadilan Militer III-9 Jayapura.

12 Januari

12 tersangka penembakan 2 warga Amerika masing – masing berinisial YK(21) warga Gang Cemara Kwamki Baru, Markus Kalbagne (39) warga Kwamki Lama Jalur III, Viktus Wamang (58) warga Kwamki Baru, Dani Mani (33) warga SP XII Jalur II Timika, Hardi Tsugama (32) Jalan Kangguru Kwamki Lama, Agustinus Anggaibak (15) warga Kwamki Baru, Germanus Magal (56) warga Kwamki Baru, Johannes Kasimoy (51) Jalan Maleo Kwamki Baru, EO (21) warga Jalan Kwamki Baru, Isak (*ondawame*) Onawati (53) warga Kwamki Baru, Felix Dagme (27) Jayanti dekat Lapas SP VI Timika, dan Antonius Wamang (53) Jalan Baru Kwamki Baru dekat BLK diitahan di Polda Papua.

13 Januari

Setelah melalui pemeriksaan secara intensif, akhirnya 8 dari 12 orang yang ditangkap Polri akibat diduga terlibat penembakan terhadap 2 warga AS dan 1 WNI di Timika (Papua), ditetapkan sebagai tersangka. Mereka terancam pidana maksimal hukuman mati. Kedelapan tersangka tersebut masing – masing Antonius Wamang (53), Agustinus Anggaibak (15), Johannes Kasimony (51), Ishak (*ondawame*) Onawati (53), Yulianus Diegme, Hardi Tsugama, Darius Iwak dan Felix Dagme. “Delapan orang itu diancam melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana,” ujar Wakadif Humas Polri Brigjen Polisi Anton Bahcrul Alam di Jakarta. Sementara itu 4 orang yang dilepas adalah Markus Kalbagne, Germanus Magal, Viktus Wamang dan Dani Mani.

14 Januari

Delapan tersangka “kasus penembakan di Mile 62-63 Timika “ masing-masing Antonius Wamang, Agustinus Anggaibak, Johannes Kasimony, Ishak (*ondawame*) Onawati, Yulianus Deigme, Hardi Tsugama, Darius Iwak dan Felix Dagme dievakuasi ke Jakarta. Hal ini dibenarkan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Drs. Kartono Wangsadasastra.

Massa yang tergabung dalam Front Pepera PB (Papua Barat) memblokir jalan Raya Abepura – Sentani tepatnya di depan kampus Uncen Abepura, terkait dengan pemindahan 8 orang tersangka “kasus Timika ke Jakarta.

Keluarga para tersangka antara lain Mama Yosepa Alomang, Paula Makabori dan Ketua Advokasi tersangka Aloysius Renwarin SH, mengatakan keberangkatan 8 tersangka itu dilakukan secara diam-diam tanpa ada pemberitahuan resmi terhadap keluarga tersangka.

Kepala Kejaksaan Tinggi Merauke, Eddy Soetyono, SH menegaskan tidak akan pernah menanggapi surat yang dilayangkan DPR RI ke Kejaksaan untuk meminta menghentikan segala proses hukum terhadap para anggota DPRD Merauke periode 1999 – 2004 berkaitan dengan penggunaan dana penunjang tahun 2002.

16 Januari

Ketua Tim Kuasa Hukum para tersangka kasus penembakan mile 63 Timika, Pieter Ell, SH mengatakan akan mempraperadilan Polda Papua karena dianggap telah bertindak nonprosedural dalam melakukan penangkapan terhadap 12 warga sipil, serta mensomasi PT. Freeport Indonesia dan PT. Garuda Indonesia. Kedua perusahaan itu dinilai memberikan kemudahan terhadap pihak kepolisian melakukan penangkapan dan membawa tersangka dari Timika ke Polda Papua di Jayapura.

17 Januari

Kapolda Papua Irjen Polisi Drs. Tommy J. Jacobus mengatakan Polda Papua tidak keberatan jika mau diperadilan oleh tim pengacara "Kasus Timika" karena apa yang telah dilakukan terkait dengan "kasus Timika" sudah sesuai dengan prosedur hukum.

18 Januari

Masa Front Pepera Papua Barat dan Koalisi Rakyat Papua melakukan aksi demo ke Gedung DPRP soal "kasus Timika". Namun mereka gagal menembus masuk ke halaman DPRP karena tidak ada seorangpun anggota DPRP yang mau menerima kehadiran para pendemo.

Di Wasior kabupaten Wondama, dua oknum anggota Brimob Polda Papua berinisial Briptu FM dan Briptu NS menganiaya dan mengeroyok seorang guru. Peristiwa ini bermula ketika korban memukul seorang siswa yang masih berhubungan keluarga dengan pelaku, karena siswa tersebut telambat masuk sekolah setelah liburan Natal dan Tahun Baru.

Sebanyak 24 Atase Pertahanan (Athn) Militer dari 19 Negara Sahabat melakukan kunjungan ke Provinsi Papua, khusus ke Jayapura dan Wamena. Ke 24 itu, diantaranya Kapten Jhon Dudluey Atase Laut dan Kapten Tony Jones Atase Udara (Australia), Letkol Haji Awang Ahmad (Brunei), Letkol Jiang Jipe (Cina), Kolonel Rainer Nuecken (Jerman), Kapten Issuya Toyoma (Jepang), Kolonel Lee Yong Kil (Korea), Kolonel Kenkeo Pholsena (Laos), Khin Mounng Soe (Myanmar), Kolonel Charles Koll (Belanda), Kolonel Reginald Mclod (New Zealand), Kolonel Athan Alfredo Peralta (Philipna), Kapten Vitaly G (Rusia), Kolonel Chio Choo Hong (Singapura), Kolonel Peter Hediger (Switzerland), Kolonel Wichai Churced (Thailand), Tran Ngoe Dan (Vietnam), Kolonel Sam Jarvis (Inggris), Mayor Tim Nolin (AS), Kapten Fransesco Tedeschi (Italia) dan Kapten Joe Ruivo (Portugal).

Terkait dengan sikap dewan yang tidak mau menerima para pendemo Ketua Penasehat Hukum 8 tersangka, Pieter Ell,SH mengatakan, tindakan yang dilakukan oleh anggota DPRP terlalu berlebihan dan tidak menunjukkan sikap keberpihakan kepada masyarakat.

19 Januari 2006

43 warga Papua dikabarkan mencari suaka di Australia. Asosiasi Papua Barat (WPA) Australia – mengatakan, diantara 40 warga itu termasuk sejumlah aktivis OPM dan empat anak-anak. Jubir AWPA, Louise Byrne, mengungkapkan, para pencari suaka itu dilaporkan melarikan diri ke Australia untuk menghindari kejaran pemerintah *Australia*.

Sementara itu Pejabat Gubernur Provinsi Papua Dr. Sodjuangan Situmorang,M.Si, mengatakan bahwa sampai saat ini belum mendapat laporan tentang 43 warga Papua yang mencari suaka di negara Australia. Namun kalau informasi itu benar, sangat mengherankan sekaligus sangat disayangkan, karena

di Papua saat ini kondisinya sangat kondusif. Apalagi pemerintah tidak pernah melakukan tekanan kepada warganya.

20 Januari

Di Distrik Waghete Kabupaten Paniai aparat TNI melakukan penembakan kepada warga sipil sekitar pukul 07.30 WIT, sedikitnya satu orang tewas dan dua lainnya luka-luka. Nama – nama korban tersebut adalah :

1. Moses Douw (23) tewas.
2. Yonike Kotouki (18) luka pada paha kanan.
3. Petrus Pekey (22) luka dirusuk kanan.

Peristiwa penembakan ini diduga berawal dari masalah pengurusan surat penagihan jalan.

21 Januari

Tiga kuasa hukum kasus penembakan di Timika masing – masing Iwan Niode, SH, Rahman Ramli, SH, dan Sihar Tobing, SH mendaftarkan Polda Papua soal kasus Timika ke Pengadilan Negeri Jayapura dengan nomor register No.1/Per.Prapid/2006/PN.Jpr.

23 Januari

Demo damai yang dilakukan ratusan massa yang tergabung dalam Front Rakyat Papua Anti Militerisme (FR PAM) ke DPRP nyaris ricuh; tiga mobil dirusak massa. Kedatangan mereka ke DPRP itu guna menyampaikan aspirasi terkait kasus penembakan di Waghete, Kabupaten Paniai, yang meyebabkan 1 orang tewas dan 2 orang lainnya luka-luka. Dalam orasinya maupun aspirasi yang terpampang dalam spanduk yang dibawa, mereka menuntut agar “seluruh pasukan TNI di Papua ditarik, pecat pelaku penembakan dan pecat Pangdam XVII /Trikora “.

Bupati Merauke Drs. Johannes Gluba Gebze menyatakan 43 warga Papua yang meminta suaka di negara Australia karena alasan keamanan perlu dipertanyakan, sebab secara umum di Papua, khususnya di Merauke saat ini sangat aman dan kondusif.

24 Januari

Anggota Komisi A DPRP Henny Arobaya mengatakan untuk menindaklanjuti aksi demo massa Front Rakyat Papua Anti Militerisme ke DPRP, DPRP melalui Komisi A membentuk tim investigasi kasus Waghete. Tim ini terdiri dari dua tim. Tim satu akan melakukan investigasi langsung ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Waghete, serta Tim dua ditugasi berkoordinasi langsung dengan Panglima TNI di Jakarta.

25 Januari

Pelaku penembakan terhadap 3 warga sipil di kampung Waghete, Distrik Tigi Kabupaten Paniai (Papua) adalah Letda Inf Situmeang, Komandan Pleton (Danton) Timsus Yonif 753 Arga Vira Tama. Dia diduga melakukan penembakan terhadap Yonike Kotouki (18) dan Petrus Pekey (22). Bripda Ronald Isac Tumena dari Polri sebagai anggota Polsek Waghete, dia diduga melakukan penembakan terhadap Moses Douw yang akhirnya tewas (meninggal dunia).

Tewasnya Moses Douw dalam peristiwa penembakan di Kampung Waghete, Paniai melahirkan 4 kesepakatan damai antara pihak masyarakat, Muspida dan pihak TNI, yaitu :

1. Tidak akan ada lagi letusan peluru terhadap masyarakat sipil.
2. Pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat tidak lagi menggunakan senjata tetapi dialog.

3. Akan menghormati hak-hak dasar masyarakat Papua.
4. Bertekad membangun Papua, atas dasar Papua sebagai bagian dari Tanah air Indonesia dengan tetap memperhatikan amanat UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

29 Januari 2006

Warga Sentani (Ibu Kota Kabupaten Jayapura ) dikejutkan dengan berkibarnya Bendera Bintang Kejora di tiang bendera kantor Distrik Sentani. Kejadian ini segera diketahui aparat sehingga bendera tersebut hanya berkibar 11 menit. Pelaku pengibaran bendera, Yakob Ambo Mamori (25) yang sempat ditahan pihak Kepolisian Polres Jayapura, mengaku ia hanya disuruh orang. Namun pihak Kepolisian tetap melakukan penyelidikan. Hal ini dibenarkan Kapolres Jayapura AKBP Jacob Kalembang BA.

30 Januari 2006

Pengibar bendera Bintang Kejora 28 Januari 2006 di Kantor Distrik Sentani, Yakob Ambo Mamori (25) diperiksa di Rumah Sakit Jiwa Abepura. Hal ini disebabkan karena selama menjalani pemeriksaan di Polres Jayapura, keterangan yang diberikan selalu berubah-ubah sehingga Polisi menduga tersangka mengalami kelainan jiwa.

2 Februari 2006

Danrem 172/PWY, Kolonel Inf Asis Wanto mengungkapkan sebanyak 198 anggota Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) yang selama ini beroperasi di daerah Pantai Timur dan Pantai Barat Kabupaten Sarmi menyerahkan diri ke pihak TNI melalui Kompi Rajawali 372 yang dipimpin oleh Kapten Inf. Yusan dan Kasie Intel korem 172/PWY Letkol Kav. Napoleon.

5 Februari 2006

Perayaan HUT Pekabaran Injil di Tanah Papua yang ke 151 diperingati di seluruh Tanah Papua dengan berbagai bentuk kegiatan dan perayaan.

Di Jayapura, hari pekabaran injil diperingati dengan doa dan pujian yang dilangsungkan di GOR Cendrawasih Jayapura, dihadiri oleh ribuan umat dan warga. Perayaan ini dihadiri juga oleh Gubernur Papua, Dr. Sodjuangan Situmorang beserta unsur Muspida Papua, anggota DPD Papua, Ketua MRP dan beberapa pasangan kandidat Gubernur-wakil Gubernur Papua seperti Konstan Karma, Bas Suebu – Hese gem, dan SP Inauri, sedangkan pasangan lainnya tampak tidak hadir. Perayaan HUT Pekabaran Injil 151 ini bertemakan Transformasi bagi Papua.

12 Februari

Wakil Bupati Bovendigoel, Marselinus Yamkondo mengatakan Pemerintah Kabupaten Bovendigoel akan melakukan repatriasi (pemulangan) terhadap kurang lebih 8000 warganya yang telah lama tinggal di PNG, yang selama ini berstatus sebagai pelintas batas.

21 Februari

100 orang yang tergabung dalam Forum Komunikasi pembela Hak para Pejuang mendatangi Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua. Mereka membawa tumpukan berkas-berkas para pejuang yang sudah didaftarkan dan diperkirakan mencapai 4 ribuan lebih pejuang. Mereka mempertanyakan janji gubernur untuk memperhatikan hak-hak para pejuang di Tanah Papua. Pdt. Yulianus Worabaay, STh selaku koordinator pendemo mengatakan mereka

memberikan berkas-berkas para pejuang kepada Gubernur Provinsi Papua, kepala Kesbang Provinsi Papua dan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua.

### 23 Februari

Di Tembagapura, dalam jumpa persnya Kapolda Papua Irjen Polisi Tommy Yakobus mengatakan pihaknya sudah melakukan tatap muka dengan warga pendulang yang memalang jalan di Mile 72, Ridge Camp Tembagapura. Upaya untuk meminta palang dibuka tidak berhasil, namun pertemuan akan kembali dilakukan pada hari Jumat, 24 Februari 2006. Jumpa pers yang berlangsung di Guest House Mile 68 dihadiri oleh Bupati Mimika Klemen Tinal, SE, Pangdam XVII Trikora Mayjen George Toisutta dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Adrianto Machribie, Tokoh Masyarakat Amugme dan pejabat militer dan kepolisian setempat.

Sementara itu di Jakarta Jajaran Satuan Reserse Mobile (Resmob) Polda Metro Jaya menjadikan 10 orang mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Papua sebagai tersangka penyerbuan dan pengrusakan kantor PT Freeport Indonesia yang terletak di jalan Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan. Mereka dikenai pasal 170 KUHP tentang perusakan. Kesepuluh mahasiswa itu masing-masing Martin PB (28), Yan Matuan(28), Ales (24), N Danny (24), Itius Kobaya (24), Betenus Magayang (21), Dedy Pagaraya (22), Paul Wollow (26), Gomes Kobaya (23), Paul Wollow (26), Gomes Kobaya (23), Deflan Kogoya (20). Mereka ditangkap polisi dari kantor Kontras di Jalan Mendut 10 Jakarta Pusat saat sedang meminta perlindungan.

Di Jayapura, Front Rakyat Papua Anti Militarisme (FRPAM) melakukan aksi demo ke DPRP. Aksi yang dipimpin oleh Jefri Pagawak tersebut berlangsung damai meskipun sempat terjadi ketegangan dengan aparat keamanan ketika permintaan mereka untuk bertemu dengan anggota Komisi A DPRP tidak dipenuhi dengan alasan anggota komisi A sedang sibuk mengikuti kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur John Ibo dan Paskalis Kossy.

Di Biak, Letda Inf Arif Budi Situmeang, terdakwa kasus penembakan Waghete Kabupaten Paniai, dituntut 5 bulan penjara oleh Oditur Militer yang terdiri dari Mayor CHK P Nainggolan dan Kapten Sus Aries W, SH pada sidang lanjutan di Aula Makorem Biak. Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim Mayor CHK Sutrisno, SH dengan anggota Mayor CHK Suryadi dan Mayor CHK Gatot.

### 25 Februari

Massa membuka blokade di Ridge Camp Mile 72 pada pukul 17.30 WIT, setelah melalui perundingan dan negosiasi pada tanggal 24 Februari malam dan 25 Februari pagi. Pembukaan blokir jalan ditandai dengan pembacaan 9 butir tuntutan, penyerahan peluru (amunisi), pemukulan papan sebagai tanda dibukanya palang dan bakar batu (makan bersama), dan tarian perang yang kemudian diakhiri dengan salam-salaman. Pembukaan palang tersebut dihadiri oleh para negosiator, yaitu Kapolda Papua Irjen Polisi Tommy Jacobus, Pangdam XVII/Trikora Mayjen TNI George Toisutta, Danrem PVT Sorong Kol TNI Christian Sebua, Bupati Mimika Klemen Tinal SE, Kapolres Mimika, AKBP Drs. Dedy Junaedy, Tokoh Masyarakat Tom Beanal dan Drs. Yoppi Kilangin, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, Pdt. Abdel Tinal S.Th, Presiden Direktur PTFI August Kafiari, Presiden Komisaris PTFI Andrianto Mahcribi dan sejumlah tokoh petinggi PTFI. Hadir juga dalam pembukaan blokir tersebut ratusan para pendulang.

### 27 Februari

Solidaritas Rakyat Papua (SRP) untuk Kasus Timika yang dikoordinir oleh Markus Haluk dan Selfius Bobi melakukan unjuk rasa di Kantor DPRP. Sebelumnya, massa yang berjumlah 500an orang itu berkumpul di lingkungan Kampus UNCEN Abepura dan kemudian melakukan *long march* dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 20 km menuju Kantor DPRP yang terletak di jantung Kota Jayapura. Mereka meminta PT. Freeport Indonesia segera ditutup karena dinilai tidak dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat Papua. Mereka juga meminta DPRP untuk segera menggelar sidang istimewa menyangkut kasus ini.

Di Jakarta, ratusan anggota Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Front Pepera–PB) melakukan aksi demo di depan Kantor PT Freeport Indonesia di Gedung Plaza 89, Jln. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan yang mengakibatkan kantor tersebut ditutup. Mereka meminta agar Kantor PT Freeport Indonesia baik di Jakarta maupun di Timika agar segera ditutup. ‘Kita sudah lama menderita, Freeport telah mencuri kekayaan di Papua Barat. Untuk itu kami rakyat Papua bersumpah berbahasa satu, tutup Freeport!’ tegas Arkilaus Baho, koordinator aksi.

#### 1 Maret

Di Timika, Ketua DPR RI Agung Laksono meminta semua pihak baik pemerintah, PT Freeport, Pemerintah Daerah, aparat keamanan dan masyarakat khususnya para pendulang emas harus dapat menahan diri sehingga dapat berunding dan bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik. Segala sesuatu harus ditindaklanjuti dan tidak didiamkan begitu saja, sementara itu langkah pemblokiran dan lainnya harus segera ditinggalkan. Agung Laksono juga mengatakan bahwa PT Freeport merupakan salah satu investasi nasional atau aset bangsa Indonesia meskipun telah dieksplotir oleh perusahaan asing, tetapi tetap untuk kepentingan bangsa Indonesia. “Lebih baik investasi berjalan terus, yang salah diperbaiki dan apa-apa yang kurang tepat, sebab investasi ini tidak salah, tetapi jika ada masalah-masalah yang timbul agar segera ditindaklanjuti,” demikian kata Agung Laksono.

#### 3 Maret

Kapolda Papua Irjen Pol Drs Tommy T. Jacobus melantik AKBP Drs.Taufik Pribadi, M.Si menjadi Kapolresta Jayapura menggantikan AKBP Drs.Paulus Waterpauw yang kini menduduki jabatan baru sebagai Direktur Reskrim Polda Papua.

Desakan sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa untuk menutup PT. Freeport Indonesia, dinilai Ketua MPR RI, DR.H.M.Hidayat Nur Wahid sebagai suatu hal yang wajar. Ia mengatakan kalau desakan masyarakat itu perlu disingkapi secara bijaksana oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait demi kesejahteraan masyarakat yang ada disekitarnya secara khusus, dan masyarakat Papua pada umumnya.

#### 6 Maret

Menyikapi berbagai aksi demo dari masyarakat dan mahasiswa terhadap kehadiran PT. Freeport, MRP menggelar rapat pleno untuk membentuk tim pansus MRP guna menangani masalah PT. Freeport. Terpilih sebagai ketua Tim Pansus, Ifi Kogoya,S.Pd dan beranggotakan 18 orang dari anggota MRP.

#### 12 Maret

Komandan Korem 173/PVB Kolonel Inf. Erfi Triassunu membenarkan, Mabes TNI AD rencana membangun pos pengamanan di pulau Mapi Kabupaten Biak.

14 Maret

Meski Papua sudah dimekarkan menjadi 2 Provinsi, TNI AD tidak akan menambah Kodam baru di sana. Keputusan ini disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral TNI Joko Santoso saat menjawab pertanyaan wartawan di Graha Yudha Wastu Pramuka Bandung. Menurutnya tidak semua pengembangan daerah dan wilayah pemerintahan diikuti dengan penambahan Kodam. Kodam akan baru dibangun jika ada persepsi ancaman keamanan. Oleh karena itu kata Joko di Papua saat ini hanya ada satu Kodam, yaitu Kodam XVII/Trikora.

Sekelompok massa (sekitar 50 orang) yang sejak tanggal 27 Februari 2006 mengadakan aksi pemalangan di chek point I Mile 28, sekitar pukul 16.00 WIT bergerak ke Hotel Sheraton Timika dan melempari hotel tersebut dengan batu, panah dan katapel, 20 mobil dirusak dan sebuah mobil dibakar. Aksi pemalangan ini meluas dan suara MRP dan DPRP tak digubris massa.

Pelaku pengibaran Bendera Bintang Kejora di halaman kantor Distrik Sentani 28 Januari, Yacob Ambo Mamori (25) akhirnya dinyatakan tidak waras. Surat keterangan tidak waras ini dikeluarkan Rumah sakit Jiwa (RSJ) Abepura, yang diterima Polres Jayapura. Hal ini dibenarkan Kapolres Jayapura AKBP Jacob Kalembang BA.

## **B. SITUASI HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA**

### **B.1. Kesejahteraan**

3 Januari

Kepala Badan Promosi dan Investigasi Daerah (BPID) Provinsi Papua, Drs.H.M.Alhamid mengatakan, salah satu penyebab terkendalanya penanaman investasi di Papua disebabkan karena banyaknya soal tuntutan masalah Hak Ulayat oleh masyarakat.

11 Januari

Kepala BPS Provinsi Papua Ir. A. Djarot Soetanto,MM mengungkapkan sebagian masyarakat di Pedalaman Papua belum menerima dana Subsidi Langsung Tunai (SLT). Daerah atau kota yang belum menerima SLT itu adalah Boven Digul, Mappi, Asmat, Pegunungan Bintang, Tolikara, Sarmi, Keerom dan Puncak Jaya.

16 Januari 2006

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Nafri kembali dipalang warga kampung Nafri. Pemicu pemalangan ini disinyalir karena proses penyelesaian tuntutan warga Nafri terhadap pembayaran tanah lokasi tersebut belum tuntas.

24 Januari

Lurah Waena, Johannes Ohee, SE mengatakan, masyarakat miskin yang ada di wilayahnya berjumlah 2039 orang, sementara yang memperoleh kuota beras miskin (Raskin) hanya 447 orang saja.

29 Januari 2006

Majelis Rakyat Papua (MRP) minta dalam perekrutan CPNS baik dinas pemerintahan kota/kabupaten/provinsi di lingkungan Provinsi Papua harus memprioritaskan putra asli Papua dengan komposisi 80:20.

Kepala Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura, Sem Stenly Meraudje S.Pak mengatakan, sekitar 100 warga miskin di wilayah pemerintahannya belum menerima kartu Askes miskin.

1 Februari 2006

Kabag kepegawaian Kabupaten Keerom Drs. Adrianus Samonsabra mengatakan Pemerintah Kabupaten Keerom mulai membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama 4 hari sampai dengan tanggal 4 Februari 2006.

8 Februari 2006

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jayapura, M.H.T Sagala, SH, MM mengatakan Kuota beras miskin (Raskin) bagi masyarakat Kota Jayapura pada anggaran 2006 adalah sebanyak 2.225 ton. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 40 % dari kuota pada tahun 2005 yakni 2.635 ton.

Bantuan dana kepada para pejuang Trikora, pejuang Pepera, Gerakan Merah Putih Provinsi Papua yang bersumber dari APBD 2005 mulai disalurkan lewat BRI. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua M.A Pogolamun, BSW mengatakan bantuan tersebut diberikan bagi 1000 orang pejuang yang sudah mendaftarkan dan menyerahkan data lengkap ke Dinas Sosial Provinsi Papua. Dana yang dianggarkan untuk 1000 pejuang adalah sebesar Rp. 5 Milyar.

11 Februari

Kapolresta Jayapura AKBP Drs. Papulus Waterpauw mengundang para Tokoh Masyarakat dan LSM untuk melakukan dengar pendapat di Aula Kantor Walikota Jayapura. Hal ini dimaksudkan untuk meminta pendapat dari para tokoh tersebut tentang komitmennya menangani kasus-kasus orang mabuk di Kota Jayapura.

14 Februari

Ketua Tim Interdep Penanganan Rawan Pangan Kabupaten Yahukimo, Rizal Mallarangeng di Jakarta mengatakan ada empat kabupaten lainnya selain Yahukimo yaitu Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Pegunungan Bintang yang memiliki masalah serupa dengan Yahukimo. Dikatakannya, "Keempat kabupaten tersebut berada di topografi ekstrim dan dengan kondisi penduduk seperti zaman batu". Tidak ada sarana infrastruktur yang memadai karena itu Rizal meminta pemerintah melakukan penanganan yang sama seperti Yahukimo terhadap empat kabupaten ini.

27 Februari 2006

Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban (Tranrib) Terry Van de Levin dalam dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Kota Jayapura mengatakan pada anggaran 2006 akan melaksanakan penertiban para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sepanjang jalan raya atau trotoar. Penertiban ini mengacu pada Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2000 tentang Kewenangan dan Tugas-tugas Dinas Tranrib dan Perda No. 15 Tahun 2000 tentang Ketertiban di semua wilayah Kota Jayapura. Dikatakan pihaknya juga akan menggunakan pendekatan kemanusiaan.

28 Februari 2006

Pelaksanaan ujian akademik seleksi CPNS se-Papua dilaksanakan secara serentak di semua wilayah Provinsi Papua. Tercatat 58.000 orang se-Provinsi Papua akan memperebutkan 8.056 formasi yang tersedia mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten/kota.



1 Maret 2006

Sekda Kota Jayapura Drs. TH. Pasaribu, M.Si menegaskan, setiap tempat usaha yang tidak memiliki tiga jenis surat ijin yakni surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), dan Surat Ijin Usaha (SIU) dianggap illegal. Jenis usaha apapun, apakah itu kios, toko, rumah makan jika tidak memiliki ketiga macam surat ijin tersebut dari Pemerintah Kota Jayapura maka dianggap illegal. Untuk itu dalam waktu dekat pihaknya akan menginstruksikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jayapura dan Dinas ketertiban (Trantib) Kota Jayapura untuk segera melakukan penertiban.

2 Maret

DPR Papua mendukung penghapusan Bantuan Langsung Tunai bagi rakyat miskin oleh Pemerintah Pusat dan menggantikannya dengan program pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikatakan anggota komisi B DPR Papua, Drs. Paulus Sumino, MM. Pihaknya menilai banyak penyimpangan terjadi dalam penyaluran BLT di lapangan.

6 Maret

Sidang Sinode GKI di Tanah Papua ke-15 yang berlangsung sejak 26 Februari – 6 Maret 2006 di Jayawijaya, berhasil memilih badan pengurus baru BPAM Sinode GKI di Tanah Papua periode 2006-2011. Ketua sinode terpilih Pdt. Corinus Berotabui, M.Th menggantikan Pdt. Hermann Saud, M.Th.

16 Maret

Seorang oknum aparat TNI bernama Kapten Muhammad Dul (37), anggota Yonif 756/VWY di Jayawijaya yang kini bertugas di Denma Makodam XVII/Trikora, divonis 3 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan dalam persidangan di Pengadilan Tinggi Militer III-19 Jayapura. Dirinya tertangkap tangan membawa minuman keras (Miras) saat naik pesawat Hercules milik TNI-AU.

20 Maret

Personel gabungan dari satuan Polair Polda Papua, Polresta Jayapura dan aparat Polsekta KP3 Laut melakukan *sweeping* terhadap penumpang KM Ngapulu saat merapat di dermaga Jayapura pada pukul 14.20 WIT. Dalam operasi gabungan itu, disita 14 senjata tajam dan 21 botol minuman keras Cap Tikus (CT). Hal ini dikatakan Kapolsekta KP3 laut AKP Adolf S. Marsyom

22 Maret

Masih banyaknya para pedagang kaki lima (PKL) yang tetap berjualan di atas trotoar dan disejumlah areal yang dianggap mengganggu ketertiban umum, disikapi serius Walikota Jayapura, Drs. MR. Kambu, M.Si. Dikatakan, jika para PKL tidak mau dipindah secara sukarela, maka akan dipindah secara paksa.

23 Maret

Kepala BPS Provinsi Papua, JA Djarot Sutanto mengatakan di Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat tercatat terdapat 596.893 keluarga rumah tangga miskin (RTM).

25 Maret

Aparat Kepolisian Polres Merauke dalam operasinya di kota Merauke, menyita ratusan botol minuman keras. Minuman keras tersebut merupakan milik dari lima pengusaha kios yang tidak memiliki ijin menjual miras. Mereka adalah EN (30), PL (44), ET (25), AK (50) dan YN (33). Hal ini dibenarkan Wakapolres Merauke AKBP Kompol Ronald Simamora.

27 Maret

Masyarakat Adat Wadibu dengan tegas menolak rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudra yang akan dibangun oleh Pemkab Biak Numfor. Penolakan rencana pembangunan tersebut di sampaikan oleh Ketua Forum Masyarakat Adat Wadibu di Jayapura, Rudolf Morin SE.MM. Mereka menilai pembangunan pelabuhan tersebut akan mengganggu potensi sumberdaya laut diwilayah tersebut.

## **B.2. Hak atas kesehatan: wabah HIV/AIDS**

3 Januari

Deputi KB dan Kesehatan Reproduksi Badan Keluarga dan Kesejahteraan Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Drs. Siswanto Agus Wilopo, SU,M.Sc,Scd mengatakan, kasus HIV/AIDS di Papua dikhawatirkan akan menyerupai kasus yang terjadi di Uganda dan Afrika Selatan jika tidak ditangani secara baik.

6 Januari

Kepala Dinkes Biak Numfor Ruslan S,Sos, S.KM mengatakan Jumlah kasus HIV/AIDS di Kabupaten Biak Numfor bertambah menjadi 140 kasus (44 HIV, 96 AIDS dan 61 meninggal dunia) yang dari 133 kasus pada 31 November 2005.

11 Januari

Ketua Harian Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua (KPAPP) drh. Constant Karma mengatakan, dari data yang berhasil dikumpulkan Dinas Kesehatan Provinsi Papua per 31 Desember 2005, ditemukan 2163 kasus HIV/AIDS, serta 289 orang sudah meninggal dunia.

12 Januari

Puskesmas pembantu (Pustu) Kampung Enggros sejak didirikan 8 tahun lalu hingga kini belum beroperasi karena tidak ada petugas kesehatan yang bertugas di sana.

21 Januari

Kepala Cabang PT Askes Cabang Jayapura, Dra. Iriani Sandinganen,MM mengungkapkan, sekitar 22.000 atau sekitar 50 persen dari 45.407 kartu Askes miskin yang diserahkan ke distrik, kelurahan/kampung pada 2005 lalu, kini belum sampai ke masyarakat. Ironisnya kartu itu diduga diperjualbelikan dengan harga bervariasi.

25 Januari

Ketua DPD Persagi Provinsi Papua, Ir Nuzul Bakri, SKM mengatakan, sampai saat ini masih terdapat 50 persen rumah tangga mengkonsumsi bahan pangan kurang gizi. Disamping itu pula masih banyak dijumpai anak Balita yang menderita kurang gizi dan gizi buruk.

29 Januari

Kasubdin P2M Dinkes Kabupaten Merauke dr. Nevil Muskita dalam evaluasi penyebaran IMS/HIV/AIDS yang berlangsung di KPAD Merauke mengungkapkan hasil evaluasi tahun 2005 menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan pemakaian kondom.

6 Februari

Kasubdin Pengendalian Penyakit Menular Kabupaten Asmat , Richard Mirino, SKM membenarkan adanya wabah penyakit campak yang menyerang warga di Asmat. Kasus campak ini menyerang tiga kampung, masing-masing Kampung

Ayam 51 orang terinfeksi dan 10 meninggal, Kampung Paluar 1 orang terinfeksi, dan Warse 9 orang terinfeksi dan 12 orang dilaporkan meninggal.

7 Februari

Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Obeth Rumbiak mengatakan bahwa kebutuhan tenaga medis di Kabupaten Biak Numfor masih kurang. Dari 15 Puskesmas yang ada di Kabupaten Biak Numfor, ada sekitar 9 Puskesmas pembantu (Pustu) yang belum memiliki tenaga medis. Dari 41 Pustu yang ada, baru 27 Pustu yang terisi tenaga medis meskipun pada penerimaan PNS formasi tahun 2006 Pemkab Biak Numfor mendapat jatah 157 formasi untuk tenaga teknis kesehatan.

27 Februari

Pekan Imunisasi Nasional (PIN) digelar secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Di Distrik Sentani, pos PIN dan Puskesmas Sentani dipenuhi dengan antrian warga yang mengantarkan anak-anaknya untuk menerima vaksin polio. Kepala Puskesmas Sentani, dr. Risamasu mengatakan target pemberian vaksin polio untuk wilayah Sentani sebanyak 5.953 balita. Jumlah ini meningkat dari tahun 2005 yaitu 4.392 karena ada kenaikan target sebanyak 1.561 balita tahun 2006.

Sementara itu kepala Dinas Provinsi Papua, dr. Tigor Silaban dalam laporannya pada acara PIN putaran IV tingkat Provinsi Papua yang dipusatkan di kompleks Perumahan Dosen Uncen Waena mengatakan bahwa cakupan imunisasi polio di Papua pada PIN putaran I Agustus 2005 sekitar 78,08 %, PIN Putaran II sekitar 88,63 % sedangkan putaran III sekitar 59,66 %. Menurutnya, cakupan ini masih sangat jauh dari hasil cakupan Nasional yaitu 90% sehingga membuat Papua masuk dalam daftar daerah yang rawan terhadap penyakit polio.

1 Maret

Adanya keluhan dari masyarakat Yongsu Spari, Distrik Depapre tentang terbatasnya tenaga medis di Desanya, ditanggapi Kepala Dinas Kabuapten Jayapura, dr Esterlina Ayomi. Dikatakan belum di semua kampung bisa ditempatkan bidan akibat tenaga yang terbatas.

7 Maret

Rencana Pemerintah Provinsi Papua untuk merekrut (mengkontrak) sekitar 100 tenaga dokter pada anggaran 2006 ini dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah pedalaman disambut positif Komisi E DPR Papua.

16 Maret

Kejadian Luar Biasa (KLB) terjadi di Kabupaten Jayawijaya, tepatnya di Distrik Kurulu dan Distrik Musatfak sejak pertengahan Februari menyebabkan korban jiwa. Dilaporkan 18 orang warga desa Milima di Distrik tersebut meninggal dunia akibat terserang Disentri dengan gejala diare/mencret dan muntah-muntah.

17 Maret

Korban meninggal dunia Kejadian Luar Biasa (KLB), akibat terserang virus disentri di Kabupaten Jayawijaya Distrik Kurulu bertambah 1 orang. Korban meninggal tersebut adalah Musuken Pabika ( 40 th – laki-laki ).

19 Maret

Pelayanan Kesehatan di RSUD Abepura dikeluhkan masyarakat, karena administrasi pelayanan yang begitu rumit. Pelayanan di beberapa poliklinik

ditutup cepat; naiknya harga kartu berobat dari Rp.5000 menjadi Rp.23.000; serta adanya pungutan redistribusi Rp.1000,- setiap resep obat berdasarkan Perda No.16 tahun 2002 tentang redistribusi pelayanan kesehatan.

Virus campak menyerang anak-anak Balita di Kampung Bu dan Agani, Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat sejak awal Maret. Dari 57 Balita yang dilaporkan terserang virus, 6 diantaranya meninggal dunia karena tidak tertolong lagi, yakni 2 korban di kampung Agani dan 4 korban di Kampung Bu. Dilaporkan di beberapa kampung di Kabupaten Asmat 22 Balita meninggal dunia. Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, dr. Tohap Capah.

Kendati pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) putaran ke empat awal Maret berjalan baik, namun tercatat 3 kampung belum terjangkau dengan PIN putaran ke empat karena pengaruh cuaca yang tidak mendukung. Tiga kampung tersebut berada di Distrik Kimaam, Kabupaten Merauke yakni kampung Wanggambi, Kampung Wetao dan Kampung Kawe. Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, drg. Jhosep Rinta, M.Kes.

20 Maret

Maskur Adam, S.IP, Kepala Dinas Infokom selaku anggota tim penanggulangan bencana Jayawijaya mengatakan korban Kejadian Luar Biasa (KLB) di Distrik Kurulu dan Distrik Musatfak Kabupaten Jayawijaya akibat disentri bertambah lagi 3 orang. 3 orang yang meninggal itu masing-masing bernama Basika Mabel (50 th) dan Nerius Marian (25 th) keduanya dari desa Jiwika dan seorang dari desa Milima, Haben Mabel (30 th).

21 Maret

Virus campak yang menyerang anak-anak di dua kampung di Distrik Sawa Erma, Kabupaten Asmat yakni Kampung Agani dan Bu, langsung ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat melalui Tim kesehatan yang langsung turun ke lokasi tersebut. Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Kabupaten Asmat, dr. Tohap Capah.

23 Maret

Menurut data yang dikeluarkan Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit (PPP) Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, sampai dengan 28 Februari 2006 jumlah kasus HIV-AIDS meningkat dari 145 pada akhir bulan Januari menjadi 149 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor Drs.Sefnath Korwa, M.Si, mengatakan dari 149 kasus yang ditemukan, 44 HIV dan 105 penderita AIDS dan 65 dinyatakan meninggal dunia.

25 Maret

Wabah penyakit disentri disertai muntah dan buang air besar (mencret) di 4 Distrik di Kabupaten Jayawijaya terus memakan korban jiwa. Diperkirakan akibat penyakit ini, korban dunia sudah sekitar 29 orang. Demikian diungkapkan salah satu anggota DPRP asal Kabupaten Jayawijaya, Marthinus Kurisi. Ke-4 Distrik yang sudah terjangkit tersebut yakni Distrik Kurulu, Alogima, Hubikosy dan Musatfak.

27 Maret

Ketua KPA Provinsi Papua Drs.P.S.Ukung mengatakan jumlah kasus HIV/AIDS di Provinsi Papua saat sudah sangat mengkhawatirkan dan berbahaya, karena itu diperlukan kesadaran dan keterlibatan semua pihak untuk penanggulangannya. Data terakhir Dinas Kesehatan Provinsi Papua per 31 Desember 2005 menyebutkan angka HIV/AIDS Papua telah menembus angka 2163 kasus. Dari

jumlah tersebut, 1202 kasus positif HIV, dan 961 sudah AIDS, sedangkan sekitar 289 diantaranya sudah meninggal dunia.

### **B.3. Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak**

19 Januari

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua Ny Dra. Sipora Modouw MM dalam sambutannya saat membuka seminar profil statistik dan indikator gender Papua mengatakan untuk menyingkapi minimnya peranan wanita dalam setiap aspek pembangunan, baik secara global maupun khusus di wilayah Papua maka peran wanita dalam bidang pembangunan perlu ditingkatkan. Dengan demikian kedudukan perempuan akan sama dengan kaum pria.

29 Januari

Ketua LP3A Papua, Selvi Sanggenafa SH mengatakan, sejak lima tahun terakhir ini, kasus tindakan kekerasan terhadap anak dan perempuan meningkat. Bahkan pada tahun 2005 mengalami kenaikan 42 persen dengan 65 kasus, sedangkan yang diproses ke tingkat litigasi hanya 27 kasus. Menurutnya, pelaku tindak kekerasan terhadap anak merupakan orang yang dikenali. Yakni, om (40%), kakek (15%), dan tetangga (18%), kemudian guru, bapak angkat dan pacar (9%).

### **B.4. Hak atas pendidikan**

3 Januari

Kepala Kantor Agama Kabupaten Merauke, Drs. Wihelmus Nanga mengatakan, tenaga guru agama di Kabupaten Merauke masih sangat kurang. "Kalau di kota, mungkin masih cukup tetapi untuk daerah-daerah pedalaman memang masih sangat kurang", jelasnya.

4 Januari

Pengamat Perkembangan Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Papua, Drs. Festus Simbiak, M.Pd mengatakan yang terjadi selama ini dana pendidikan di Papua penggunaannya lebih banyak bersifat proyek ketimbang untuk mencapai sasaran melalui peningkatan untuk mencapai kualitas SDM. Oleh karena itu, penggunaan dana-dana sebesar ini harus mendapat pengawasan yang ketat dari jajaran tingkat yang paling atas, termasuk penegak hukum. "Selama pengawasan penggunaan dana tidak dikontrol baik dikhawatirkan tinggal program tetapi hasilnya tidak ada", tandasnya.

13 Januari

Guru mogok mengajar, 265 murid SD YPK I Hamadi terlantar. "Aksi mogok mengajar ini kami lakukan karena sistem manajemen sekolah yang diterapkan Kepala Sekolah belum berjalan baik, terutama masalah kesejahteraan guru-guru," ungkap ibu F. Ireeuw (guru kelas 1), salah seorang guru yang ikut dalam aksi mogok tersebut.

6 Februari

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Papua, Drs. Dominggus Rumbewas, SH mengatakan pihaknya akan membuat dan menerbitkan Kamus Bahasa Daerah. Yang akan dibuat pertama adalah Kamus Bahasa Daerah Biak dan Sentani. Kamus ini akan menggunakan pengantar Bahasa Indonesia secara keseluruhan dalam cetaknya, digabung dalam satu buku.

16 Februari

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua, Drs. James Modouw, MMT membuka workshop sehari Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Unicef di Aula Kantor Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas P dan P Provinsi. Workshop ini diikuti oleh 45 orang berasal dari LSM Pendidikan, dunia usaha/industri, Dharma Wanita, Kepala Sekolah, BP3D dan DIKJUR. Dalam Sambutannya, James Modouw mengatakan model belajar mengajar yang berpusat pada guru dapat menghambat kreatifitas siswa sebagai anak didik, sehingga perlu diubah menjadi proses belajar mengajar yang berpusat kepada siswa.

Di Wamena, guru-guru SLTP Negeri I Wamena melakukan aksi mogok mengajar dan meliburkan para siswa yang ada di sekolah tersebut. Aksi ini merupakan sikap protes mereka terhadap ketidakjelasan dan penyalahgunaan dana BOS dan sekolah standar nasional (SSN) yang dilakukan oleh kepala sekolah mereka.

20 Februari

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayapura Dr. Jack Ayamiseba mengungkapkan bahwa pihaknya telah merencanakan untuk melakukan rotasi dan pemerataan tenaga pendidik atau guru di Kabupaten Jayapura. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengatasi penumpukan guru yang ada di kota dan keluhan tidak adanya tenaga pengajar di sekolah-sekolah yang ada dipelosok.

3 Maret

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori, Drs. Jeremias Fakdawer mengatakan, tenaga guru yang saat ini bertugas di Kabupaten Supiori sangat minim. Dengan jumlah sekolah yang 48 dari tingkat TK sampai SMA/SMK, Supiori maka ideal membutuhkan sekitar 500 orang tenaga guru, namun saat ini jumlah guru yang bertugas di Supiori baru berjumlah 145 orang guru.

6 Maret

Pejabat Gubernur Provinsi Papua Dr. Sodjuangon Situmorang, M.Si mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua akan mengalokasikan dana sebesar Rp.53 Miliar untuk kepentingan bea siswa bagi pendidikan S1, S2 dan S3.

17 Maret

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Drs. Festus Simbiak MPd mengatakan, para guru yang ditempatkan di daerah pedalaman atau tempat terpencil lainnya di Tanah Papua, harus diikuti dengan fasilitas perumahan yang baik sehingga mereka bisa kerasan menetap untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

28 Maret

Karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Merauke tahun 2006 belum dibahas dan ditetapkan, sekolah-sekolah di Kabupaten Merauke terpaksa melakukan pungutan untuk menanggulangi biaya pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional tahun ajaran 2005/2006.

## **B.5. Pengurusan sumberdaya alam**

12 Januari

409 ekor kura – kura Moncong Babi, berhasil diamankan aparat kepolisian Polres Merauke dari tangan GR, karena tidak memiliki surat ijin yang lengkap. Hal ini dibenarkan Samapta AKP M. Darodjat SPd.

16 Januari

Komandan Gugus Keamanan Laut Armada RI Kawasan Timur (Danguskamlatim) Laksamana I TNI Sadikin mengatakan, ada 2 gangguan keamanan di perairan Indonesia Bagian Timur selama ini, yaitu kegiatan *illegal fishing* dan *illegal logging*, namun dari dua ancaman gangguan tersebut, ancaman gangguan *illegal fishing* masih mendominasi.

20 Januari

Jajaran Polda Papua melakukan penangkapan terhadap tiga orang Direksi PT. Tiberias Mulia Abadi Sorong yang diduga melakukan kegiatan penambangan ilegal dengan cara mengeksploitasi batu dan pasir dikawasan cagar alam pulau Batanta, di sepanjang aliran sungai Semsen Desa Wailebert, Distrik Samate, Kabupaten Raja Ampat. Tiga orang direksi perusahaan tersebut masing-masing berinisial HP (Direktur Utama), YC (Direktur I) dan YAG (Direktur II).

7 Februari

Conservation Internasional Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Cenderawasih dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Papua I mengumumkan penemuan beberapa species baru di wilayah Pegunungan Mamberamo Foja, Kabupaten Sarmi. Beberapa species yang ditemukan yaitu Kangguru Pohon Mantel Emas (*Dendrolagus pulcherimus*), lima jenis palem-paleman yaitu Polidocorpus, dua species rotan dan dua species palem Licuala, burung hisap madu, penemuan kembali katak Mata Jaring (*Nyctimystes fluviatilis*) dan katak *Xenorhina Arboricola*.

13 Februari

Kepala Dinas Kehutanan provinsi Papua, Ir. Marthen Kayoi, MM diputuskan bebas terhadap tuduhan terlibat kasus *illegal logging* oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang diketuai Lowdewik Tiwery SH, dibantu hakim anggota S. Radiantoro SH dan Majedi SH. Marthen Kayoi sebelumnya didakwa melanggar Undang-Undang No.41 1999 tentang Kehutanan pasal 50 ayat 3 dan dituntut 6 tahun penjara oleh JPU. Tim penasehat hukum Marthen Kayoi masing-masing Budi Setyanto SH dan Bernard Akasian, SH merasa puas dengan penolakan majelis hakim terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Di Jakarta Menteri Negara Lingkungan hidup Rachmat Witoelar mengatakan tim yang dikirim ke Papua menemukan limbah tailing yang mencemari suatu kawasan di wilayah kerja pertambangan PT Freeport. Dikatakan bahwa penelitian mendalam akan baru selesai pada akhir Maret 2006 disebabkan karena luasnya wilayah kerja pertambangan yang harus diteliti secara seksama.

27 Februari

Dua orang terdakwa kasus *illegal logging* yaitu Mr. Tan dan Agustinus Joumilena dari PT Wapoga Mutiara Timber diputuskan bebas oleh majelis hakim. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua, Lodewyk Tiwery, SH, Hakim Anggota Syamsul Ali SH dan Denny Sumadi SH dibantu Panitera Fransi Palapessy SH dalam putusannya mengatakan bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana, karena itu belum bisa diberikan keputusan hukum tetap dan masih memberikan waktu kepada JPU untuk mempertimbangkannya. Jaksa Penuntut Umum Dadang Setijady SH dan D Lintang Ashari SH, mengatakan apa yang diputuskan majelis hakim tidak sesuai dengan yang didakwakan dimana jelas-jelas terdakwa terbukti melakukan segala aktivitas tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan alat-alat berat yang didatangkan tidak memiliki surat-surat yang lengkap.

6 Maret

Dan dalam Letkol Laut (P) Drs. Hadi Pranoto mengatakan, TNI AL telah menangkap 2 kapal asing di Laut Arafuru karena diduga melakukan operasi tidak sesuai dengan izin. Kapal tersebut masing-masing kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yakni KM. Mitra 808 dan kapal tanker berbendera asing ST. Kicks Namd Nevis NV Malley.

28 Maret

Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Provinsi Irian Jaya Barat (IJB), Ir. M. L. Rumadas tersangka kasus *illegal logging*, divonis 6 bulan penjara dan denda Rp. 30 juta, oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Manokwari. Namun Rumadas sendiri telah menjalani masa tahanan kota selama 6 bulan sejak proses hukum berlangsung, maka dengan putusan itu Rumadas langsung bebas.

## **B.6. Penyelenggaraan pemerintahan**

2 Januari

DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) untuk provinsi Papua tahun 2006 ini mencapai Rp 7.251.915.000.000 (Rp. 7,2 Triliun lebih).

Puluhan massa dari Forum Mahasiswa dan Masyarakat Nabire mendatangi Kantor Gubernur Papua, mereka menuntut agar Kepala Biro (Karo) Keuangan Setda Provinsi Papua Paul Onibala, SE segera dinonaktifkan dari jabatannya karena dinilai telah melakukan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Plt. Gubernur Provinsi Papua, Drs. H. Andi Baso Basaleng mengatakan dana Rp. 10.767.430.357.000 akan digunakan untuk mendanai pembangunan di 4 sektor prioritas, yakni bidang (1). Pendidikan (Rp. 426.973.870.000), (2). Kesehatan (Rp. 142.574.339.000), (3). Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan infrastruktur (Rp. 391.854.328.000).

Direktur Eksekutif ICS Papua, Budi Setyanto SH mengatakan, dana Rp. 7,2 Triliun lebih sesuai dengan Daftar Isi Pelaksana Anggaran harus diimbangi dengan perencanaan yang strategis dan menyentuh kebutuhan masyarakat banyak.

"Pengalaman telah membuktikan bahwa dana Otonomi Khusus (Otsus) dua tahun terakhir ini, nilainya sekitar tiga triliun rupiah. Tapi itu tidak menjadikan masyarakat Papua lebih sejahtera, karena ketidakmampuan dalam membuat suatu perencanaan yang strategis dan rendahnya mutu pengawasan serta kualitas penegak hukum yang memprihatinkan", ungkap Budi Setyanto, SH.

7 Januari

Dr. Sodjuangan Situmorang, M.Si resmi dilantik sebagai Pejabat Gubernur Provinsi Papua oleh Mendagri H.M. Ma'ruf di Jakarta.

11 Januari

Puluhan warga Doyo Baru, Distrik Waibu, demo ke kantor Bupati Jayapura. Mereka minta penjelasan pemanfaatan dana pemberdayaan kampung yang dinilai tidak transparan. Dalam pamflet diantaranya bertuliskan "Kepala Kampung harus tau dan sadar. Otonomi khusus bukan untuk menyengsarakan rakyat tetapi mensejahterahkan rakyat".

24 Januari 2006



Aspidsus Kejaksaan Tinggi Papua, Anton Hutabarat, SH mengatakan adanya dugaan kasus korupsi di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Papua mulai ditangani tim dari Kejaksaan Tinggi Papua. Sebagai langkah awal, 15 saksi sudah diperiksa.

26 Januari

Ratusan orang melakukan demo di kantor Gubernur Provinsi Papua. Massa yang menamakan dirinya Koalisi Papua Bersatu, terdiri dari Forum PNS Papua, GAMKI, FKN Papua, AMPTI dan Tokoh Masyarakat Papua. Mereka meminta agar sejumlah pejabat di kalangan Pemda Provinsi Papua yang terlibat dalam kasus korupsi diperiksa dan diturunkan dari jabatan. Salah satunya, menuntut agar Sekda Provinsi Papua Drs. Andi Baso Basaleng dan Kepala Biro Keuangan Provinsi Papua Paul Onibala SE diturunkan dari jabatan. Sementara itu koordinator massa Ruben SP Marey mengatakan bahwa selama ini terjadi penyelewengan dana APBD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Ia menyebutkan bahwa salah satu bentuk penyelewengan dari dana APBD adalah dana untuk pemberdayaan pengusaha kecil menengah melalui Bank Papua sebesar Rp.10 Miliar. Selain itu dana bantuan bencana alam untuk Kabupaten Nabire Rp.339.504.000 yang seharusnya masuk dalam program Pemda Provinsi, uangnya ditransfer ke rekening Bupati Nabire yang saat itu sedang dalam proses hukum. Program tersebut tidak ada dalam APBD Kabupaten Nabire.

29 Januari

Pejabat Gubernur Provinsi Papua, Dr. Sodjuangan Situmorang, M.Si mengatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua pada 2006 ini sekitar Rp.4 triliun.

30 Januari

Bupati Merauke Drs. John Gluba Gebze menilai bahwa kedudukan Ibukota Provinsi Papua terhadap terhadap seluruh wilayah binaannya tidak strategis. Hal itu membuat dana yang diterima dari pusat baik melalui DAU maupun OTSUS tidak efektif, bahkan sia-sia karena rentang kendali penanganan yang terlalu jauh, hal ini disampaikan kepada Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Merauke.

Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat di Jayawijaya mendatangi kantor Pengadilan Negeri Wamena untuk memprotes putusan sela yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim PN Wamena terhadap terdakwa Drs. David A Hubi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pembelian pesawat Antonov buatan Rusia. Massa yang terdiri dari PNS Bersatu, Gerakan Reformasi Pembangunan (Rakforbang), Forum Komunikasi Antar Gereja (Forkompag) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Papua se Indonesia (BEMP –SI) yang dipimpin oleh Agus Kossay meminta agar Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memutuskan perkara ini seadil-adilnya.

Drs. David Hubi, diberhentikan sebagai Bupati Jayawijaya berdasarkan keputusan Mendagri No.131.91 – 46 tahun 2006.

2 Februari

Bupati Jayapura, Habel Melkias Suwae, S.Sos MM menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kapolres Jayapura AKBP Jakob Kalembang BA, terkait tuduhan penggelapan dana Otsus sebesar Rp 75 Miliar. Tuduhan ini diduga dilakukan oleh Kadistrik Waibu, Drs. Ted Jones Mokay. Sementara itu menurut Kasat Reskrim Iptu Sudjadi Waluyo, Kadistrik Waibu juga telah mengirimkan surat kepada Polres yang mengatakan bahwa surat tuduhan tersebut adalah surat

kaleng sehingga Kadistrik juga meminta agar pihak kepolisian mengusut tuntas pihak yang hendak mengadudomba tersebut.

3 Februari

Gubernur Provinsi Papua Dr. Sodjuangan Situmorang menunjuk Wakil Bupati Jayawijaya Nicolas Jigibalom S.Sos untuk menjalankan tugas sebagai Bupati Kabupaten Jayawijaya. Pelimpahan Surat Tugas dan Wewenang berupa radiogram Gubernur itu diserahkan Kepala Kesatuan Bangsa Provinsi Papua, Wempi Wola kepada Nicolas Jigibalom, S.Sos disaksikan Muspida Jayawijaya di ruang rapat Hotel Baliem Pilamo Wamena.

8 Februari

Penjabat Bupati Jayawijaya, Nikolas Jigibalom mengadakan rapat koordinasi pertama kalinya setelah dirinya ditunjuk sebagai pengganti Bupati Jayawijaya, Drs. David Hubi yang sedang terkait kasus korupsi. Dalam rapat koordinasi tersebut Penjabat Bupati mengajak semua pihak untuk menghilangkan perbedaan yang terjadi dan kembali bersatu serta rukun untuk membangun kembali Jayawijaya yang sedang mengalami keterpurukan.

9 Februari

Penjabat Bupati Jayawijaya Nicolas Jigibalom S.Sos melakukan pergantian beberapa pejabat eselon III di lingkungan Pemkab Jayawijaya. Pelantikan dilakukan di Sasana Wio Kantor Bupati. Pejabat yang dilantik masing-masing Melianus Saa, SH sebagai Kabid Mutasi kepegawaian BKD Jayawijaya, Lukas W. Kossay, SE, M.Si sebagai KaSubdin Program Dinas Perindag Jayawijaya, Petrus Wakerkwa, SE sebagai Kabag Keuangan Setda Jayawijaya, dan Marten Yogobi, SH, M.Hum sebagai Kabag. Hukum dan Perundang-undangan Setda Jayawijaya.

22 Februari

Sidang Paripurna masa sidang I DPRD Kota Jayapura resmi dibuka oleh pimpinan sidang Ketua Dewan, Drs. Theopilus Bonay MM. Sidang ini membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2006.

### Struktur Belanja Tahun Anggaran 2006

<b>A. PENDAPATAN</b>	
<b>I. Pendapatan Asli Daerah</b>	
a. Pajak Daerah	Rp. 8.000.000.000
b. Retribusi	Rp. 10.000.000.000
c. Bagian Laba BUMD	Rp. 500.000.000
d. Lain-lain pendapatan	Rp. 1.000.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 19.500.000.000</b>
<b>II. Dana Perimbangan</b>	
a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	Rp. 35.733.961.700
b. Dana Alokasi Umum	Rp. 294.148.000.000
c. Dana Alokasi Khusus	Rp. 14.080.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.343.961.961.700</b>
<b>III. Lain-lain Penerimaan yang Sah</b>	
a. Bantuan dari Pemerintah Pusat	Rp. 6.444.000.000
b. Dana Otonomi Khusus	Rp. 50.000.000.000

<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 50.644.000.000</b>
<b>Total Pendapatan</b>	<b>Rp.363.461.961.700</b>
<b>B. BELANJA</b>	
<b>I. Belanja Aparatur</b>	<b>Rp. 236.317.522.780</b>
<b>II. Belanja Pelayanan Publik</b>	<b>Rp. 166.864.712.220</b>
<b>III. Belanja Bagi Hasil dan Bukan Bantuan Pajak</b>	<b>Rp. 31.942.000.000</b>
<b>IV. Belanja Tidak Tersangka</b>	<b>Rp. 2.000.000.000</b>
<b>Total Belanja</b>	<b>Rp. 437.124.234.000</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	
<b>I. Penerimaan Daerah</b>	<b>Rp. 22.338.540.000</b>
<b>II. Pengeluaran</b>	<b>Rp. 1.000.000.000</b>
<b>Total Pembiayaan</b>	<b>Rp. 21.338.540.000</b>
Sumber : Harian Cenderawasih Pos	

Walikota Jayapura, Drs. Mr. Kambu, Msi dalam pidato pengantarnya menjelaskan bahwa jumlah dana sebesar itu dialokasikan pada 6 sektor prioritas yaitu Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan ekonomi, Infrastruktur, Agama dan Pemerintahan.

Penjabat Gubernur Provinsi Papua Dr. Sodjuangan Situmorang, M.Si, membuka pertemuan penyusunan RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) dengan seluruh pimpinan instansi di Sasana Karya Jayapura. Dalam arahannya, Gubernur mengatakan Pemerintah Pusat telah melayangkan surat teguran kepada Pemerintah Provinsi Papua agar segera mengesahkan RAPBD. Dikatakan keterlambatan ini sangat mempengaruhi jalannya pelayanan kepada masyarakat dan jalannya pembangunan karena banyaknya waktu yang terbuang.

3 Maret

Pihak Pengadilan Negeri Merauke mengeluarkan izin penyitaan barang terhadap tersangka Drs.Petrus M.Tiniyap dan Harry Rahail dalam kasus penyalahgunaan keuangan yang terjadi di DPRD Merauke tahun 2002, sebesar Rp.4,9 miliar.

6 Maret

Sekitar 30 warga yang merupakan tua-tua adat dari 3 Distrik, yakni Muting, Ellikobel dan Uliling menyampaikan aspirasinya di kantor DPRD Merauke. Mereka menginginkan ke-3 distrik itu menjadi kabupaten sendiri, yakni Kabupaten Muting dan pisah dari Kabupaten Merauke.

14 Maret

Sejumlah masyarakat yang berada di distrik pemekaran Kemtuk Gresi Selatan yang dipimpin oleh Ondoafi Petrus Marikan mendatangi kantor Bupati Jayapura dan bertemu dengan Bupati Habel Melkias Suwae, S.Sos, MM. Mereka menyampaikan aspirasi tentang pemekaran distrik baru sekaligus mendukung kebijakan pemberdayaan distrik dan kampung yang dijalankan selama ini.

15 Maret

14 kepala kampung se-Distrik Nimboran dukung Habel Suwai,S.Sos.MM untuk maju dalam Pilkada Bupati Jayapura periode 2006-2011.

17 Maret

Anggota KPUD Drs. Daan Dimara, MA tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan segel Pemilu 2004, merasa dijebak. Dia tetap menyatakan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin yang seharusnya bertanggungjawab, sebab dia ditunjuk sebagai ketua panitia saat proyek sudah berjalan.

23 Maret

Puluhan Kepala Kampung di Kabupaten Manokwari menggelar unjuk rasa di halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari. Mereka meminta melalui DPRD, Pemerintah Daerah dapat menaikkan gaji mereka hingga Rp.700.000 / bulan.

24 Maret

Pater Nato Gobay Pr, Pastor di Nabire mengemukakan, pembangunan yang saat ini terjadi di Nabire hendaknya dimulai dari kampung ke kota, bukan dari kota ke kampung seperti yang terjadi selama ini. Dengan demikian masyarakat dapat merasakan arti pembangunan itu sendiri.

27 Maret

Ancaman DPR Provinsi Papua untuk mengembalikan UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus beralokasi dana Otsus tahun 2006 sebesar Rp.2,9 triliun ke Pemerintah Pusat disikapi serius anggota komisi B DPRP Drs. Piet Hein Awangkok. " Tujuan dasar dari pemberlakuan Otonomi Khusus bagi Papua adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Oleh karena itu sangat tidak relevan sekali Otsus mau dikembalikan ke Pemerintah Pusat." tegasnya.

## **BAGIAN II**

### **ANALISIS LINTASAN PERISTIWA**

#### **A. HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK**

##### **A.1. Irian Jaya Barat (IJB) Versus OTSUS**

Irian Jaya Barat telah menjadi perdebatan panjang sejak provinsi ini dinyatakan keberadaannya, bahkan semakin ramai dibicarakan setelah Inpres No. 1/2003 tentang percepatan pelaksanaan UU No. 45 tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat (IJB) dan Irian Jaya Tengah (IJT) diputuskan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Konstitusi pada bulan November 2004. Keadaan semakin rumit ketika Pemerintah Pusat seperti tidak pernah berniat untuk menyelesaikan masalah ini tetapi justru menimbulkan kebingungan bagi semua pihak, terutama masyarakat di wilayah itu dengan status IJB.

Permasalahan IJB dalam 3 bulan terakhir ini lebih banyak diwarnai dengan adanya polemik tanpa henti antara MRP, DPRP dengan Pemerintah Pusat dan kalangan elit politik di wilayah IJB yang semakin diperkeruh dengan berlangsungnya Pilkada IJB. Tarik ulur kepentingan ini tetap berlangsung terutama ketika Pilkada Gubernur IJB tetap diagendakan sementara pihak elit politik IJB terus melakukan pendekatan kepada Pemerintah pusat agar dapat mendukung berlangsungnya Pilkada IJB dan jalannya pemerintahan di IJB. Di pihak lain, MRP melakukan konsultasi publik terhadap masyarakat di seluruh wilayah yang diklaim sebagai wilayah provinsi IJB.

Konsultasi publik ini mendapat tentangan keras dari pihak elit politik IJB yang menganggap bahwa MRP tidak seharusnya melakukan konsultasi publik dengan tujuan mengumpulkan pendapat rakyat di wilayah IJB tentang perlu tidaknya pemekaran. Menurut mereka seharusnya konsultasi publik ini dimaksudkan untuk mencari payung hukum yang sesuai bagi IJB, bukan untuk menjajaki pendapat rakyat. Pembentukan payung hukum dan Perpu tentang IJB inilah yang ditentang oleh MRP dan DPRP. MRP dan DPRP menilai bahwa seharusnya payung hukum IJB tetap berada di bawah Otsus, dengan demikian pemekaran provinsi di Papua seharusnya mengacu kepada undang-Undang Otsus, bukan dengan Perpu atau payung hukum lainnya. Penolakan MRP untuk bertemu dengan Pemerintah Pusat (Mendagri) dan membahas hasil konsultasi publik guna pembentukan payung hukum bagi IJB semakin menegaskan sikap MRP tentang IJB. Entah sampai kapan persoalan ini mendapatkan titik temu.

Hasil konsultasi publik menunjukkan bahwa rakyat di wilayah yang diklaim sebagai IJB ini bingung dengan status IJB sendiri. Hasil temuan MRP menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat tidak menginginkan pemekaran provinsi. Mereka tetap berkeinginan untuk berada dalam satu provinsi yaitu Papua. Bentuk pemekaran yang mereka inginkan adalah pemekaran distrik sehingga dapat mempercepat peningkatan pembangunan di wilayah tersebut. Sementara itu para elit politik di wilayah tersebut tetap bersikukuh dengan segala daya upaya mempertahankan keberadaan IJB. Sebagai bentuk protes rakyat di wilayah ini, di Manokwari berkembang wacana untuk mencoblos ketiga calon gubernur-dan wakil gubernur IJB pada Pilkada Gubernur IJB yang berarti bahwa suara yang diberikan rakyat akan hangus.

Di tengah kontroversi kepentingan antara para elit politik, rakyatlah yang menjadi korban. Lagi-lagi rakyat dibingungkan karena pada awal pembentukan IJB ada suatu harapan besar agar terjadi perubahan dan peningkatan pembangunan dalam berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan dan kesehatan, tetapi justru hal ini semakin memperburuk keadaan di wilayah tersebut. Keterpurukan dalam berbagai sektor pembangunan disebabkan karena anggaran daerah tidak tersedia. Tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi karena permainan elit politik yang terus memperjuangkan keberadaan IJB.

Diterimanya hasil konsultasi publik tentang IJB oleh DPRP ditunjukkan dengan mengeluarkan pendapat atau sikap DPRP yang senada dengan sikap MRP. Sikap ini didukung juga oleh berbagai komponen masyarakat di Papua. Meskipun demikian, Pemerintah Pusat sepertinya tidak peduli dan tetap saja pada keinginannya untuk melanggengkan IJB sebagai provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat sebenarnya tidak menghormati kedaulatan rakyat di Papua melalui DPRP sebagai lembaga negara.

MRP sebagai representasi kultural orang Papua di pemerintahan, telah berupaya keras untuk menyelesaikan polemik IJB ini. Konsultasi publik telah dilakukan oleh MRP, namun sejauh manakah Pemerintah pusat memiliki keinginan baik untuk menghormati hasil konsultasi publik dan menghormati MRP sebagai satu lembaga resmi yang juga dibentuk oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada semangat OTSUS?

Pilkada IJB bagaimanapun juga telah berlangsung, tepat sehari sesudah Pilkada Gubernur – Wakil Gubernur Papua. Pilkada ini merupakan Pilkada ketiga setelah 2 kali tertunda. Pilkada yang tertunda menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp. 43 Milyar rupiah. Sangat disayangkan sebab dana sebesar itu seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan keterpurukan yang telah berlangsung di wilayah tersebut. Namun dana tersebut hanya dihabiskan untuk kepentingan sekelompok elit politik saja tanpa melihat nasib rakyatnya.

Dari 406.413 jiwa jumlah pemilih yang terdaftar di KPU IJB, terpilih pasangan Abraham O. Atururi dan Drs. Rahimin Katjong sebagai gubernur wakil gubernur untuk wilayah ini. Tidak jelas apakah seluruh masyarakat ikut ambil bagian dalam Pilkada tersebut, jika melihat wacana yang berkembang di masyarakat untuk mencoblos ketiga pasangan calon pada saat Pilkada, sebagai salah satu bentuk penolakan. Apalagi dari hasil konsultasi publik, digambarkan bahwa masyarakat di wilayah ini menolak Pilkada IJB. Apakah Pilkada ini berlangsung dengan segala trik dan intrik para elit politik? Yang pasti semakin jelaslah bahwa Pemerintah Pusat dengan segala cara tetap berusaha menancapkan cakarnya semakin dalam di Tanah Papua dan mencabik-cabik keutuhan sosial kultural orang Papua dengan alasan pemerataan pembangunan dan kepentingan rakyat.

Apakah polemik IJB akan segera terselesaikan ataukah justru menjadi semakin panjang dan rumit? Bagaimanakah nasib rakyat Papua yang ada di wilayah barat Tanah Papua ini? MRP dan DPRP sudah habis-habisan melakukan upaya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang OTSUS. Apakah Pemerintah Pusat masih memiliki kemauan baik dan berkiblat pada Undang-Undang OTSUS untuk menyelesaikan persoalan IJB?

## **A.2. Hiruk Pikuk PILKADA Gubernur Papua**

Sejak 2004 Rakyat di Papua disibukkan dengan Pesta Demokrasi: Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wapres, Pilkada Bupati dan Walikota, dan akhirnya Pilkada Gubernur - Wakil Gubernur.

Pilkada Gubernur – Wakil Gubernur digelar tanggal 10 Maret 2006. Pesta Demokrasi ini sangat dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Papua. Tentu saja rakyat mengharapkan adanya suatu perubahan dan kemajuan dalam pembangunan diberbagai aspek kehidupan di Tanah Papua. Visi, misi yang dapat juga dikatakan sebagai janji-janji, telah disampaikan oleh para kandidat. Tim sukses dari masing-masing kandidat telah melakukan berbagai upaya untuk memenangkan kandidatnya. Berbagai upaya yang tidak lepas juga dari kecurangan dalam permainan politik pasti terjadi dengan tujuan untuk memenangkan salah satu pasangan. Marilah kita melihat kembali jalan proses demokrasi ini.

Awal proses demokrasi ini diramaikan dengan pencalonan kandidat oleh Partai-partai politik yang diusulkan kepada DPRP. Seleksi ini diwarnai dengan berbagai trik dan intrik yang dimainkan oleh partai-partai politik. Tentu masih tersimpan dalam ingatan masyarakat mengenai kriteria asli dan tidak asli Papua yang menjadi penilaian MRP bagi pasangan calon gubener dan wakilnya. Keaslian yang ditentukan berdasarkan garis keturunan bapak. Kriteria ini memunculkan protes dari berbagai kalangan. Sempat terjadi perdebatan mengenai keaslian para kandidat sebagai anak adat Papua. Bahkan muncul kontroversi tentang fam Tanawani yang dipakai oleh Komarudin Watubun sebagai pasangan Bas Suebu. Hal ini sempat menjadi perdebatan berbagai pihak, termasuk pihak keluarga besar Tanawani. Perdebatan juga muncul terhadap Moh. Musa'ad, pasangan dari Lukas Enembe. Keaslian darah Papua pada diri Musa'ad dipertanyakan, meskipun dalam tubuh Musa'ad mengalir juga sedikit darah Papua. Bagaimanapun juga MRP menjalankan tugas dan wewenangnya seperti yang disebutkan dalam pasal 20 UU Otsus, tentang tugas dan wewenang MRP.

Empat pasangan kandidat Gubernur-Wakil Gubernur Papua meramaikan Pilkada Gubernur yang dipilih secara langsung untuk pertama kalinya di Papua. Dukunganpun berdatangan kepada para kandidat ini. Beberapa ikatan keluarga atau paguyuban kedaerahan seperti Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Paguyuban Jawa – Madura dan kelompok - kelompok lainnya memberikan dukungan dengan mendeklarasikan dukungan tersebut dan membuat kontrak politik dengan para kandidat.

Kampanye Pilkada Gubernur yang digelar serentak di seluruh wilayah Provinsi Papua disambut dengan antusias oleh rakyat di Papua. Para kandidat turun dengan kekuatan penuh untuk menarik massa dan dukungan. Mereka berusaha menarik simpati rakyat dengan memaparkan visi dan misi atau dapat dikatakan juga sebagai janji-janji tentang apa yang akan mereka buat jika terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur nantinya. Tema umum yang diangkat oleh keempat kandidat adalah masalah pembangunan dan pemerataan pembangunan di Papua. Secara khusus keempat kandidat banyak menekankan pada pembangunan ekonomi dan sumberdaya manusia, namun ada beberapa titik penekanan yang berbeda pada masing-masing kandidat.

Pasangan Lukas Enembe – H. Arobi Aituarauw misalnya lebih menekankan pada diskriminasi kepemimpinan yang terjadi selama ini di Papua. Kepemimpinan di Papua selama ini dikuasai oleh orang pesisir (orang pantai) dan tidak ada orang gunung (orang koteka) yang diberikan kesempatan untuk memimpin Tanah ini. Karena itu Enembe menilai sudah saatnya Ia mewakili anak koteka untuk memimpin Papua.

Terlihat dengan jelas bahwa pasangan ini mengeksploitasi primordialisme kesukuan dengan menempatkan 'orang gunung' vs 'orang pantai' dalam menilai situasi kepemimpinan dan pembangunan di Papua. Demi kepentingan mencari kursi nomor satu, primordialisme kesukuan dijadikan bumbu penyedap rasa dari menu kampanye yang mengangkat kesenjangan dan keterpurukan pembangunan di beberapa Kabupaten pada wilayah Pegunungan Tengah. Seakan-akan memang pembangunan dan kesejahteraan di Papua ditentukan oleh berasal dari suku mana, pemimpin di provinsi ini. Pandangan ini jugalah yang selama ini menjadi pupuk bagi suburnya Kolusi dan Nepotisme yang telah terlihat sangat menonjol dalam pemerintahan di Papua.

Di tengah dinamika situasi politik dan kehidupan bermasyarakat di Papua dewasa ini, unsur kesukuan dapat menjadi ancaman yang serius, ketika unsur ini mulai dipakai untuk menilai ada tidaknya keadilan terhadap aspek-aspek kehidupan. Tetapi lebih dari itu, memunculkan unsur kesukuan di Tanah Papua yang terdiri dari sekitar 250 suku asli Papua ini akan mengganggu rasa kebersamaan dan kesatuan kultural yang telah ada sejak lama. Aspek kesempatan dan akses terhadap pembangunan dapat dipakai sebagai minyak oleh pihak-pihak tertentu untuk membakar api perpecahan di Papua. Dengan demikian Papua akan dianggap sebagai daerah konflik dan tidak aman sehingga harus ditangani secara serius dengan menambah pasukan militer. Inilah pekerjaan dari pihak-pihak yang tidak menginginkan Papua sebagai Tanah Damai.

Bagi kelompok masyarakat dari Pegunungan Tengah, memunculkan isu ini sebenarnya justru merugikan mereka. Stigma yang sengaja dihidupkan dan sudah lama melekat pada kelompok masyarakat Pegunungan Tengah sebagai separatis akan semakin kuat, padahal ada usaha dari masyarakat sendiri untuk menghilangkan stigma tersebut. Tidak jelas apa yang menjadi latarbelakang pemikiran Enembe-Aituarauw dengan mengangkat isu ini. Bagaimanapun, orang yang nantinya menjadi orang nomor satu di Tanah ini harus benar-benar menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat Papua dan tidak memihak pada golongan, suku atau kalangan tertentu.

Papua sudah mulai dipecah-pecah sebagai satu kesatuan wilayah dengan memunculkan IJB, IJT dan Papua Selatan, yang akhir-akhir ini menjadi pembicaraan para elit politik. Rakyat Papua sangat sadar dengan usaha perpecahan ini sehingga dengan sangat kuat berusaha menentang usaha tersebut. Lantas, apakah Papua akan dihancurkan melalui unsur yang lebih dasariah yaitu kesatuan kultural?

Sementara itu pasangan John Ibo–Paskalis Kossy menekankan pada kepemimpinan yang berpihak pada orang kecil. Artinya pemimpin yang mengerti dan memahami kemauan rakyat kecil. Termasuk adanya keinginan masyarakat untuk membentuk beberapa kabupaten baru di wilayah Pegunungan Tengah dan Mamberamo Tengah. Tidak hanya itu, bahkan Bupati Merauke berani menyatakan dukungannya mengatasnamakan rakyat untuk melakukan kontrak politik dengan pasangan ini dengan meminta untuk mendirikan provinsi Papua Selatan yang meliputi Kabupaten Merauke dan sejumlah Kabupaten pemekarannya.

Belajar dari pengalaman pemekaran Kabupaten induk Jayawijaya menjadi beberapa kabupaten baru yang sampai saat ini kondisinya dapat dikatakan belum bisa merangkak dan sedang membangun secara fisik dan nonfisik, lalu jika ditambah lagi dengan 5 kabupaten baru, maka dapat dibayangkan apa yang akan terjadi setelah itu. Kondisi yang dialami oleh 3 kabupaten sebelumnya mungkin akan dialami juga oleh 5 kabupaten baru tersebut. Isu pemekaran ini sangat sensitif. Demikian pula



dengan ide pemekaran provinsi perlu mendapatkan pertimbangan serius. Pro–kontra IJB dan kasus bentrok yang menelan korban rakyat sipil karena polemik pendirian Irian Jaya tengah (IJT) perlu menjadi pelajaran penting bagi semua pihak di Papua. Pemekaran tidak semata aliran uang dan dana Otsus. Pemekaran secara terburu-buru bukanlah suatu solusi. Membangun Papua berarti menjamin hak-hak hidup orang Papua di atas Tanahnya sendiri dan melihat orang Papua sebagai satu kesatuan dari ujung Kepala Burung sampai di Pantai Selatan. Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak untuk tidak dengan mudah mengangkat isu pemekaran dan janji-janji pemekaran kepada masyarakat di Papua.

Pasangan Wabiser–Inauri memiliki ide untuk meningkatkan pembangunan dan juga menjamin kondisi Papua yang aman. Pembangunan yang dimaksudkan secara khusus pada bidang kesehatan, kesejahteraan dan juga menciptakan suatu pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Pasangan ini menjanjikan biaya pendidikan dan kesehatan yang gratis. Unsur keamanan juga menjadi tawaran penting dari pasangan ini. Papua akan sejahtera jika ada jaminan keamanan bagi rakyat yang mendiami Tanah Papua. Mereka menilai bahwa tidak perlu ada letusan senjata lagi dan masyarakat bersama aparat keamanan harus bergandengan tangan untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

Ide ini terdengar sederhana tetapi jika benar-benar ingin dilaksanakan dan diwujudkan, maka dibutuhkan kerja keras dan juga kekuatan kepemimpinan. Kekuatan kepemimpinan berarti seorang pemimpin yang berkarakter kuat sekaligus memahami dan mampu bermain didalam percaturan politik Indonesia yang cukup rumit. Banyak hal yang harus ditembusi dan dirombak dalam sistem pemerintahan yang telah berjalan di Papua saat ini. Bukanlah suatu pekerjaan yang mudah untuk merombak kebijakan pertahanan dan keamanan terhadap Papua.

Bas Suebu–Hessegem juga mengangkat masalah pembangunan dengan menekankan pelaksanaan Otsus secara benar dan sungguh-sungguh. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan menjadi prioritas pasangan ini. Satu hal yang menarik dan menjadi penekanan dari pasangan ini adalah program turun ke kampung. Turun ke kampung tidak hanya berupa kunjungan-kunjungan saja melainkan bermakna lebih dari itu adalah dana Otsus yang selama ini hanya mengalir di kota harus pula ikut turun ke kampung sehingga dapat dirasakan oleh rakyat di kampung. Dengan demikian mereka menilai bahwa perkembangan ekonomi di Papua akan segera meningkat sehingga kesejahteraan rakyat Papua juga semakin meningkat.

Memang idealnya pembangunan tidak hanya terpusat di kota atau ibukota kabupaten, tetapi harus dapat menyentuh lapisan masyarakat yang paling jauh di pelosok. Sekali lagi bahwa membangun Papua berarti memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak hidup rakyat di tanah ini. Pemikiran ini sebenarnya sudah tertuang dalam Undang-undang Otsus namun setelah diberlakukan selama 5 tahun (sejak November 2004) pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan inti semangat Otsus. Tertundanya pembentukan MRP dianggap sebagai faktor utama yang menghambat sehingga belum ada Perdasi dan Perdatus. dengan demikian apakah saat ini Otsus akan berjalan dengan baik mengingat MRP telah dibentuk.

Lantas, sejauh manakah popularitas para kandidat gubernur dan wakil gubernur kita ini di mata masyarakat? Ukuran popularitas pasangan kandidat ini dapat dilihat dari dinamika perolehan suara di beberapa kabupaten. Dari perolehan suara sementara di beberapa kabupaten, terlihat pasangan Bas – Hessegem bersaing ketat dengan Lukas Enembe – Aituarauw. Meskipun demikian di beberapa wilayah lain, pasangan yang lainnya juga mendapat tempat yang cukup baik. Persaingan posisi yang cukup

ketat ini dapat dikatakan sebagai ukuran yang paling tepat untuk menilai popularitas para kandidat. Nama besar seseorang juga sangat mempengaruhi pilihan masyarakat, misalnya saja seperti Bas Suebu yang memang dulu pernah menjabat sebagai Gubernur Irian Jaya dan mempunyai catatan karir yang cukup baik salah satunya sebagai Duta Besar Indonesia untuk negara Meksiko. Henk Wabiser yang merupakan salah satu putra terbaik Papua di bidang kelautan. John Ibo dan Paskalis Kossy yang dikenal oleh masyarakat atau rakyat Papua karena sebelumnya menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRP. John Ibo juga dikenal sebagai orang yang memperjuangkan *judicial review* Inpres 1/2003 di Mahkamah Konstitusi. Kedua putra terbaik Papua ini adalah orang-orang yang dengan gigih memperjuangkan keutuhan Tanah Papua sebagai satu Provinsi yang utuh dan tidak terpecah-pecah karena kepentingan Jakarta. Unsur popularitas juga sangat berpengaruh dalam kemenangan salah satu pasangan, tetapi hal lain yang juga tidak kalah penting adalah dukungan dan kerja keras para tim sukses dalam menarik massa di daerah-daerah yang dianggap sebagai kantong suara. Pada akhirnya masyarakat atau rakyat sendiri jugalah yang akan menilai apakah benar kemenangan atau perolehan suara yang cukup tinggi oleh salah satu kandidat benar-benar merupakan suara rakyat ataukah permainan politik belaka.

Jika kita membuka kembali ingatan terhadap proses demokrasi di Tanah Papua yang dimulai dengan Pemilihan Legislatif hingga Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, telah banyak peristiwa konflik dan perpecahan mewarnai dinamika bermasyarakat di Papua. Politik uang dipakai sebagai cara untuk mendapatkan jabatan atau dukungan. Perpecahan antara kelompok-kelompok masyarakat semakin terlihat akibat usung mengusung salah satu calon atau pasangan calon. Yang kiranya paling berbahaya bagi orang Papua sendiri adalah primordialisme kesukuan yang dimunculkan dalam berbagai kampanye dan praktek dukung mendukung tersebut demi kepentingan kelompok tertentu.

Proses demokrasi yang telah berjalan dengan segala dinamikanya ini kiranya mengajak kita untuk secara kritis menilai sejauh manakah rakyat di Papua sadar akan demokrasi dan harga yang harus dibayar atas seluruh proses itu.

### **A.3. Kasus Abepura 16 Maret 2006: cermin realita konflik yang terpendam?**

Insiden Abepura 16 Maret di Gapura Uncen Abepura berawal dari sebuah aksi spontan damai pada tanggal 15 Maret 2006 yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat sipil yang dimotori oleh Parlemen Jalanan dan Front Pepera Papua Barat. Mereka memprotes keberadaan PT Freeport dan militer karena dianggap selama ini hanya merugikan rakyat Papua. Mereka menuntut penutupan PT Freeport, penarikan pasukan TNI/Polri dan membebaskan 7 tahanan akibat bentrok di Timika. Aksi ini merupakan salah satu dari serangkaian aksi protes terhadap PT Freeport yang digelar oleh banyak kelompok mahasiswa di wilayah lain seperti di Jakarta, Makassar dan Yogyakarta, sejak akhir Januari 2006. Sehingga dikatakan dengan jelas bahwa gerakan memprotes keberadaan perusahaan tambang raksasa milik Amerika itu telah menjadi suatu gerakan bersama oleh banyak kalangan, tidak hanya mahasiswa di Papua atau di Jakarta dan Jawa tetapi juga menjadi perhatian berbagai pihak seperti LSM baik nasional maupun internasional.

Aksi ini dapat dipandang juga sebagai bentuk luapan emosi atau 'kemarahan' yang telah terpendam cukup lama dalam benak orang Papua sebagai perwujudan dari ingatan akan sekian banyak penderitaan. Ingatan akan penderitaan (*memoria passionis*) yang begitu panjang dari masa ke masa yang dialami oleh orang Papua

serasa menumpuk dan menjadi semakin tidak terbendung sehingga demo Freeport dilakukan memicu pengungkapan ingatan tersebut.

Nasi sudah menjadi bubur, begitulah istilah yang dapat dipinjam untuk menilai peristiwa ini. Jika kita merekonstruksi peristiwa tersebut, kiranya insiden ini dapat dihindari. Beberapa pihak menilai bahwa dialog atau negosiasi antara pihak pendemo dan pihak keamanan buntu. Komarudin Watubun dan beberapa anggota DPRP sempat melakukan negosiasi dengan pihak pendemo untuk membuka palang. Demikian halnya Pieter Eil, SH, Koordinator Kontras Papua dan Paskalis Letsoin, Direktur LBH Papua juga sempat meminta massa untuk membuka blokir jalan, namun hasilnya: massa tetap bersikukuh menutup jalannya. Massa tetap bertahan dengan maksud agar pihak pemerintah dan memberikan tanggapan dengan menemui mereka di tempat aksi, namun hal ini tidak dipenuhi.

Keadaan akhirnya tidak terkendali dan terjadilah bentrokan antara pihak keamanan dan para pendemo. 4 orang anggota polisi dan Angkatan Udara tewas dalam insiden ini. Belasan anggota Polisi juga mengalami luka-luka akibat bentrokan tersebut. Sementara itu di pihak massa juga tidak sedikit yang mengalami luka-luka akibat bentrokan tersebut. Beberapa mahasiswa terkena luka tembakan dan luka-luka akibat bentrok fisik. Bahkan para wartawan yang meliput aksi tersebut tidak lepas dari pukulan aparat keamanan dan juga massa yang pada saat itu sudah dalam keadaan tidak terkendali. Peristiwa ini kembali mengisi ingatan pahit masyarakat di Papua.

Lantas bagaimanakah sistem koordinasi pihak keamanan sendiri yang pada saat itu tengah melakukan pengamanan? Pihak Kepolisian serta TNI telah menurunkan cukup banyak anggota intelijennya. Apakah laporan-laporan intelijen di lapangan sungguh telah membantu koordinasi pengamanan aksi, terutama dalam menentukan tindakan penanganan yang tepat?

Di lain pihak, ada penilaian tentang kesalahan komando atau kesalahan prosedur oleh komandan Brimob dan juga pihak kepolisian yang pada saat itu mengamankan aksi. Pada saat itu aparat keamanan tidak dilengkapi alat pengamanan lengkap sehingga harus menelan korban jiwa. Hal ini semakin dikuatkan dengan dicopotnya Kombes Polisi Tatang Hermawan dari jabatannya sebagai Komandan Brimobda Papua oleh Kapolri jenderal Polisi Sutanto, pada tanggal 17 Maret, satu hari sesudah insiden tersebut.

Tewasnya 4 orang aparat keamanan ini meninggalkan luka mendalam bagi para anggota Brimobda Papua. Melihat rekannya menjadi korban, mereka tidak segan-segan untuk melakukan tindakan balas dendam. Beberapa saat sesudah 2 jenazah dievakuasi, anggota Brimobda melakukan penyisiran di sekitar Abepura dan Waena. Mereka melepaskan tembakan membabi buta dan melukai warga sipil yang melintas di sekitar Abepura. Mereka juga melakukan blokade jalan dan *sweeping* kendaraan, serta menangkap siapa saja yang dicurigai terlibat dalam aksi tersebut. Bahkan beberapa wartawan media nasional yang datang ke Jayapura untuk meliput situasi pasca bentrok, terpaksa harus menahan pukulan dan perusakan peralatan mereka oleh para anggota Brimobda, persis di depan markas mereka. Parahnya, penyisiran dan penangkapan ini semakin menjurus ke SARA. Mereka menganiaya siapa saja yang kelihatan sebagai mahasiswa apalagi kelihatan sebagai orang Papua dan terlebih mereka yang berasal dari wilayah Pegunungan Tengah.

Pada saat itu para tahanan yang terdiri dari warga sipil dan mahasiswa mengalami penyiksaan selama berada di tahanan dan tidak ada pendampingan hukum. Akses pendampingan hukum ditutup oleh pihak kepolisian. Beberapa pengacara yang akan

melakukan pendampingan berada di bawah tekanan. Tentang penyiksaan tersebut, SKP Keuskupan Jayapura melaporkan hal ini kepada Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan<sup>1</sup>. Karena akses informasi mengenai keberadaan para tahanan ini begitu tertutup terhadap publik. Masyarakat tidak memiliki sumber informasi yang terpercaya dan berimbang tentang situasi pasca bentrok. Terjadi kesimpangsiuran informasi dengan beredarnya berbagai isu yang tidak jelas dikembangkan oleh siapa, tetapi sangat meresahkan masyarakat.

'B 16 M', istilah yang dipakai untuk menyebut bentrokan 16 Maret ini membuat Jakarta seperti kebakaran jenggot. Satu hari pasca bentrokan, rombongan Jakarta yang terdiri dari Menkopolkam Widodo AS, Panglima TNI Marsekal TNI Djoko Suyanto, Kapolri Jenderal Polisi Sutanto dan Kepala BIN Syamsir Siregar datang ke Jayapura untuk melihat situasi Jayapura dan juga melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama. Namun sangat disayangkan bahwa pertemuan ini hanya seperti inspeksi mendadak yang berisi pengarahan tanpa di buka suatu dialog untuk menyikapi situasi yang sedang memprihatinkan di Jayapura. Rombongan Jakarta hanya mengunjungi keluarga korban dari pihak aparat keamanan lalu terburu-buru meninggalkan Jayapura. Sikap ini ditanggapi keras oleh para pimpinan agama dengan melayangkan surat protes kepada Presiden SBY. Kepanikan Jakarta juga ditunjukkan dengan menuduh beberapa pihak mendalangi aksi ini seperti Kelompok LSM HAM lokal, APHEDA (LSM Australia) bahkan gereja-gereja. Memang sangat disayangkan sikap Jakarta ini. Mestinya Jakarta lebih terbuka dan membuka dialog dengan berbagai pihak di Papua seperti yang diharapkan juga oleh pimpinan-pimpinan agama di Papua.

Sejumlah seruan dari LSM lokal, nasional dan para pemimpin Agama di Papua dikeluarkan sebagai bentuk keprihatinan mereka. Pada intinya seruan-seruan tersebut menyayangkan aksi damai yang kemudian berakhir dengan bentrok sampai memakan korban jiwa dan korban luka-luka. Mereka juga menyerukan agar pihak kepolisian dalam hal ini Brimobda Papua dan pihak TNI untuk tidak melakukan penyisiran lagi terutama ke asrama-asrama mahasiswa dan kantong-kantong pemukiman masyarakat khususnya yang berasal dari daerah Pegunungan Tengah.

Tuduhan-tuduhan yang dikembangkan oleh Jakarta dan kesimpangsiuran informasi menimbulkan ketakutan berbagai kalangan di Jayapura. Mahasiswa dicap sebagai pengacau. Ketakutan ini mempengaruhi kepedulian dan solidaritas masyarakat Papua. Publik menjadi panik, mengasingkan 'kelompok mahasiswa' sebagai kelompok pembuat onar, kalangan pekerja HAM juga memilih diam. Padahal jika melihat esensinya, demo ini adalah protes terhadap keberadaan PT Freeport di Papua yang telah menimbulkan dampak negatif yang besar bagi masyarakat di Papua selama puluhan tahun. Seharusnya isu ini menjadi keprihatinan bersama sebagai bentuk solidaritas masyarakat di Papua terhadap kepentingan rakyat Papua sendiri.

Stigma separatis yang telah dihidupkan sejak lama menjadi semakin kuat dengan adanya insiden ini dan diperburuk dengan beredarnya berbagai isu yang meresahkan masyarakat. Karena dicap sebagai pengacau, banyak mahasiswa terutama yang berasal dari wilayah Pegunungan Tengah dan sedang belajar di Jayapura mengalami ketakutan dan mengungsi akibat penyisiran yang dilakukan maupun perusakan selusin asrama mahasiswa. Pemukiman penduduk yang berasal dari Pegunungan Tengah seperti di wilayah Sentani, Angkasa dan sekitar kota Jayapura juga didatangi oleh oknum-oknum aparat keamanan berpakaian preman.

---

<sup>1</sup> Laporan Franciscans International dan SKP Keuskupan Jayapura kepada Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan tanggal 17 Maret 2006.

Akibatnya terjadi pengungsian warga ke tempat-tempat yang dianggap aman. Di tingkat nasional, situasi Papua digambarkan *chaos* dan ditunjang dengan tersumbatnya aliran informasi yang akurat.

Insiden 16 Maret 2006 menjadi suatu pelajaran berharga bagi semua pihak. Bagi masyarakat Papua, perjuangan untuk terus menyuarakan penderitaan dan keterpurukan yang terjadi selama bertahun-tahun karena ketidakadilan di atas Tanah ini, haruslah terus dikumandangkan dan menjadi perjuangan bersama. Bukan lagi suara orang gunung atau orang pantai, orang terpelajar atau orang tidak terpelajar, akan tetapi merupakan suara orang Papua. Kekerasan bukanlah jalan untuk menegakkan keadilan dan senyatanya justru melahirkan kekerasan berikut. Sudah terlalu banyak air mata dan darah tertumpah di atas Tanah ini. Jangan membasahinya lagi dengan darah. Cara-cara damai adalah pilihan yang terbaik untuk mencapai suatu impian Papua sebagai Tanah Damai. Bagi pihak Pemerintah, Kepolisian atau aparat keamanan, pendekatan kekerasan dan militeristik tidak akan pernah dapat menyentuh orang (rakyat) Papua. Rakyat Papua adalah orang-orang yang sangat terbuka dengan dialog dan kebersamaan. Falsafah 'Makan Sirih Pinang' sebagai simbol persaudaraan dan perdamaian orang Papua harus dihayati benar oleh Pemerintah jika memang ada itikad baik untuk melihat Papua sebagai bagian terintegral dari negara ini.

## **B. HAK-HAK EKONOMI DAN BUDAYA**

Di bidang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, uraian ini memfokuskan pada beberapa unsur utama, yaitu [1] kesejahteraan masyarakat, [2] problem CPNS dan PKL, [3] wabah HIV/AIDS, [4] perlindungan perempuan dan anak, [5] problem tenaga guru, [6] pengurusan sumber daya alam, dan terakhir [7] penyelenggaraan pemerintahan. Berikut ini akan diuraikan aspek-aspek tersebut sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi satu sama lain.

### **B.1. Kesejahteraan Masyarakat**

Menilai sejahtera atau tidak sejahteranya suatu masyarakat dapat dilihat dari terpenuhinya standar kehidupan yang memadai yaitu terpenuhinya pangan, sandang, dan perumahan yang baik, serta terpenuhinya pendidikan dasar dan perawatan kesehatan bagi masyarakat. Masih melekat dalam ingatan kita adanya dana subsidi bagi masyarakat miskin yang diberikan oleh pemerintah. Setelah **Beras Miskin (Raskin)**, muncul Kartu Sehat dan yang terakhir menjadi perdebatan adalah dana subsidi berupa BLT (Bantuan Langsung Tunai). Bantuan pemerintah ini mendapat tanggapan dari masyarakat. Orang berbondong-bondong mendaftarkan dirinya ke kelurahan-kelurahan dengan harapan akan mendapatkan bantuan tersebut. Lantas sejauh manakah bantuan-bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat kategori miskin di Papua? Bagaimana pula pengelolaan dan penyalurannya di Papua?

Seperti disebutkan di dalam kronik, misalnya di wilayah Waena, Distrik Abepura, sebanyak 2.039 orang yang dikategorikan miskin tidak seluruhnya memperoleh jatah Beras Miskin (raskin). Hanya 447 orang saja yang menerima jatah Raskin, yang berarti sekitar 20 % saja dari total masyarakat miskin. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jayapura, M.H.T.Sagala, SH,MM mengatakan bahwa pemerintah mengalokasikan kuota Raskin bagi masyarakat Kota Jayapura pada tahun 2006 sebanyak 2.225 ton. Jumlah ini dikatakan mengalami

penurunan 40% dari tahun sebelumnya. Apakah penurunan kuota Raskin ini disebabkan oleh menurunnya jumlah orang kategori miskin di Kota Jayapura?

Kasus Raskin di Distrik Waena hanyalah salah satu contoh dari berbagai kasus Raskin di sejumlah distrik yang ada di Papua. Bukan rahasia umum lagi bahwa sering terjadi penyalagunaan dan penyelewengan bantuan yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintahan yang ada di tingkat distrik, kelurahan atau desa, maupun juga oleh oknum masyarakat tertentu. Yang menjadi pertanyaan, bentuk pengawasan seperti apakah yang harus dilakukan oleh pemerintah agar penyaluran Raskin benar-benar sampai kepada tangan yang membutuhkan.

Kasus rawan pangan di beberapa wilayah di Pegunungan Tengah seperti di Kabupaten Yahukimo, Jayawijaya, Tolikara dan Pegunungan Bintang, yang juga merupakan wilayah pemekaran kabupaten, dapat memberikan gambaran kepada kita sejauh mana pemerintah mempunyai perhatian yang cukup memadai pada sektor ketahanan pangan ini. Apakah program pembangunan yang dibuat sudah dapat menjawab standar minimum pemenuhan kehidupan yang memadai, seperti yang termuat dalam Pasal 11 Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya?

Di sisi lain, pemberian bantuan senyatanya telah melahirkan masalah baru karena masyarakat di Papua menggantungkan hidupnya kepada bantuan-bantuan seperti ini. Bahkan masyarakat yang turun-temurun hidupnya bergantung dari hasil kebun berupa umbi-umbian dan sagu, sudah mulai meninggalkan kebun dan dusun sagunya dengan jaminan bahwa mereka akan tetap hidup karena ada Raskin. Konflik kecil antar masyarakat pun terjadi karena penyaluran Raskin tidak merata. Sungguh memprihatinkan jika orang Papua dikatakan dan beranggapan “miskin” dan kelaparan hanya karena tidak makan nasi atau Beras Miskin.

Beberapa pertanyaan refleksi bagi kita adalah apakah pemberian Raskin menjadi satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Papua? Seberapa besarkah ketergantungan masyarakat dan orang Papua terhadap beras? Apakah Pemerintah Papua pernah memikirkan program kemandirian pangan bagi rakyat Papua dengan mengembangkan sistem pertanian dan pengelolaan sumber pangan berbasis lokal?

Demikian pula dengan Kartu Sehat atau ‘Askes Miskin’ yang merupakan satu program subsidi pemerintah di bidang kesehatan kepada masyarakat kategori miskin. Masyarakat miskin diharapkan dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dengan biaya yang murah. Tetapi kenyataannya misalnya di Kelurahan Awiyo, Distrik Abepura yang masih termasuk dalam wilayah Kota Madya Jayapura dan letaknya tidak jauh dari ibukota Provinsi, sebanyak 100 warga miskin belum menerima kartu tersebut.

Tidak tersalurkannya kartu sehat kepada masyarakat yang membutuhkan bisa saja terjadi karena lemahnya aparat dalam melakukan tugasnya. Tetapi juga ada warga masyarakat yang dengan sengaja memanfaatkan kelemahan aparat ini dengan mengaku sebagai warga miskin, kemudian mendapatkan kartu sehat. Kenyataan-kenyataan seperti ini tidak hanya muncul di satu kelurahan atau wilayah, tetapi dapat dijumpai juga di beberapa distrik. Hal ini terjadi juga pada akhir tahun lalu, ketika ditemukan kasus penyalagunaan kartu sehat oleh warga yang mampu secara ekonomi, di Puskesmas Hamadi, Jayapura.

**Bantuan Langsung Tunai (BLT)** yang disalurkan sebagai bentuk subsidi pemerintah terhadap masyarakat miskin juga dinilai oleh berbagai pihak hanya menimbulkan masalah. Berbagai pendapat dan tentangan datang dari banyak

kalangan. Pemerintah Pusat akhirnya memutuskan untuk menghapuskan program BLT dan menggantikannya dengan program pemberdayaan masyarakat. DPR Papua melalui Komisi B mendukung penghapusan tersebut karena menilai bahwa telah terjadi banyak penyimpangan dalam penyalurannya.

Selain telah terjadi banyak penyimpangan dalam penyalurannya, BLT sebenarnya tidak cukup membantu masyarakat dalam mengatasi persoalan kesejahteraannya. Jumlah dana yang memang tidak terlalu besar—hanya sekitar Rp. 100.000 dan diterima secara rutin—hanya membuat orang menjadi malas, tergantung, dan tidak lagi memiliki daya juang untuk mengembangkan usaha. Karena itu memang bijaksana jika bentuk subsidi dialihkan dalam bentuk dana pemberdayaan masyarakat. Hanya saja perlu dibuat suatu sistem yang jelas sehingga tidak hanya dana saja yang dikucurkan tetapi disertai juga dengan pembinaan dan pendampingan yang teratur kepada masyarakat yang memanfaatkan dana tersebut. Untuk itu memang diperlukan kesiapan dan keseriusan dari aparat pemerintahan dan instansi terkait yang akan terlibat dalam program ini.

Terlepas dari segala bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang paling penting adalah bagaimana pemerintah di Papua mengembangkan suatu program pemberdayaan masyarakat yang dapat dimulai dari kampung-kampung sehingga betul-betul menyentuh masyarakat. Bantuan demi bantuan memang sangat diperlukan sesuai dengan kewajiban Pemerintah untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun alangkah baik jika hal tersebut juga dibarengi dengan pembinaan dan pendampingan masyarakat, terutama kelompok masyarakat kategori miskin.

## **B.2. Hak Atas Pekerjaan: CPNS dan PKL**

Ketersediaan lapangan kerja dan tingginya angka pengangguran tetap menjadi permasalahan di berbagai daerah di Papua. Dibukanya beberapa kabupaten baru dan distrik baru ternyata belum dapat menjawab kebutuhan lapangan kerja bagi berbagai lulusan di Papua. Padahal di sisi lain ada beberapa sektor yang memang membutuhkan tambahan tenaga seperti di bidang kesehatan dan pendidikan. Dua sektor ini seakan tidak pernah tercukupi kebutuhan tenaganya.

Tanggal 28 Februari 2006 telah dilaksanakan ujian akademik seleksi **CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil)** se-Papua secara serentak di semua wilayah Provinsi Papua. Tercatat sebanyak 58.000 pencari kerja mengikuti tes ini. Padahal formasi yang disediakan hanya 8.056 mulai dari tingkat provinsi sampai ke kabupaten dan kota yang berarti peluang hanya sekitar 14%. Sekarang tinggal faktor keberuntunganlah yang menentukan lulus tidaknya mereka.

Dalam persaingan yang ketat tersebut, lagi-lagi pemerintah Provinsi Papua dituntut tanggung jawabnya untuk memperhatikan pencari kerja asli Papua. Memang tidak sedikit pencari kerja yang datang dari daerah lain seperti Jawa, Sulawesi dan Sumatera untuk mengadu nasibnya di Papua. Untuk itu pemerintah Papua diminta serius berpegang kepada UU Otsus pasal 62 ayat 2 dalam menciptakan lapangan kerja dan menentukan formasi ketersediaan lapangan kerja.

Melihat hal ini, patutlah kita bertanya apakah dengan membuka kesempatan bekerja di sektor formal seperti bidang pemerintahan adalah satu-satunya jalan untuk mengatasi pengangguran di Papua? Seberapa besarkah tanggungjawab pemerintah Provinsi, kota dan kabupaten untuk mengembangkan sektor swasta dengan

menggandeng para investor yang datang di Papua sehingga dapat menampung para pencari kerja ini?

Salah satu cara yang dapat dipikirkan adalah pemerintah perlu mengeluarkan suatu aturan yang mewajibkan para investor yang akan berinvestasi di Papua untuk bertanggungjawab merekrut tenaga kerjanya dari Papua dan bukan dari luar Papua. Dengan demikian masalah pengangguran dapat teratasi secara perlahan-lahan. Di lain pihak, terbukanya kesempatan pendidikan seharusnya memperhatikan perimbangan bidang studi atau bidang keahlian yang cukup beragam sesuai dengan kebutuhan di Papua. Adanya kesempatan pengelolaan pendidikan oleh pihak swasta perlu memperhatikan unsur ini. Seharusnya sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta membuka bidang-bidang yang tidak dikelola oleh instansi negeri, sehingga lulusan yang dihasilkan dapat memenuhi formasi yang dibutuhkan di Papua.

Dengan terbatasnya lapangan kerja di sektor formal, sektor informal berkembang pesat terutama di wilayah perkotaan. Situasi ini tercermin dari kecemasan **Pedagang Kaki Lima (PKL)** akibat upaya penertiban PKL yang dilakukan oleh Dinas Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) Kota Jayapura. Hal ini dilakukan karena meningkatnya PKL yang berjualan di sepanjang trotoar kota sehingga mengganggu kenyamanan dan kerapian kota. Tidak hanya itu, pihak pemerintah Kota Jayapura juga melakukan penertiban dan penutupan tempat-tempat usaha yang tidak memiliki ijin usaha maupun ijin bangunan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin hari jumlah PKL di wilayah perkotaan, seperti Kota Jayapura, semakin meningkat. Jika diamati, PKL ini kebanyakan berasal dari kelompok suku Jawa dan Makassar. Mereka menduduki trotoar-trotoar sepanjang pertokoan dan jalan umum. Jika sore hari tiba, mereka mulai memadati sepanjang trotoar dan pelataran pertokoan kemudian menggelar berbagai jenis dagangan. Kondisi ini sangat mengganggu kenyamanan warga dan pejalan kaki karena sudah tidak ada ruang bagi pejalan kaki sehingga pejalan kaki lebih memilih untuk berjalan di jalan raya. Akibatnya terjadinya kemacetan lalu lintas, terutama pada musim liburan atau pada saat malam minggu tiba.

Fenomena peningkatan jumlah PKL dapat menjadi petunjuk kuat tentang meningkatnya jumlah pendatang (migran) dari luar Papua ke Papua yang tidak dapat ditampung di sektor formal. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Para migran ini datang dan menguasai berbagai sektor informal dan bahkan merambah lahan pasar para pedagang asli Papua. Sebagai contoh, kalau dulu hanya orang Papua yang berdagang sayur mayur, ikan asar dan pinang, saat ini ada banyak orang Makassar, Buton atau Jawa yang juga menjual barang yang sama. Akhirnya terjadi persaingan dalam merebut pembeli, dan lagi-lagi pedagang asli Papua hanya gigit jari menghadapi kenyataan yang ada karena kalah bersaing. Entah unsur apa yang menyebabkan pedagang Papua tidak dapat bersaing dengan para pedagang migran ini.

Dalam Undang-undang No. 21/2001 tentang Otsus Pasal 42 disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban memperhatikan dan mengembangkan suatu sistem perekonomian rakyat di Papua yang betul-betul memberdayakan orang Papua sehingga dapat menjadi pelaku ekonomi di Tanahnya sendiri. Belum adanya suatu konsep yang mantap tentang pengembangan ekonomi rakyat sementara para migran yang terus berdatangan dan menguasai perekonomian, membuat pedagang asli Papua semakin terpuruk. Situasi ini akan memunculkan gesekan-gesekan sosial yang jika tidak segera ditanggapi akan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Untuk itu sebaiknya pemerintah Kota Jayapura dan juga Pemerintah Provinsi Papua perlu memperhatikan secara serius dengan membatasi peningkatan laju migrasi.



Harus ada suatu ketegasan dari pemerintah dengan membuat Perdasus yang mengatur kependudukan sehingga tidak hanya membatasi masuknya penduduk pendatang dari luar Papua ke Papua tetapi juga arus migrasi intern yang makin memadati wilayah perkotaan di Papua dan meninggalkan wilayah pedesaan yang makin kekurangan tenaga kerja produktif.

#### **B.4. Hak Atas Kesehatan: wabah HIV/AIDS?**

Belum hilang dari ingatan kita bencana peristiwa gizi buruk dan kekurangan pangan di Yahukimo akhir tahun lalu. Kini kita kembali prihatin dengan Kejadian Luar Biasa di Jayawijaya dan wabah diare di wilayah Asmat. Berbagai peristiwa ini memberikan gambaran yang jelas kepada kita tentang lemahnya pelayanan kesehatan di daerah-daerah tersebut yang secara umum menggambarkan keadaan pelayanan kesehatan di Papua. Kekurangan tenaga medis dan fasilitas medis yang memadai selalu menjadi faktor utama lemahnya pelayanan. Unsur lain yang juga mempengaruhi adalah kesejahteraan tenaga medis menyangkut pembayaran gaji, status kepegawaian dan perumahan.

Uraian ini akan memfokuskan perhatian pada wabah HIV/AIDS di Papua. Angka kasus HIV/AIDS di Papua seperti tidak pernah turun tetapi justru semakin meningkat. Jika melihat perkembangan kasus HIV/AIDS yang terjadi selama 3 bulan terakhir di Biak Numfor tercatat sebagai berikut ; 133 kasus pada tanggal 31 November 2005, awal Januari 2006 tercatat 140 kasus, akhir Januari menjadi 145 kasus dan pada awal Februari menjadi 149 kasus, kita dapat memperkirakan seberapa cepat virus mematikan ini menyebar di Papua.

Gambaran di kabupaten Biak secara langsung dapat menunjukkan kepada kita bagaimana perkembangan HIV/AIDS di Papua. Dinas Kesehatan Provinsi Papua melaporkan bahwa per Desember 2005 angka HIV/AIDS Papua telah menembus angka 2163 kasus masing-masing 1202 positif HIV, 961 AIDS, dan 289 sudah meninggal dunia. Jika kita mengacu pada fenomena gunung es dimana angka yang dilaporkan hanyalah sepertiga kenyataan, maka dapat diperkirakan bahwa sekitar 6000 kasus tidak muncul ke permukaan atau tidak terdata.

Jumlah penduduk Papua berdasarkan sensus 2002 berjumlah 2.387.427 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun 1999-2000 adalah 3,18 %. Dengan melihat angka laju peningkatan kasus HIV/AIDS dan dibandingkan dengan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk, muncul pertanyaan berapa banyak sisa manusia yang terbebas dari HIV/AIDS di Papua untuk 5 tahun ke depan. Dengan demikian kita dapat membayangkan betapa bahayanya virus ini bagi masyarakat Papua.

Berbagai program dan upaya yang telah dibuat seperti tidak membuahkan hasil. Pernyataan ini kelihatan mengandung nada pesimis, tetapi kita perlu melihat kenyataan yang ada. Program kampanye yang dibuat oleh KPA atau LSM-LSM pemerhati HIV/AIDS, Dinas Kesehatan bahkan gereja seakan belum mampu membendung laju pertumbuhan HIV/AIDS. Sebagai contoh, program kondom yang dikampanyekan mulai beberapa tahun belakangan ini dan dianggap sebagai cara yang cukup ampuh untuk mengurangi penularan HIV/AIDS di Papua ternyata masih belum maksimal. Dalam evaluasi penyebaran IMS/HIV/AIDS yang berlangsung di Merauke, Kasubdin P2M Dinkes Kabupaten Merauke dr. Nevil Muskita mengatakan justru ada penurunan jumlah pemakaian kondom di daerah ini.

Melihat kenyataan tersebut maka perlu dipikirkan bersama bentuk penanganan HIV/AIDS yang terpadu. Pendekatan medis sangat diperlukan namun hal yang sangat mendasar adalah menyadarkan masyarakat sebagai manusia dan pribadi yang sadar akan bahaya HIV/AIDS. Menanamkan pendidikan moral dan keagamaan dalam keluarga menjadi suatu hal yang penting tetapi ini tidaklah cukup. Di tingkat sistem hukum, perlu diambil langkah politis guna menanggulangi faktor pendukung penyebaran HIV/AIDS. Untuk itu perlulah dibuat perda yang secara ketat membatasi peredaran miras dan hiburan malam. Perdagangan narkoba yang makin ramai di Jayapura dalam kaitan dengan jalur ke PNG perlu secara nyata diperangi. Selain itu, perdagangan perempuan, kecanduan alkohol dan kecanduan narkoba perlu diperangi secara nyata oleh pemerintah dengan langkah-langkah yang efektif seperti dengan pendirian klinik rehabilitasi alkohol dan narkoba serta tempat perlindungan bagi kaum perempuan yang diperdagangkan.

Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota dan Kabupaten umumnya tidak memiliki Perda yang mengatur peredaran Miras secara ketat. Ada dugaan bahwa pembatasan peredaran Miras akan mengganggu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika ini benar, kiranya sangat disayangkan karena pemerintah di Papua hanya berpikir tentang PAD tanpa berpikir tentang manusia-manusia dan generasi yang hidup di atas Tanah ini? Apakah 10 tahun atau 20 tahun ke depan, tanah ini masih akan didiami oleh generasi yang berkualitas dan tidak rusak moral dan fisiknya karena kecanduan alkohol dan narkoba? Ataukah orang Papua akan semakin berkurang populasinya karena HIV/AIDS? Pertanyaan ini mengajak kita untuk mengambil langkah dan berbuat sesuatu, menyelamatkan generasi kita sebelum semuanya terlambat.

### **B.5. Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak**

Meskipun **Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT)** telah dikeluarkan sejak 2 tahun lalu, masih saja dijumpai banyak kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama kasus kekerasan dalam rumah tangga, dengan perempuan dan anak-anak sebagai korban. Sayangnya kasus-kasus ini masih dipandang sebagai tindakan kriminal biasa, dan belum mendapatkan perhatian serius dari masyarakat, media massa, tetapi juga dari pihak penegak hukum.

Ulasan berbagai berita kekerasan terhadap perempuan dan anak di media massa selalu memberikan kesan bahwa masalah ini hanyalah kriminal biasa dan bukan pelanggaran HAM. Biasanya korban mengadu atau melapor ke Polisi, namun setelah itu mereka tidak mendapatkan penanganan lebih lanjut secara hukum apalagi secara psikologis. Hanya beberapa kasus saja yang telah ditangani secara hukum. Hal ini ditegaskan juga oleh Ketua LP3A Papua, Selfiana Sanggenafa, SH yang mengatakan bahwa pada tahun 2005 ada 65 kasus dan yang diproses sampai pada tingkat litigasi hanya 27 kasus.

Dalam kronik digambarkan beberapa contoh kasus yaitu **Kekerasan Fisik** (Pasal 6 UU KDRT), **Kekerasan Seksual** (Pasal 8 UU KDRT), dan **Kekerasan Ekonomi** (Pasal 9 UU KDRT), yang biasanya disertai dengan **Kekerasan Psikis** (Pasal 7 UU KDRT). Korban biasanya hanya mendapatkan perlindungan sementara dari pihak Kepolisian dan penanganan medis; namun tidak berlanjut sampai pada pendampingan dan penanganan hukum. Di samping itu, pihak korban sering beranggapan bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah keluarga dan juga tabu sehingga banyak korban yang memilih untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dari pada secara hukum.

Masyarakat kita belum sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan secara khusus kekerasan dalam rumah tangga. Banyak keluarga yang memahami bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan urusan rumah tangga dan tidak boleh dicampuri atau diketahui oleh orang lain. Bahkan ada pendapat bahwa suami memukuli isteri adalah bagian dari cara suami “mendidik” isteri. Masyarakat kita juga berpikir bahwa mencampuri urusan keluarga atau urusan rumah tangga orang lain adalah hal yang tabu. Karena itu jika terjadi penganiayaan atau kekerasan, mereka lebih banyak memilih diam daripada memberikan perlindungan kepada korban dan melaporkannya kepada Polisi.

Sementara itu di kalangan aparat penegak hukum seperti Polisi banyak juga yang belum memahami sepenuhnya UU KDRT. Hal ini terlihat dari penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak diarahkan pada kasus penganiayaan semata. Pasal-pasal yang dikenakan juga lebih banyak menggunakan pasal tentang penganiayaan. Selain itu bidang yang menangani tindak kekerasan dalam rumah tangga di kepolisian yang disebut RKT belum tersedia di semua Polres atau Polsek. Di Jayapura RKT hanya terdapat di Polresta Jayapura, sementara tenaga polisi yang memiliki keahlian dalam bidang pendampingan dan psikologi serta KRT masih sangat kurang. Kendala ini membuat pelayanan Kepolisian kurang maksimal.

UU KDRT mewajibkan pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan perumusan kebijakan hingga sosialisasi dan penyelenggaraan pendidikan sensitif jender (Pasal 11). Ini berarti pemerintah melalui instansi terkait tidak hanya mengeluarkan produk hukum tetapi yang harus melakukan sosialisasi terutama kepada para wartawan dan media agar dapat melihat permasalahan KDRT dari perspektif jender. Sosialisasi disertai dengan pendidikan perlu dilakukan terus-menerus bagi berbagai lapisan masyarakat. Dan yang tidak kalah penting adalah melakukan advokasi tentang KDRT. Dengan demikian masyarakat akan semakin paham tentang KDRT dan produk hukumnya.

Sistem pelayanan yang menyeluruh terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga harus disiapkan oleh pemerintah, mulai dari pelayanan medis, penanganan trauma, pendampingan saksi, keluarga korban dan pendampingan hukum. Untuk itu pemerintah dapat bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat yang khusus membidangi hal ini. Selama ini fungsi tersebut lebih banyak dijalankan oleh lembaga sosial yang memberikan perhatian khusus pada masalah-masalah perempuan dan anak. Karena itu aparat pemerintah harus memahami dengan baik UU KDRT agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tercatat di dalam kronik adalah kecanduan minuman keras dan desakan ekonomi. Kedua hal ini perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah karena menghentikan perdagangan Miras dan mengupayakan pengembangan ekonomi rakyat merupakan salah satu cara untuk mengurangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat juga perlu sadar dan berbuat sesuatu misalnya dengan melakukan gerakan tolak Miras dan Prostitusi.

#### **B.5. Hak atas Pendidikan: minimnya tenaga guru**

Di bidang pendidikan, kurangnya tenaga guru terutama di daerah-daerah terpencil masih menjadi fokus perhatian selama tiga bulan ini; padahal pendidikan – khususnya pendidikan dasar—merupakan salah satu sektor prioritas dari empat prioritas dalam Otonomi Khusus.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua lulusan dan pencari kerja adalah tenaga-tenaga yang memang memiliki kekhususan dalam bidang pendidikan. Di satu sisi lulusan tenaga guru pendidikan dasar masih sangat kurang; padahal program pendidikan guru SD sudah dibuka di Universitas Cenderawasih. Dinas Pendidikan dan Pengajaran juga telah menyelenggarakan pendidikan akta 4 bagi lulusan atau pencari kerja yang ingin mengabdikan dirinya menjadi guru. Lantas mengapa masih saja ada keluhan tentang kekurangan tenaga guru di berbagai daerah?

Sangat mungkin bahwa angkatan kerja yang ada setiap tahun kurang berminat menjadi guru apalagi di wilayah pedalaman. Kebanyakan pencari kerja lebih memilih untuk bekerja di sektor pemerintahan, sektor swasta, atau sektor pendidikan di lingkungan perkotaan. Alasan ini dapat dimengerti jika kita melihat keterbatasan fasilitas kesejahteraan bagi guru. Sering kita mendengar guru-guru yang bertugas banyak yang meninggalkan tempat tugas dengan alasan tidak betah. Bagaimana mungkin seorang guru dapat mengajar dengan tenang jika kenaikan pangkat, gaji dan jatah berasnya selalu tidak lancar sementara harga bahan pokok di daerah pedalaman sangat tinggi; belum lagi jika tidak tersedia rumah dinas. Siapapun kiranya akan berpikir 2 kali untuk memilih tugas tersebut.

Karenanya kita tidak heran bahwa dalam 3 bulan terakhir ini muncul berbagai aksi mogok mengajar yang dilakukan oleh guru-guru sebagai bentuk protesnya terhadap manajemen sekolah dan tidak adanya transparansi pengelolaan dana **BOS (Bantuan Operasional Sekolah)** dan **SSN (Sekolah Standar Nasional)**. Penyalahgunaan dana dan manajemen sekolah yang kurang profesional dapat disebabkan karena lemahnya pengetahuan guru atau kepala sekolah tentang manajemen tetapi juga karena lemahnya fungsi pengawasan. Untuk itu Dinas P dan P sebaiknya melakukan pendidikan dan pelatihan manajemen sekolah bagi para kepala sekolah dan guru-guru dan meningkatkan fungsi pengawasan. Hal ini kiranya penting dilakukan agar tidak terjadi pemogokan yang berdampak pada terlantarnya siswa.

## **B.6. Pengurusan Sumber Daya Alam**

Sejak bertahun-tahun lamanya Papua telah menjadi incaran karena kekayaan sumber daya alamnya. Selain bahan tambang yang sangat menarik berbagai investor untuk datang ke Papua, hasil hutan juga menjadi primadona. *Instia bijuga* atau Merbau (kayu besi dalam sebutan lokal Papua) menjadi salah satu primadona kayu dari Papua. Puluhan perusahaan pemegang HPH datang ke Papua dan memabat habis hutan di Papua. Bahkan akhir-akhir ini penebangan hutan di Papua tidak hanya dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai ijin resmi, tetapi ada juga pengusaha-pengusaha yang datang tanpa ijin lalu memanfaatkan masyarakat setempat melalui Kopermas atau perorangan untuk mendapatkan kayu berkualitas bagus dengan harga murah. Akibatnya, muncullah berbagai kasus yang disebut pembalakan kayu liar atau *illegal logging*.

Secara ringkas prosedur yang harus ditempuh oleh pengusaha sehingga kayu dapat dikatakan illegal atau legal adalah sebagai berikut. Sebelum melakukan pengangkutan kayu, sebuah perusahaan HPH harus mengajukan permohonan **Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)** kepada Dinas Kehutanan Kabupaten atau Sub Dinas Kehutanan Kota di mana kayu itu berasal. Dinas Kehutanan akan melakukan pemeriksaan sebelum kayu tersebut diangkut. Kayu – kayu ini akan diperiksa dan dicocokkan dengan daftar yang diajukan oleh pemohon. Dari pemeriksaan tersebut akan dibuat **Daftar Hasil Hutan (DHH)** yang di dalamnya

memuat keterangan tentang jenis kayu, volume dalam meter kubik dan jumlahnya. Setelah pemeriksaan, petugas dari Dinas Kehutanan akan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan selanjutnya BAP dan DHH akan dilampirkan pada SKSHH. SKSHH inilah yang dipakai sebagai bukti sah tidaknya kayu-kayu tersebut, sehingga ketika suatu kapal ditemukan sedang mengangkut kayu bulat ataupun kayu olahan, tanpa dilengkapi SKSHH maka dianggap telah melakukan *illegal logging* atau mengangkut kayu ilegal. Demikian pula bagi pengusaha kecil tingkat lokal atau kayu milik masyarakat harus juga memiliki surat keterangan dari Dinas Kehutanan setempat yang disebut Surat Pengantar yang isinya hampir sama dengan SKSHH tentang jenis kayu, jumlah volume dan jumlahnya. Prosedurnya hampir sama, yaitu dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Kehutanan setempat dan akan ada pemeriksaan dan pencatatan sebelum surat keterangan pengangkutan diberikan. SKSHH biasanya diberikan perjangka waktu tertentu, sehingga jika kapal pengangkut tiba di tempat tujuan dan ternyata SKSHH telah jatuh tempo maka kayu-kayu tersebut dianggap ilegal dan kepada pemiliknya dikenakan denda.

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Pokok Kehutanan Pasal 50 mengatur tentang ketentuan dan larangan berkaitan dengan pemanfaatan hasil hutan. Berbagai ketentuan dan larangan ini disertai dengan ketentuan pidana dan sanksi hukum yang tertuang dalam Bab XIV dan Bab XV. Dalam ketentuan tersebut, pada umumnya sanksi yang diberikan untuk pelanggaran pasal 50 adalah kurungan selama 1 – 10 tahun dan denda sebesar Rp. 5 milyar. Pada Bab XV mengenai ganti rugi dan sanksi administratif, diterangkan tentang ganti rugi kepada negara terhadap kerusakan hutan akibat kegiatan pemanfaatan hutan dengan membayar biaya rehabilitasi, pemulihan dan tindakan lainnya, serta juga dikenakan sanksi administrasi.

Dalam tiga bulan ini tercatat 3 buah kasus *illegal logging* penting disidangkan di Pengadilan Negeri, yakni Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Ir. Marthen Kayoi, MM, Mr. Tan dan Agustinus Joumilena dari PT Wapoga Mutiara Timber dan Kepala Dinas Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Provinsi IJB, Ir. ML Rumadas. Dari tiga kasus, dua kasus dan terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah secara hukum dan dinyatakan bebas; sementara dalam satu kasus terdakwa dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp. 30 juta.

Pada kronik memang tidak diuraikan secara jelas masing-masing kasus tersebut, tetapi jelas bahwa terdakwa adalah kepala Dinas Kehutanan sebagai yang disertai wewenang dalam penyelenggaraan kehutanan sesuai dengan pasal 66 UU No.41/1999 dan pengusaha atau pihak yang diberikan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Jika mengacu pada berbagai ketentuan dalam pasal-pasal undang-undang tersebut, memang terkesan bahwa pihak pengusaha memiliki tanggungjawab dan resiko yang besar jika terjadi pelanggaran. Sementara pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan lebih banyak diuntungkan dengan pasal-pasal tersebut. Namun senyatanya, pelanggaran terhadap pengelolaan hutan ini tidak lepas dari peran oknum-oknum aparat Dinas Kehutanan sendiri. Bukan rahasia lagi kalau berbagai praktek *kong-kalikong* antara oknum aparat Dinas Kehutanan dan pengusaha sudah sering terjadi.

Selain kasus pembalakan kayu liar, masih muncul juga kasus *illegal fishing* atau penangkapan ikan secara liar di perairan laut selatan Papua oleh kapal-kapal asing maupun kapal dari daerah lain secara tidak sah. Selama ini hanya dilaporkan bahwa pihak Angkatan Laut telah mengamankan wilayah perairan selatan Papua dengan menangkap beberapa kapal asing, namun penanganan kasus-kasus ini juga belum berjalan dengan baik.

Meski masih sangat lemah untuk mengatasi masalah-masalah pelanggaran di bidang pemanfaatan sumber daya alam, produk hukum yang dikeluarkan pemerintah masih dapat dijadikan pegangan untuk menangani kasus-kasus yang terjadi. Secanggih apapun produk hukum yang dihasilkan tetapi tanpa disertai penegakkan hukum yang nyata, maka pengurusan sumber daya alam di Papua tetap akan berlanjut.

### **B.7. Penutup: Penyelenggaraan Pemerintahan**

Sebagai penutup seluruh uraian ini, kajian diarahkan pada masalah penyelenggaraan pemerintahan yang sebenarnya menjadi muara dari berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas. Di sinilah masalah korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan mewarnai dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Papua dalam 3 bulan ini. Muncul aksi protes dari berbagai komponen masyarakat yang menuntut adanya penegakan hukum bagi pelaku-pelaku atau oknum pejabat yang diduga melakukan penggelapan atau penyalahgunaan anggaran pembangunan. Dengan mengacu pada APBD Provinsi Papua dan Kabupaten, masyarakat dapat menilai sesuai atau tidaknya penggunaan anggaran dalam pelaksanaan pembangunan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa bidang pemerintahan merupakan lahan subur tumbuhnya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Betapa tidak, setiap tahunnya dana yang disediakan untuk membiayai pembangunan di Papua sangat besar. Tahun 2006 ini APBD Provinsi Papua sebesar Rp. 4 Triliun. Sementara dana Otonomi Khusus yang digunakan untuk membiayai empat sektor prioritas pembangunan di Papua sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) adalah Rp. 7,2 trilliun. Akan tetapi, jika kita melihat pokok-pokok masalah mendasar di atas berkaitan dengan layanan umum (kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja), akan timbul pertanyaan uang tersebut lari kemana? Apakah betul dana tersebut diinvestasikan bagi kesejahteraan masyarakat Papua?

Contoh yang mencolok adalah kemacetan pemerintahan di Kabupaten Jayawijaya yang telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Setelah Nicolas Jigibalom, S.Sos dilantik sebagai Penjabat Bupati Jayawijaya, berbagai perombakan dan penataan aparatur pemerintahan mulai dilakukannya. Semoga hal ini merupakan awal yang baik untuk mengangkat kembali wilayah ini dari keterpurukannya. Fakta ini kiranya menjadi penanda betapa penting memiliki aparatur yang bersih, sistem pemerintahan yang transparan, partisipasi masyarakat yang nyata, dan penegakkan hukum yang kuat guna menjamin proses pembangunan yang jauh dari sloganistik.

\*\*\*\*\*